

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021



DINAS PERUMAH RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat RahmatNya jualah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2021 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang ada. Hasil pengukuran Kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2021 dan diharapkan dapat pula menjadi sumber informasi yang memadai sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di masa mendatang, khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada semua pihak/pengguna Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Akhir kata dengan senantiasa selalu mengharap ridho dari Allah SWT, selanjutnya kami berharap pula Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 ini, akan menjadi pendorong dan motivasi dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kedepan

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,



ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
NIP. 19731128 199803 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2021, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 30 kegiatan.

Pada tahun anggaran 2021 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 93.411.508.957,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 46.440.983.177,- dan Belanja Modal sebesar Rp 46.970.525.780,-.



Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 89.82%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,



ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
NIP. 19731128 199803 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
3. Isu Strategis	5
4. Produk dan Layanan.....	10
5. Sistematika Penyajian	13
BAB II . PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
1. VISI MISI	15
2. MISI RPJMD	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategi	17
4. Indikator Kinerja Utama	24
5. Perjanjian Kinerja.....	26
6. Program dan Kegiatan.....	37
BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA	43
1. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	15
2. Akuntabilitas Keuangan	255
BAB IV . PENUTUP	246
1. Simpulan.....	246



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut diberikan mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan kota dan pengelolaan persampahan serta lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan mandat ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 antara lain didasarkan atas :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
- h) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a) *Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup* ;
- b) *Kesekretariatan*, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
- c) *Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 2) Seksi Data dan Perencanaan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman; dan
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.
- d) *Bidang Tata Kota dan Kebersihan*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 3) Seksi Kebersihan dan Limbah; dan
 - 4) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

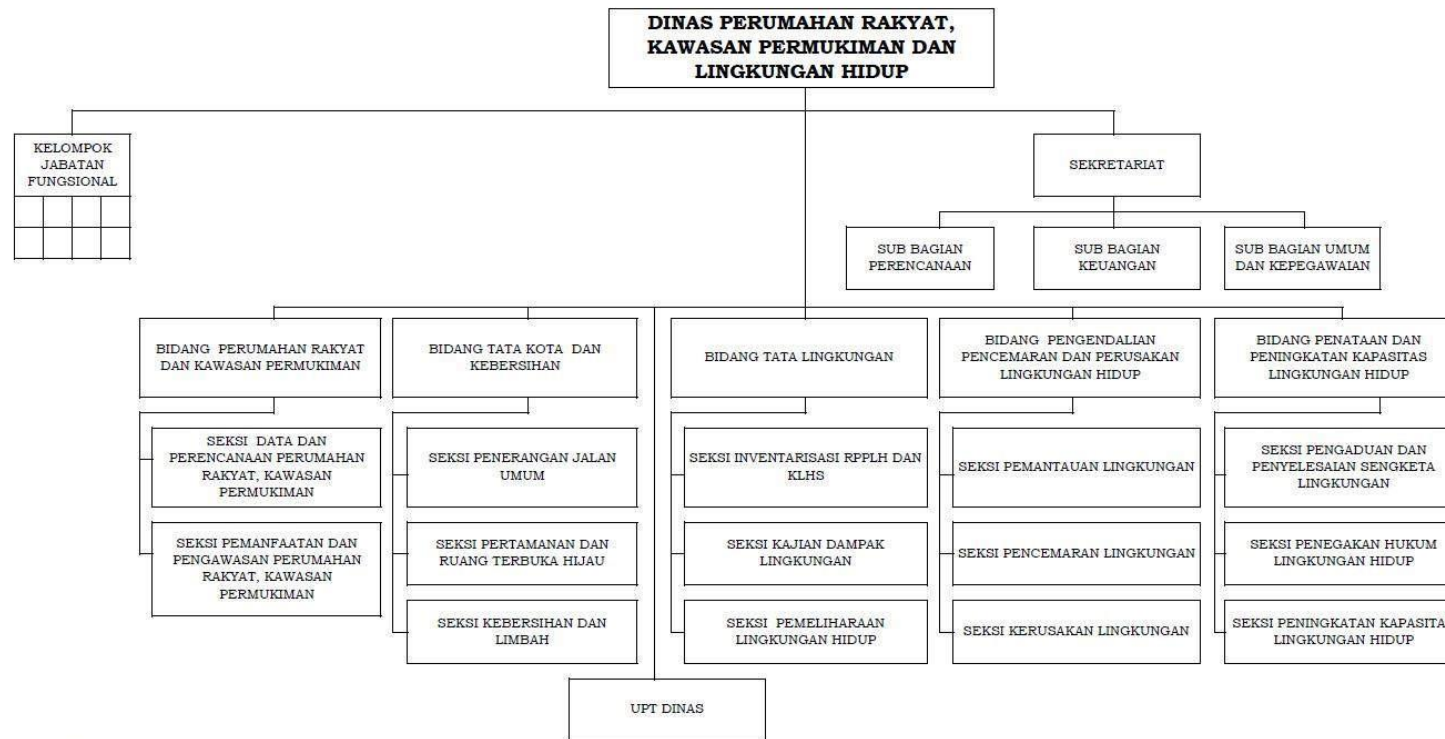


- e) *Bidang Tata Lingkungan*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Seksi Inventarisasi RPPLH & KLHS.
- f) *Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 2) Kerusakan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemantuan Lingkungan;
 - 4) Seksi Pencemaran Lingkungan.
- g) *Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup*, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 3) Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa; dan
 - 4) Seksi Penegakan Lingkungan Hidup.
- h) *UPT Laboratorium* :
 - 1) Kepala Laboratorium;
 - 2) Kasubbag Tata Usaha
- i) *Kelompok Jabatan Fungsional*



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2106



Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut didukung sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia (personil) serta sarana dan prasarana.

Adapun komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2021 terdiri atas 59 orang ASN dan 244 orang PTT, seperti dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1

Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut per 31 Des. 2021

No	Personil	Jumlah (org)	%
1.	ASN	59	19,47
2.	PTT	244	80,53
	Jumlah	303	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2021

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten TanahLaut per 31 Des. 2021 berdasar tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2

Komposisi Personil (ASN) DPRKPLH Tanah Laut berdasar Tingkat Pendidikan

per 31 Des. 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	%
1.	SD	5	8,48
2.	SLTP	5	8,48
3.	SLTA	15	25,42
4.	D3	3	5,08
5.	D4/S1	25	42,37
6.	S2	6	10,17
	Total	59	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2021



Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan per 31 Des. 2021 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.3

Komposisi Personil (ASN + PTT) Berdasar Golongan per 31 Des. 2021

No	Golongan	Jumlah (org)	%
1.	IV	5	1,65
2.	III	25	8,25
3.	II	19	6,27
4.	I	10	3,30
5.	PTT	244	80,53
	Total	303	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2021

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten TanahLaut berdasarkan jabatan per 31 Des. 2021 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini

Tabel 1.4

Data ASN Menurut Jabatan Struktural dan Staf Fungsional per 31 Des. 2021

No	Formasi Jabatan	Jumlah (org)	%
1.	Eselon II	1	1,69
2.	Eselon III	6	10,18
3.	Eselon IV	5	8,48
4.	JFT	12	20,33
5.	Staf	35	59,32
	Total	59	100

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2021



C. Isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal pencapaian RPJMD Kab. Tanah Laut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Setiap program yang disusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai terwujudnya sasaran strategis organisasi, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Menikatnya Kawasan Perumahan Yang Telah Terpenuhi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.



14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Berkaitan dengan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan dan issue strategis yang dihadapi sepanjang tahun 2021, antara lain :

- ✓ Belum sebandingnya antara peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pemantauan lingkungan & pengendalian pencemaran;
- ✓ Masih terbatasnya SDM dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan hidup;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan belum sesuai penanganannya terhadap pengaduan terhadap SOP;
- ✓ Masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan Pengawasan terhadap kegiatan usaha.
- ✓ Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah.
- ✓ Semakin kompleksnya permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
- ✓ Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai;
- ✓ Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan untuk posisi teknis PJU lapangan;
- ✓ Masih kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga pada kawasan permukiman;
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU;
- ✓ Kurang berdayanya masyarakat untuk memperbaiki rumah dan;
- ✓ Belum optimalnya penanganan prasarana utilitas (PSU) oleh masyarakat / pengembang.



D. Produk dan Layanan

Produk dan Layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut antara lain :

a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

✓ Pengaduan Lingkungan Hidup

Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup

✓ Peran serta masyarakat

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan dengan membangun kelembagaan Bank Sampah di masyarakat.

Membangun edukasi lingkungan melalui Program Adiwiyata Sekolah.

Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan lingkungan kepada masyarakat untuk peduli dan menjaga lingkungan.

✓ Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan sebagai upaya preventif dan pencegahan pelanggaran lingkungan terhadap kegiatan usaha.

b) Bidang Tata Kota dan Kebersihan

✓ Pelayanan Persampahan :

- Pelayanan Pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) se Kabupaten Tanah Laut.

- Pelayanan Penampungan sampah dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara Terpadu skala kota Pelaihari

✓ Jaringan PJU

Memberikan pelayanan berupa pemasangan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemeliharanya se Kabupaten Tanah Laut



✓ **Pertamanan dan RTH**

Pelayanan pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan RTH di kota Pelaihari.

✓ **Pelayanan Sanitasi, Air Bersih dan Toilet / Lampu Portable**

- Memberikan Pelayanan berupa penyediaan toilet portable dan air bersih dalam rangka mendukung kegiatan masyarakat yang bersifat darurat dan sementara
- Pelayanan penyediaan penerangan sementara berupa lampu sorot portable dan jaringan penerangan lampu lapangan

c) Bidang Tata Lingkungan

✓ **Lingkungan**

- Memfasilitasi penyusunan Dokumen lingkungan (Amdal, UKL – UPL, dan SPPL), menyusun dokumen lingkungan (IKPLHD, RPPLH, inventarisasi Gas Rumah Kaca, Program Kampung Iklim)

✓ **Rekomendasi Ijin PPLH**

- Memberikan rekomendasi ijin PPLH (Ijin TPS LB3, Ijin IPLC, Ijin Limbah Domestik dan Ijin Land Application (LA)

✓ **Mengeluarkan SPPL**

✓ **Mengeluarkan rekomendasi UKL – UPL**

✓ **Mengeluarkan SKKL, Izin Lingkungan**

d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- ✓ Membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.



- ✓ Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum

e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- ✓ Uji Kualitas Air
- ✓ Uji Kualitas Udara Ambient
- ✓ Uji Kadar Polusi Limbah Cair
- ✓ Uji Emisi / Polusi udara akibat aktivitas industri
- ✓ Memberikan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa

f) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

- ✓ Pelayanan Pengujian Sampel dari Masyarakat, Perusahaan dan atau Institusi
- ✓ Pelayanan Pengujian Sampel pengaduan kasus lingkungan



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
 - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
- B. Akuntabilitas Keuangan



1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2021

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan amanat itu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tanah Laut dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Visi yang di emban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 sesuai Perda nomor 2 Tahun 2019 adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **BERKARYA** : *Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu : secara bersama- sama berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat;*
- **INOVASI** : *Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.*
- **TERTATA** : *Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan*



yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance);

- **RELIGIUS** : Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat;
- **AKTUAL** : Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani; dan;
- **SINERGI** : Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi.

B. MISI RPJMD

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.



Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaandan perkotaan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman
2. Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan
3. Terwujudnya rumah sehat dan layak huni
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien



b. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Menikatnya Kawasan Perumahan Yang Telah Terpenuhi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
							2019	2021	2021	2022	2023
1	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Diperoleh penghargaan kebersihan	2 (Adipura dan Adiwiyata)	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)
						Indeks kualitas air	50,25	50,5	50,75	51	51
						Indeks kualitas udara ambient	87	87,25	87,5	87,75	87,75



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

						Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	71,06%	72%	73,5 %	75%	80%
						Persentase RTH yang terbangun	0,5%	0,5%	1%	3,5%	5%
			Presentase Terbentuk BS.	(100%) 25 Unit	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)
			Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	35 KP (100%)	Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas PSU	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)
					Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	presentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%



						Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2		Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	(25 Desa/Kel dari 135 Desa Kel) 20%)	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	1. Persentase peningkatan kampung iklim	1 Desa/Kel (4%)	3 Desa/Ke 1 (16%)	6 Desa/ Kel (24 %)	6 Desa/Ke 1 (28%)	6 Desa/Ke 1 (28%)
						2. Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
						3. Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100%	100%	100%	100%	100%



					Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80%	80%	80%	80%	80%
					Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu 2. Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu 3. Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	81,00%	81,25%	81,50%	81,75%	82,00%
							91,50%	91,75%	92,00%	92,25%	92,50%
							100%	100%	100%	100%	100%
3		Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	Persentase perumahan layak huni	100%	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%



					Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	100%	%	%	100% (20)	100% (10)
4		Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	71,00	75,00	80,00	85,00	90,00
						Nilai RB	60	80	83	86	100
					Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



D. Indikator Kinerja utama

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab / Sumber Data	Penjelasan Rumus
1.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	Σ Penghargaan adipura dan adiwiyata yang diperoleh pada tahun n
		2.	Indeks Kualitas Air	Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup, Bidang	$PI_j = \frac{\sqrt{(\frac{C_{ij}^2}{I_{ij}^2 M} + (\frac{C_{ij}^2}{I_{ij}^2 R})}}{2}$
		3.	Indeks Kualitas udara ambient	Tata Lingkungan, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$
		4.	Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	Σ titik jaringan yang terpasang / Σ Luas wilayah permukiman x 100%
		5.	Persentase RTH yang terbangun		Σ RTH yang terbangun / Σ Luas RTH x 100%
2.	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	1	Persentase rumah layak huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Σ rumah layak huni / Σ rumah tidak layak huni di Tala x 100%



E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2021 merupakan gambaran Kinerja tahun 2021. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan target tahunan yaitu tahun ketiga RPJMD. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama.

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2021
IKU KEPALA DINAS			
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)
		Indeks kualitas air	50,5
		Indeks kualitas udara ambient	87,25



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	73,5%
		Persentase RTH yang terbangun	1%
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)
IKU SEKRETARIS			
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	80
		Nilai RB	83
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%
IKU PERENCANAAN			
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 dokumen
3	Melakukan pemenuhan dokumen RB SKPD	Jumlah dokumen area RB yang terpenuhi	8 dokumen
4	Menyusun dokumen IKK	Jumlah dokumen IKK	1 Dokumen
5	Melakukan fasilitasi rapat penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan anggaran	6 Dokumen
IKU KEUANGAN			
1	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 laporan



IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara dan dapat difungsikan	11 Jenis
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	9.879 Surat



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	3 Dokumen
3	Mengadakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan	2 Akun sosial Media (Penyebaran Informasi Publik)
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah data aset yang tercatat	4.669 aset
5	Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey	1 Dokumen
IKU KABID P2KLH			
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	5 Pengaduan (100%)
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (Amdal)
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (UKL-UPL)
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)
IKU KASI PENEGAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	25 Amdal
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	75 UKL-UPL



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	5 Proper
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	5 sanksi administratif
KASI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	20 sekolah
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata	2 sekolah
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	5 Bank Sampah
IKU KASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi
3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring
IKU KABID P3LH			
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,50%
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	92,00%



		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%
IKU KASI KERUSAKAN LINGKUNGAN			
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 dokumen
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik
IKU KASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah aksi bersih sungai	0 kali
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air	2 Dokumen Uji
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient	1 Dokumen Uji
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd
IKU KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN			
1	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	1 Dokumen Uji
2	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	2 Dokumen Uji
3	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha



IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT			
1	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)
2	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%
IKU KASI DATA DAN PERENCANAAN PERKIM			
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 KK
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit
IKU KASI PEMANFAATAN PENGAWASAN PERKIM			
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	1 Dokumen
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah
IKU KABID TATA KOTA DAN KEBERSIHAN			
1	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%
IKU KASI PERTAMANAN DAN RTH			
1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	7 Dokumen
2	Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH
3	Melakukan monitoring	Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen
IKU KASI KEBERSIHAN DAN LIMBAH			



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	38.281,15
2	Melakukan pengolahan sampah di TPA	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	114.000 Ton
3	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	3 pelaku usaha
4	Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	1 Dokumen
5	Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 Kecamatan
6	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	1 Unit (1 Armada Roda 6)
7	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	45 buah sarpras (100%)
IKU KASI PENERANGAN JALAN UMUM			
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	1 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 lokasi rencana pemasangan PJU)
2	Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	10 dokumen
3	Melakukan pemeliharaan PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

4	Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot
IKU KABID TATA LINGKUNGAN			
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	100 % (6 Desa/Kel)
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (1 Kajian LH)
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100 % (1 SKKL, 14 UKL-UPL, 80 SPPL)
IKU KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN			
1	Melakukan Penerbitan SKKL	Jumlah SKKL	1 SKKL
2	Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL	Jumlah Rekomendasi UKL-UPL	18 Rekomendasi UKL-UPL
3	Melakukan Penerbitan SPPL	Jumlah penerbitan izin SPPL	90 SPPL
4	Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH	Jumlah Permohonan yang Diverifikasi	18 Berita Acara Verifikasi Teknis
IKU KASI INVENTARIS RPPLH DAN KLHS			
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen
2	Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen
3	Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	1 Dokumen
4	Melaksanakan uji laboratorium	Jumlah LHU	12 LHU



IKU KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP			
3	Melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen
4	Melaksanakan Penyusunan dokumen Proklamasi	Jumlah Dokumen Proklamasi	1 Dokumen
5	Mendaftarkan desa program kampung iklim	Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi	6 Desa
IKU KEPALA UPT LAB			
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	110 sampel laporan
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	22 jenis
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp.340.000.000
IKU KEPALA TU LAB			
1	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2 jenis



2	Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana LAB	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi sesua standar	2 jenis
3	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis

F. Program dan Kegiatan

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2021, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 12 program, 21 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

Pada tahun anggaran 2021 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 93.061.508.957,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 46.440.983.177,- dan Belanja Modal sebesar Rp 46.970.525.780,-.

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 89,82%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Program dan Kegiatan yang di laksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.4
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran
I	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.004.026,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<u>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</u>	95.000.000,00
			795.075.710,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	715.381.295,00
			16.229.840,00		<u>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</u>	9.101.800,00
			114.726.162,00		<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	113.990.300,00
			38.714.290,00		<u>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</u>	33.763.800,00
			3.738.240		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	1.184.000



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

			392.274.674,0 0		<u>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	339.344.366,00
			233.686.989,0 0	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Pengadaan Mebel</u>	211.240.000,00
			283.216.356,0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	267.097.175,00
			176.419.200,0 0		<u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	90.194.553,00
			26.749.690,00		<u>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	15.100.000,00
			13.690.380,00		<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	13.362.600,00
			919.065.386,0 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</u>	800.130.824
			59.369.691,00		<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	58.180.000,00
			218.194.610		<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	210.972.190,00
II	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

		ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.793.665.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan rumah Tidak Layak Huni	2.793.665.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.311.648.224,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.120.991.940.632.491,200,00
			22.799.928.463,00		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	22.359.255.536.1.683.359.400,00
III	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.806.231.872,00			3.631.246.288,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	232.000.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	224.975.000,00
			144.999.900,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	129.290.000,00
			243.000.000,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	235.611.900,00
IV	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	219.551.548,00	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	205.612.298,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	162.609.786,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	114.245.902,00
			60.561.100,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	88.774.985,00
V	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Tata Lingkungan		614.286.378,00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.733.606,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	108.969.906,00

		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	16.554.400,00	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.318.808,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	213.858.016	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	204.074.435,00



				(RPPLH) Kabupaten/Kota		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	215.085.356,0 0	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.171.685,00
	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Tata Kota dan Kebersihan	45.617.185.67 8,00			42.111.608.028,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.701.024.71 7,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.113.406.798
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.933.521.872 ,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.633.843.443,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.367.883.776	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.880.418.867
			72.577.273		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	40.995.000
			1.542.198.040		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.355.878.778



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.971.146.616	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.666.331.906
--	---	---	---------------	--	--	---------------



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

VIII	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD				
		ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.899.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.247.500,00
			28.351.276,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.754.735,00
			3.178.400,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	797.800,00
			4.678.300,00		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.313.000,00
			3.678.400,00		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.165.000,00
			68.690.992,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.311.350,00
			30.025.600,00		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.852.000,00
			9.934.905.472,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.103.352.574,00
			79.720.578,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,388.953,00



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

			33.670.430,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.814.424,00
			13.049.210,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	4.924.782,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja ketiga RPJMD 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021

Pada tahun Tahun 2020 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada APBD Murni yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 41.482.255.079,00 dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 9.844.221.291, namun dengan adanya pandemik Covid-19 terdapat refocusing anggaran pada Belanja Langsung sehingga terjadi penurunan anggaran pada Belanja Langsung sebesar 23 % menjadi Rp. 31.802.248.724,00. Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 85.99%. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2020, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 30 kegiatan.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 301 orang. Bila dibanding tahun 2019 mengalami penurunan dari jumlah anggaran sebesar 16.46 % sedangkan jumlah SDM tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Pada tahun anggaran 2021 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada APBD Perubahan sebesar RP 93.411.508,957 dengan realisasi sebesar Rp 83.899.461.832 (89,82%) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 83.476.603.485 dengan realisasi sebesar Rp 77.067.908.934 (92%) dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 9.934.905.472 dengan realisasi sebesar Rp 6.831.552.898 (68,76%) Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 89,82%. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2021, ada 15 sasaran strategis dan ada 26 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 12 program dan 21 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.



Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 303 orang .

x

Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
IKU KEPALA DINAS					
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun –n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	-	0%
		Indeks kualitas air	60,77	58,42	96,13%
		Indeks kualitas udara ambient	91,39	91,85	100,50%
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	73,5%	78%	106,12%
		Persentase RTH yang terbangun	1%	2,22%	222%
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%
IKU SEKRETARIS					



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	80	80	100%
		Nilai RB	83	83	100%
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
IKU PERENCANAAN					
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Melakukan pemenuhan dokumen RB SKPD	Jumlah dokumen area RB yang terpenuhi	8 dokumen	8 dokumen	100%
4	Menyusun dokumen IKK	Jumlah dokumen IKK	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Melakukan fasilitasi rapat penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan anggaran	6 dokumen	6 dokumen	100%
IKU KEUANGAN					
1	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 laporan	19 laporan	100%
IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembe- lian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara dan dapat difungsikan Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	13 Jenis 2300 Surat	13 Jenis 9.879 Surat	100% 429%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	-1 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik)	100%
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah data aset yang tercatat	2.515 aset yang tercatat	4.668 aset yang tercatat	185,60%
5	Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey	1 dokumen	1 dokumen	100%
IKU KABID P2KLH					

1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	5 Pengaduan (100%)	6 Pengaduan (120%)	120%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (25 Amdal x 70 % =18 Amdal taat)	24 % (6/25) x 100 % = 24% Amdal taat)	34 %
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (20 % dari 75 UKL-UPL = 15 UKL-UPL taat)	8 % ((6 /75) x 100% = 8 % UKL-UPL taat)	40 %
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (6 bs)	120%

IKU KASI PENEGAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	25 Amdal	25 Amdal	105,00%



	lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	75 UKL-UPL	77 UKL-UPL	102,67%
2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	5 perusahaan yang mengikuti proper	13 perusahaan yang mengikuti proper	260%
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	5 sanksi administratif	6 sanksi administratif	120%
KASI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	20 sekolah	10 sekolah	50%
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata	2 sekolah	2 sekolah	100%
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	5 Bank Sampah	6 Bank Sampah	120%
IKU KASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA					
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan	6 Pengaduan	120%
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi	6 Dokumen Verifikasi	120%
3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi	6 Dokumen Rekomendasi	120%
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	100%
IKU KABID P3LH					
		Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,50%	81,58%	100,10 %



1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	92,00%	92,30%	100,33 %
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%
IKU KASI KERUSAKAN LINGKUNGAN					
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	100%
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik	20 Titik	100%
IKU KASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN					
1	Melaksanakan aksi bersih aliran sungai	Jumlah aksi bersih sungai	1 kali	0	0
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air	2 Dokumen Uji	2 dokumen uji	100%
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	100%
IKU KASI PENCEMARAN LINGKUNGAN					
1	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
2	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	2 Dokumen Uji	2 dokumen uji	100%
3	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100%



IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT					
1	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%
2	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (71 Komplek Perumahan dan Kawasan Permukiman)	100% (71 Komplek Perumahan)	100%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	-	0%
IKU KASI DATA DAN PERENCANAAN PERKIM					
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 Unit	333 Unit	66,60%
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	4.292 Unit	858,4%
IKU KASI PEMANFAATAN PENGAWASAN PERKIM					
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	324 KK	64,8%
2	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	10 KP	142.85 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	10 Komplek Perumahan	142,85 %
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	200 Unit	463 Unit	231,50%
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Komplek Perumahan	6 Komplek Perumahan	85,71%

IKU KABID TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

1	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90,09%	90,09%
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%

IKU KASI PERTAMANAN DAN RTH

1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH	72 RTH	100%
3	Melakukan monitoring	Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

IKU KASI KEBERSIHAN DAN LIMBAH

1	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	38.281,15	38.293,00	100,03%
2	Melakukan pengolahan sampah di TPA	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	114.000 Ton	113.128 Ton	99,2%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	100%
4	Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 Kecamatan	11 Kecamatan	1100%
6	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	1 Unit (1 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	100%
7	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	45 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	100%
IKU KASI PENERANGAN JALAN UMUM					
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	6 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 dan 13 lokasi rencana pemasangan PJU)	6 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 15 dan 13 Lokasi)	100%
2	Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	10 dokumen	6 dokumen	60%
3	Melakukan pemeliharaan PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	100%
4	Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipenuhi sesuai standar	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot	100%
IKU KABID TATA LINGKUNGAN					
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	100% (6 Desa)	83% (5 Desa)	83%



		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100%	100% (3 Dokumen, 1 Laporan)	100%
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100%	109% 138 = 5 SKKL, 24 UKL-UPL, 104 SPPL, 5 BA Verifikasi Teknis)	109%
IKU KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN					
1	Melakukan Penerbitan SKKL	Jumlah SKKL	1 SKKL	5 SKKL	500%
2	Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi UKL-UPL	18 Rekomendasi UKL-UPL	24 Rekomendasi UKL-UPL	133%
3	Melakukan Penerbitan SPPL	Jumlah penerbitan SPPL	90 SPPL	104 SPPL	116%
4	Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH	Jumlah Permohonan Yang Diverifikasi	18 BA Verifikasi Teknis	5 BA Verifikasi Teknis	28%
IKU KASI INVENTARIS RPPLH DAN KLHS					
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	1 dok	-	0%
2	Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Melaksanakan uji laboratorium	Jumlah LHU	12 LHU	11 LHU	92%
IKU KASI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP					
3	Melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca	Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Melaksanakan Penyusunan dokumen Proklamasi	Jumlah Dokumen Proklamasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Mendaftarkan desa program kampung iklim	Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi	6 Desa	5 Desa	83%



IKU KEPALA UPT LAB					
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	110 sampel	1061 sampel	964,54%
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis	11 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	22 jenis	22 jenis	100%
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang	12 orang	100%
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp.340.000.000	Rp343.690.000	101,08%
IKU KEPALA TU LAB					
1	Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB	Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2 jenis	2 jenis	100%
2	Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi sesuai standar	2 jenis	2 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis	5 jenis	100%



1. Sasaran RPJMD

DPRKPLH sebagai SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini DPRKPLH mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Tahun 2021		
			2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (skor)	91,29	91,39	91,85	100,50%
		Indeks Kualitas Air (skor)	60,67	60,77	58,42	96,13%
		Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	72,41 %	25	6	24 %
2	Program Tata Lingkungan	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	75.53%	100	75.53%	75.53%
3	Program Tata Kota dan Kebersihan	Luasan RTH publik kota (Ha)	169,6 Ha	110,5	169,658 Ha	153,48%
		Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	32,39	25	32,39	125%
4	Program Penanganan Perumahan	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	48,70	7	7,11	101,57

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT



	Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	43,60	65	64,80	99,69
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,44	7	5,65	80,75

1.1 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup)

1.1.a Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 1 Indeks Kualitas Udara (skor)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 1 Indeks Kualitas Udara (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan dan Kasi Pemantauan Lingkungan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (sumber: IKLH Indonesia, 2014) .

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan Rumus :

I_{eu} = rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi NO₂ Ref EU).

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂. Kriteria 4 lokasi pengambilan sampel udara ambien yaitu :



a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Industri

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber.

c. Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

d. Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan September. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili, pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkan selama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambien yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan pencapaian indeks 91,85 pada tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021 senilai 91,39 dan melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas udara ditargetkan sebesar 87,75 dan telah melebihi



target RPJMD sebesar 87,50. Sedangkan target IKU tahun 2021 sesuai Perda RPPLH yaitu 91,39.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambien yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambien melalui edaran Bupati melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas udara ambien pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (Kantor Bupati Tanah Laut)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Yani KM 123 Simpang Empat Asam-Asam)
- ✓ Industri (Depan PT. Indofood Tbk)
- ✓ Pemukiman (Depan Mesjid Al Ikhlas Komplek Kijang Mas Permai)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas Udara** adalah



sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil.
2. Untuk pengujian kualitas udara ambien pada tahun 2021 masih belum bisa dilaksanakan di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, sehingga perlu waktu untuk menunggu antrian pengujian di laboratorium yang lain.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak).
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambien.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambien.

1.1.b Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 2 Indeks Kualitas Air (skor)



Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH dan Kasi Pemantauan Lingkungan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Pada tahun 2021 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2021 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2051 adalah 60,77 sedangkan hasil yang dicapai 58,42. Sedangkan berdasarkan Renstra tahun 2018 - 2023 target IKA yang akan dicapai adalah 50,75 untuk tahun 2021. Perubahan target IKA pada Perda RPPLH dikarenakan terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai 7 parameter sedangkan peraturan yang baru memakai 8 parameter sehingga target nilai IKA diperbaiki di Perda RPPLH yaitu 60,77. Dengan demikian indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target tahun 2021.

Tabel Indeks Kualitas Air

No	Tahun	Target	Hasil
1	2020	50,5	60,67
2	2021	60,77	58,42.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh Kasi dibawahnya.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang belum memenuhi baku mutu antara lain :

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk



meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.

- b. Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada 6 lokasi sungai yaitu :

Tabel Indeks Kualitas Air berdasarkan lokasi

No	Lokasi	Hasil	Keterangan
1	Sungai Tabanio	☐ Hulu : Cemar sedang ☐ Hilir : Cemar Ringan	Parameter untuk menghitung nilai IKA : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli
2	Sungai Kintap	☐ Hulu : Cemar ringan ☐ Hilir :	Parameter untuk menghitung nilai IKA : pH, TSS, BOD, COD, DO,



		Cemar Sedang	Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli
3	Sungai Asam-Asam	② Hulu : Cemar ringan ② Hilir : Cemar Ringan	Parameter untuk menghitung nilai IKA : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli
4	Sungai Maluka	② Hulu : Cemar sedang ② Hilir : Cemar Sedang	Parameter untuk menghitung nilai IKA : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli
5	Sungai Sabuhur	② Hulu : Cemar ringan ② Hilir : Cemar Ringan	Parameter untuk menghitung nilai IKA : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli
6	Sungai Swarangan	② Hulu : Cemar	Parameter untuk



		ringan Hilir : Cemar Ringan	menghitung nilai IKA : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli
--	--	--------------------------------------	--

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil.
2. Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama, dalam hal ini untuk parameter yang tidak bisa dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut.
3. Akses menuju lokasi pengambilan sampel cukup sulit.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah..
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air



1.1.c Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 persentase Cakupan pengawasan terhadap AMDAL

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya. Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaatan ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur Bentang tanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan . Didalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan.. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan. Pada tahun 2021 terdapat 121 perusahaan yang aktif yang telah dikeluarkan izin lingkungan / Persetujuan Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : 25 Amdal dan 96 UKL-UPL. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku



usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada saat pelaksanaan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan usaha bertujuan agar pelaku usaha dan/atau kegiatan taat terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal.

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti :
luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) :
persetujuan teknis pembuangan air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), dll

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2021 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan.

Pada tahun 2021 sasaran strategis Kabid P2LH Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten dengan indikator :

Apabila menggunakan regulasi lama :

- Amdal yang diawasi : 25 Amdal
- Taat Amdal : 18 Amdal
- Tidak taat Amdal : 7 Amdal
- prosentase target ketaatan : 70%



- prosentase ketaatan : $(18/25) \times 100\% = 72\%$

Capaian melebihi target

Apabila menggunakan regulasi baru :

- Amdal yang diawasi : 25 Amdal
 - Taat Amdal : 6 Amdal
 - Tidak taat Amdal : 19 Amdal
 - prosentase target ketaat : 70%
 - prosentase capaian ketaatan : $(6/25) \times 100\% = 24\%$
- tidak mencapai target

Capaian tersebut belum mencapai target RPJMD dengan indikator persentase Cakupan pengawasan terhadap AMDAL yang di target % dan hanya tercapai 24 %.

Uraian	2017			2018			2019			2020			2021		
	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20	21	105	15	15	100	15	13	87	20	21	105	25	25	100
Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	20	13	62	15	10	67	15	12	92	20	15	71	70	24	34

Pada tabel diatas di tahun 2021 target pengawasan 25 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal dengan realisasi 25 Amdal atau prosentase capaian sebesar 100%. prosentase pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal sebesar 70 % dengan capaian 24% atau prosentase capaian sebesar 34%.

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2017-2020, rata-rata persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal meningkat namun pada tahun 2021 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal mengalami penurunan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dengan



Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.
2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh : Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan skala amdal yang belum taat.
2. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan



Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.

3. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi.
5. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

1.2 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 2 (Program Tata Lingkungan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Limbah dan Sampah

sasaran RPJMD nomor 2 (Program Tata Lingkungan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Limbah dan Sampah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% namun hanya tercapai sebesar 75,53%

untuk mendukung terlaksananya sasaran RPJMD nomor 2 (Program Tata Lingkungan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu

1. Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 38.281,15 ton terealisasi 38.293,00
2. Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA dengan target 114.000 Ton terealisasi 113.128 dengan capaian kinerja 99,2%, Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha dengan target 3 Pelaku Usaha terealisasi 3 Pelaku Usaha
3. Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat dengan indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang



melakukan pengolahan sampah .

4. Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan dengan target 1 kecamatan terealisasi 11 kecamatan
5. Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 1 Unit (1 Armada Roda 6 terealisasi 1 Unit(1 Armada Roda 6) dengan capaian kinerja 100%,
6. Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 45 buah sarpras Terealisasi 45 buah sarpras

1.3 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 3 (Program Tata Kota dan Kebersihan)

1.3.a Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Tata Kota dan Kebersihan) dengan Indikator 1 Luasan RTH publik kota (Ha)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut : Target RTH yang terbangun sampai dengan 2023 pada Renstra 2018-2023 sebesar 2,3% sehingga pencapaian tahun 2021 sebesar 2,22% (2,22% dari luasan kota 7639,66 Ha sebesar 169,6 Ha) masih belum memenuhi target jangka menengah berdasarkan Renstra namun jika di bandingkan dengan target luasan RTH publik kota pada RPJMD tahun 2023 sebesar 113,75 Ha maka pencapaian kinerja tahun 2021 telah melampaui target RPJMD di tahun 2023. Seiring tumbuhnya perkembangan kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, berekreasi, dan bersosialisasi. Untuk itu perlu dibuat wadah guna memfasilitasi kegiatan tersebut berupa ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biasa. Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Di Kabupaten Tanah Laut, taman menjadi sebuah ikon yang sangat penting dalam perkembangan kota, sebagai daya tarik dan cerminan dari sebuah wilayah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.



Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun** antara lain :

1. Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diperkotaan sulit untuk bisa tercapai.
2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun
3. Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan
6. Masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika hujan.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau
2. Optimalisasi pemberdayaan petugas taman yang ada dilapangan untuk menegur atau mengingatkan apabila ditemukan masyarakat yang merusak fasilitas tersebut
3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.
4. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan

Rencana Aksi :

1. Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan



2. Membuat papan informasi tentang tata tertib aturan untuk menjaga dan melestarikan fasilitas umum RTH yang tersebar
3. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH
4. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
5. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan

1.3.b Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Tata Kota dan Kebersihan) dengan Indikator 1 Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan

Salah satu Kinerja Utama seksi kebersihan dan limbah adalah melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 38.281,15 ton terealisasi 38.293,00 dengan capaian kinerja 100,03% hal ini tentunya selaras dengan target RPJMD persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan yang di targetkan sebesar 25% dan realisasi pada tahun 2021 telah mencapai 32,39%

1.4 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

1.4.a Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 1 persentase Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian



kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pada tahun 2021 indikator RPJMD persentase Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh ditargetkan 7% dan realisasi penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut sebesar 101,57% , peningkatan penataan lingkungan permukiman kumuh ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4.b Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap huni yang layak dan terjangkau

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2021 terealisasi sebesar 64,80% (324 Unit), sampai dengan 2021 telah terealisasi sebanyak 1.481 unit rumah layak huni terbangun, sedangkan target Renstra sampai dengan 2023 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2021 masih belum mencapai target jangka menengah.

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya



rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, pembangunan sarana dasar yang terbatas dan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga dampak yang diharapkan dengan dilaksanakannya peningkatan maupun pembangunan perumahan dan permukiman dapat memberikan rumah yang layak sekaligus sebagai salah satu upaya membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah kebawah dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan. Kegiatan Bantuan Peningkatan Rumah Sederhana pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 ini dilaksanakan sebanyak 324



unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD, APBN Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Rumah Sederhana ini mengacu pada BNBA (By Name By Address)

Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni tidak mencapai target 100% hanya terealisasi 64,80% (324 Unit) dari yang ditargetkan sebanyak 500 unit, hal ini salah satunya dikarenakan belum di setujuinya usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 1001 unit dan usulan Bedah Rumah Tahun di tahun 2021 dari dana Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan, dikarenakan anggaran pusat dialihkan untuk penanganan Covid 19.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni** antara lain :

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan yang
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidk layak huni
3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU
5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia



Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan P'rovinsi untuk mencari potensi anggaran diluar APBD

1.4.c Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 3 Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pada tahun 2021 indikator RPJMD persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ditargetkan 7% dan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi 5,65 % , pengurangan luasan permukiman kumuh ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4.d Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 4 persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana

Di Kabupaten Tanah Laut pada awal tahun 2021 terjadi bencana alam



banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Tim Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pendataan cepat terhadap rumah yang terdampak bencana tersebut. Dari hasil pendataan tersebut Tim Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah rusak ringan, rusak sedang sampai rusak berat dan terakomodir sebanyak 512 rumah korban bencana melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mata anggarannya ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Terhadap pencapaian sasaran strategis nomor 4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021, memang tidak memiliki anggaran dan Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten dan baru akan melakukan penganggaran pada Tahun 2022 melalui Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani



Sedangkan Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun n	² Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	50%	Kepala Dinas
		Indeks kualitas air	60,77	58,42	96,13%	
		Indeks udara ambient	91,39	91,85	100,50%	
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	73,5%	78%	106,12%	
		Persentase RTH yang terbangun	1%	2,22%	222%	
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	43,60% (218 Unit)	43,60%	Sekretaris
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	A	A	100%	
		Nilai RB	81	81,21	100,26%	
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	
5	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	



6	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	5 Pengaduan (100%)	6 Pengaduan (100%)	120%	Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
7	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (70 % dari 25 = 18 taat Amdal)	24% $((6/25) \times 100\% = 24\% \text{ taat Amdal})$	34%	
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20% (20% dari 75 = 15 taat UKL-UPL)	8% $((6/75) \times 100\% = 8\% \text{ taat UKL-UPL})$	40%	
8	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (6 bs)	120%	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
9	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,50%	81,58%	100,10 %	
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	92,00%	92,30%	100,33 %	
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%	



10	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	64,80% (218 Unit)	64,80%	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (71 Komplek Perumahan dan kawasan permukiman)	100% ((71 Komplek Perumahan dan kawasan permukiman))	100%	
12	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	-	-	
13	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%	Kabid. Tata Kota dan Kebersihan
14	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (27 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%	
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90.09%	90,09%	
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%	
15	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	100% (6 Desa)	83% (5 Desa)	83%	Kabid. Tata Lingkungan
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100%	100% (3 Dokumen, 1 Laporan)	100%	
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100%	109% 138 = 5 SKKL, 24 UKL-UPL, 104 SPPL, 5 BA Verifikasi Teknis)	109%	



2. Eselon II (Kepala Dinas)

Untuk menggambarkan realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini. Analisa capaian 15 sasaran strategis dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis Kepala Dinas yang diukur melalui 6 (enam) indikator, sasaran strategis nomor 1 dan 2 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

Target dan realisasi Sasaran strategis dan indikator Kinerja Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Indikator 1 Penghargaan kebersihan pada tahun n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	-	0%
		Indikator 2 Indeks kualitas air	60,77	58,42	96,13%
		Indikator 3 Indeks udara ambient	91,39	91,85	100,50%
		Indikator 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	73,5%	78%	106,12%
		Indikator 5 Persentase RTH yang terbangun	1%	2,22%	222 %
2.	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Indikator 6 Persentase rumah layak huni	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%



**Tabel Perbandingan Kinerja Kepala Dinas 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun
Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	1 Penghargaan (Adiwiyata)	2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata)	-	0%
		Indeks kualitas air	50	51	50	60,67	60,77	58,42	96,13 %
		Indeks kualitas udara ambient	95,81	90,88	90,68	91,29	91,39	91,85	100,50 %
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	50%	60%	70%	75%	73,5%	78%	106,12 %
		Persentase RTH yang terbangun	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	1 %	2,22%	222%
2	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	-	63,6% (318 Unit)	124,2% (621 Unit)	43,60% (218 Unit)	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%



2.1 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja **Sasaran Strategis nomor 1 meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan** sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan dan analisa pencapaian sasaran strategis dengan tiap indikator kinerja utama akan di jelaskan di bawah ini

2.1.a Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan ,Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

a. Penghargaan Adipura

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment Governance).

Penilaian Adipura di Tanah Laut sejak tahun 2012 terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen



masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan, kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan, agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk menuju lingkungan yang baik agar penghargaan Adipura tercapai . meskipun penghargaan adipura tidak dilaksanakn di tahun 2021 DPRKPLH tetap melakukan upaya untuk pencapaian lingkungan yang bersih, diantaranya :

- Melakukan pembinaan Bank Sampah setiap Kecamatan
- Melakukan pembinaan masyarakat agar lebih sadar lingkungan
- Inovasi pengolahan sampah berupa pengolahan sampah menjadi pupuk padat menjadi pupuk organik cair selain itu melakukan inovasi berupa olah limbah industri menjadi pakan ternak
- Penambahan armada untuk pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir dari hadiah provinsi sebanyak 1 unit

Tabel Penghargaan Penghargaan Adipura
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2021)

No	SKPD	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Kantor Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2012
2	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2013
3	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2014



4	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	KLHK	2017
5	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	KLHK	2018
6	DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut	Piala Adipura	Provinsi	2019
7	KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19			2020
8	KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19			2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pada Renstra 2018-2023 sampai dengan 2023 DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut mentargetkan menerima penghargaan Adipura di setiap tahunnya namun pada tahun 2020 dan 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19 sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai .

Dalam upaya memperoleh penghargaan adipura didukung oleh 27 orang petugas pertamanan (PTT), 10 orang Pranata Taman (PNS), 134 petugas kebersihan (PTT), 11 orang Pramu Kebersihan (PNS), dan 30 orang petugas PJU (PTT) dan 2 orang Pemelihara Penerangan Jalan Umum (PNS) yang tersebar di beberapa kecamatan, selain kegiatan yang dilakukan oleh petugas kebersihan DPRKPLH juga melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan peran serta masyarakat, pembuatan bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan yang di dukung oleh 4 Orang SDM. Sedangkan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut sebesar **RP 20 427.133.973 yaitu :**

- kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebesar Rp 219.551.548,00
- Penerangan Jalan Umum sebesar Rp 12.041.655.800,00
- Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Sebesar Rp 1.217.480.000,00
- Kebersihan dan Limbah sebesar Rp 7.063.848.173,00

b. Penghargaan Adiwiyata



Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya memperoleh penghargaan adiwiyata DPRKPLH didukung oleh 4 SDM yang terdiri dari Kabid P2LH, Kasi Peningkatan Kapasitas LH, 1 orang staf pelaksana (Pengelola Lingkungan) dan 1 orang PTT. Sedangkan anggaran yang untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp 63.028.006,00.

Berikut data perolehan Penghargaan Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2012-2021



Tabel Penghargaan Penghargaan Adiwiyata
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2021)

No	Penerima Adiwiyata	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SDN Atu Atu	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2015
2	SMK-PP Tanah Laut	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2017
3	SMAN 1 Jorong	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
4	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
5	SMPN 2 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
6	SMPN 7 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
7	SMPN 2 Bati - Bati	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
8	SMPN 1 Bati - Bati	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
9	SMPN 2 Panyipatan	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
10	SDN Angsau 3	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
11	SMPN 1 Jorong	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2017
12	SDN Pabahanan	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
13	SDN Angsau 4	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017



14	SMPN 1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
15	SMAN 1 Jorong	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
16	SMKN 1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
17	SMP1 Batu Ampar	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
18	SMP 5 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
19	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
20	SMAN 1 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2021

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga mengharuskan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran secara Daring. hal ini menjadikan kesulitan pada pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n** adalah sebagai berikut :

1. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan.
2. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai
3. Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan untuk posisi teknis PJU lapangan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU
5. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terkait



pentingnya kebersihan lingkungan

6. Wilayah area kerja yang luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
7. masih kurang maksimalnya koordinasi antar SKPD dalam hal pembinaan sekolah adiwiyata.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak BKPSDM dalam permohonan penambahan tenaga PNS maupun PTT
2. Optimalisasi koordinasi dengan pihak Bappeda dan BPKAD dalam upaya pemenuhan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU
3. Lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan.
4. Koordinasi akan lebih ditingkatkan dengan SKPD terkait, baik itu dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Kesehatan sampai dengan kecamatan.

2.1.b Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :



Pada tahun 2021 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2021 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2051 adalah 60,77 sedangkan hasil yang dicapai 58,42. Sedangkan berdasarkan Renstra tahun 2018 - 2023 target IKA yang akan dicapai adalah 50,75 untuk tahun 2021. Perubahan target IKA pada Perda RPPLH dikarenakan terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai 7 parameter sedangkan peraturan yang baru memakai 8 parameter sehingga target nilai IKA diperbaiki di Perda RPPLH yaitu 60,77. Dengan demikian indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target tahun 2021.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh Kasi dibawahnya. Anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 243.000.000,00

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air dan udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan



Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 diperoleh dari hasil



pemantauan kualitas air sungai pada 6 lokasi sungai yaitu :

- ✓ Sungai Tabunio
- ✓ Sungai Kintap
- ✓ Sungai Asam-Asam
- ✓ Sungai Maluka
- ✓ Sungai Sabuhur
- ✓ Sungai Swarangan



Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Index Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimanajika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil
2. Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama, dalam hal ini untuk parameter yang tidak bias dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut.
3. Akses menuju lokasi pengambilan sampel cukup sulit

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendalayang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Rencana aksi yang dilakukan:

- Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air

2.1.c Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja



Utama 3 Indeks kualitas udara ambient

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks kualitas udara ambient sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*) .

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan Rumus :

I_{eu} = rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi NO₂ Ref EU).

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter SO₂ dan NO₂.

Kriteria 4 lokasi pengambilan sample udara ambient

a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Industri



Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber

c. Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

d. Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan september. Pemasangan Alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler dilakukan pada 4 lokasi mewakili ,pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkanselama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan pencapaian indeks 91,85 pada tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021 senilai 91,39 dan melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas air ditargetkan sebesar 87,75 dan telah melebihi target RPJMD sebesar 87,50. Sedangkan target IKU tahun 2021 sesuai Perda RPPLH yaitu 91,39.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambient melalui edaran Bupati.melalui edaran Bupati yang disampaikan ke



masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.

- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.
- a. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun..
Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (Kantor Bupati Tanah Laut)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Yani KM 123 Simpang Empat Asam-Asam)
- ✓ Industri (Depan PT. Indofood Tbk)
- ✓ Pemukiman (Depan Mesjid Al Ikhlas Komplek Kijang Mas Permai)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Index Kualitas Udara** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil
2. Antrian Untuk pengujian kualitas udara ambien pada tahun 2021 masih belum bisa dilaksanakan di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, sehingga perlu waktu untuk menunggu antrian pengujian di laboratorium yang lain.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola



kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak)
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambient

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambient

2.1.d Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman tahun 2017 terealisasi sebesar 50%, tahun 2018 , 60% tahun 2019 , terealisasi sebesar 70% ,tahun 2020 terealisasi sebesar 75% dan pada tahun 2021 memiliki kenaikan menjadi 78%. Target sampai dengan 2023 pada Renstra 2018-2023 penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sebesar 80% sehingga pencapaian tahun 2021 sebesar 78% masih belum memenuhi target jangka menengah

Seiring meningkatnya perkembangan pemukiman, semakin meningkat pula keinginan untuk pemasangan penerangan/ lampu jalan umum, sesuai dengan permintaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Salah satu dampak yang ditimbulkan jika tidak terpasangnya penerangan jalan umum adalah meningkatnya terjadinya kecelakaan di jalan dan tindak kriminal. Untuk itu perlu adanya



penerangan jalan umum untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum ini memiliki sasaran pada aspek :

- Meningkatnya penerangan jalan umum untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut
- Dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum maka perlunya pemeliharaan yang telah terpasang oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman** antara lain :

- 1) Masih ada beberapa permukiman yang belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN dan masih merupakan jaringan swadaya masyarakat setempat, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemasangan jaringan PJU
- 2) Antara pemukiman satu dengan lainnya berjauhan sehingga membutuhkan material dan kebutuhan biaya yang banyak untuk menyambungkan jaringan PJU yang ada.
- 3) Masih terbatasnya anggaran sehingga banyak permintaan pemasangan jaringan PJU dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi.
- 4) Masih terbatasnya petugas dan sarana pendukung operasional pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, mengakibatkan sering terlambatnya perbaikan dan pelayanan bagi masyarakat (jumlah sarana prasana dan petugas operasional tidak sebanding dengan jumlah titik lampu yang dipelihara).

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jaringan listrik yaitu PLN dalam hal penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat secara merata.
- 2) Perencanaan ulang mengenai pemasangan jaringan PJU, sehingga penyebaran PJU bisa merata dinikmati oleh masyarakat, salah satunya dengan pembagian jaringan dengan meterisasi.



- 3) Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya pemenuhan anggaran untuk pemerataan pemasangan jaringan PJU berdasarkan usulan masyarakat yang masuk.
- 4) Perlunya penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional PJU.

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Penyusunan Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak PLN dalam hal pemasangan, pemeliharaan dan pemerataan jaringan listrik bagi masyarakat.
3. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

2.1.e Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Target RTH yang terbangun sampai dengan 2023 pada Renstra 2018-2023 sebesar 2,3% sehingga pencapaian tahun 2021 sebesar 2,25% (2,25% dari luasan kota 7639,66 Ha sebesar 169,6 Ha) masih belum memenuhi target jangka menengah berdasarkan Renstra namun jika di bandingkan dengan target luasan RTH publik kota pada RPJMD tahun 2023 sebesar 113,75 Ha maka pencapaian kinerja tahun 2021 telah melampaui target RPJMD di tahun 2023. Seiring tumbuhnya perkembangan kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, berekreasi, dan bersosialisasi. Untuk itu perlu dibuat wadah guna memfasilitasi kegiatan tersebut berupa ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biasa. Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Di Kabupaten Tanah Laut, taman menjadi sebuah ikon yang sangat penting dalam perkembangan kota, sebagai daya



tarik dan cerminan dari sebuah wilayah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun** antara lain :

1. Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diperkotaan sulit untuk bisa tercapai.
2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun
3. Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan
6. Masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika hujan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau
2. Optimalisasi pemberdayaan petugas taman yang ada dilapangan untuk menegur atau mengingatkan apabila ditemukan masyarakat yang merusak fasilitas tersebut
3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.



4. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan

Rencana Aksi :

1. Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan
2. Membuat papan informasi tentang tata tertib aturan untuk menjaga dan melestarikan fasilitas umum RTH yang tersebar
3. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH
4. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
5. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan

2.2 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 2

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2021 terealisasi sebesar 64,80% (218 Unit), sampai dengan 2021 telah terealisasi sebanyak 1.481 unit rumah layak huni terbangun, sedangkan target Renstra sampai dengan 2023 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2021 masih belum mencapai target jangka menengah.

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah



setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah kebawah dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan.

Kegiatan Bantuan Peningkatan Rumah Sederhana pada Bidang Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 ini dilaksanakan sebanyak 218 unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD, APBN Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Rumah Sederhana ini mengacu pada BNBA (By Name By Address)

Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni tidak mencapai target 100% hanya terealisasi 64,80% (324 Unit) dari yang ditargetkan sebanyak 500 unit, hal ini salah satunya dikarenakan belum disetujuinya usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 1001 unit dan usulan Bedah Rumah Tahun di tahun 2021 dari dana Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan, dikarenakan anggaran pusat dialihkan untuk penanganan Covid 19. Anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini berasal dari APBD Murni sebesar Rp 2.793.665.000,00 dan dana DAK sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dengan SDM sebanyak 11 orang

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni** antara lain :

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan yang
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidak layak huni



3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU
5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan P'rovinsi untuk mencari potensi anggaran diluar APBD

3. Eselon III (Sekretaris/ Kepala Bidang)

3.a Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.7.069.267.092,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.415.039.423,00 atau 90,75%
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.45.924,700,00 dan terealisasi sebesar Rp 40.105.800,00 atau 87.33%
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media dengan 1 (satu) kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.935.000,00 atau 99.57%



Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 20 orang.

Sedangkan Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.5.890.157.169,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.834.314,726,00 atau 99.05%
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan Kualitas SUMBER Daya Manusia dengan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.686.172,397,00 dan terealisasi sebesar Rp 534.356.565,00 atau 77.87%
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.19.995.600,00 pada APBD murni namun dilakukan refocusing pada APBD Perubahan menjadi Rp0,00 karena adanya wabah covid-19, sehingga kegiatan yang melibatkan atau mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak dihindari.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 20 orang dengan anggaran pada APBD murni 2021 sebesar Rp. 7.692.742.280,00 namun karena adanya wabah covid-19 terjadi refocusing anggaran menjadi Rp 6.726.008.376 , sehingga terjadi penurunan anggaran sebesar 13% dari APBD murni, namun dengan adanya penurunan anggaran tetap dapat melaksanakan pencapaian indikator disekretariat dengan capaian rata-rata 100% .Bila dibanding tahun 2019 mengalami penurunan dari jumlah anggaran sebesar 7.77% sedangkan jumlah SDM Kesekretariatan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Indikator 7 Nilai SAKIP SKPD	80 (A)	80 (A)	100, %



		Nilai RB	83	83	100%
2.	Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Indikator 8 Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100,26%
3.	Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Indikator 9 Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Sekretaris 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	-	62,76	71,9	80,70	80	80	100%
		Nilai RB	-	-	29,73	81,21	83	83	100%
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.a.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 3

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Indikator 7 Nilai SAKIP SKPD	80 (A)	A	100%



		Nilai RB	83	83	100%
--	--	----------	----	----	------

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya yaitu 2018 – 2019 telah mengalami peningkatan di 2018 nilai sakip 62,76 dan di tahun 2019 nilai sakip 71,9 . Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatnya kualitas Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan indikator sasaran Nilai SAKIP SKPD capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 3 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 3 dengan Indikator Kinerja Utama** Nilai SAKIP SKPD antara lain :

1. Pengarsipan data-data pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya belum tertib
 2. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan penempatan
- Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi tata cara pengarsipan data
 2. Optimalisasi monitoring capaian kinerja dan realisasi kegiatan
 3. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan SDM di perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tupoksi masing-masing

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan bimtek/pelatihan tata cara pengarsipan data yang baik dan benar.
2. Mengikutsertakan SDM untuk mengikuti sosialisasi/bimtek/workshop sesuai tupoksi penempatan dan tupoksi masing-masing.



3.a.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Indikator 8 Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2019 rata-rata mencapai 100%. Pada tahun 2021 Sasaran



strategis Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor dengan indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021, dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 4 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar antara lain :

1. Keterbatasan SDM berstatus PNS
2. Banyaknya Jumlah Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Luasan wilayah penyebaran Barang Milik Daerah menghambat optimalisasi monitoring Aset secara
4. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana transportasi kedinasan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
2. Membuat matrik rencana monitoring Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Optimalisasi anggaran dan sarana transportasi yang telah ada

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan anggaran



3. Mengajukan usulan permohonan penambahan kendaraan dinas.

3.a.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.	Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Indikator 9 Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2019 rata-rata telah mencapai 100% . Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan indikator sasaran terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dilaksanakan melalui Program/kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
- Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
- Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 5 dengan Indikator Kinerja Utama terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu antara lain :

- Keterbatasan SDM berstatus PNS



Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.

Kasubbag Keuangan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 3 ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Kasubbag Keuangan, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasubbag keuangan didukung 6 orang SDM yang terdiri dari 3 orang PNS dan 3 orang PTT. Bila dibanding tahun 2020 jumlah SDM Subbag Keuangan hanya didukung 5 orang yang terdiri dari 2 orang PNS dan 3 orang PTT mengalami peningkatan.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Kasubbag Keuangan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Menyusun laporan keuangan SKPD	Indikator Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 Laporan	19 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasubbag Keuangan 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	100%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasubbag Keuangan

Keg	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
Penyusunan laporan keuangan	Rp 10.061.345.690	Rp 1.304.693.481	Rp 2.094.493.739	Rp 1.592.850.997	Rp 1.949.826.740	69

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan yang telah dilaksanakan

Jika dilihat perbandingan kinerja Kasubbag Keuangan tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2021 rata-rata telah tercapai 100%, sedangkan Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan tahun 2021 yaitu Kinerja Utama menyusun laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun) dengan indikator kinerja jumlah laporan keuangan yang disusun dengan target 19 laporan (1 laporan keuangan akhir tahun, 12 laporan bulanan kinerja keuangan dan laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran, 4 laporan triwulanan, 2 laporan keuangan semesteran prognosis) telah tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Keuangan telah terpenuhi 100%.

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Pada tahun 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasubbag Keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan 19 (Sembilan belas) laporan keuangan (1 laporan keuangan akhir tahun, 12 laporan bulanan kinerja keuangan dan laporan keuangan bulanan Bendahara Pengeluaran, 4 laporan triwulanan, 2 laporan keuangan semesteran prognosis) Sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 19 laporan dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.061.345.690.



dengan realisasi sebesar Rp 6.941.864.957 atau capaian sebesar 69%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena belanja cetak laporan keuangan tahunan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu Kasubbag Keuangan juga melaksanakan pelayanan administrasi keuangan atau dalam rangka pelayanan penatausahaan keuangan dilingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan administrasi keuangan GU (BL), BTL LS, Gaji/Tunjangan, IWP, BPJS, JKK dan JKM

2. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Kasubbag Keuangan telah melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dengan lancar 2021 serta dapat menyelesaikan 19 laporan keuangan tepat waktu atau dengan capaian kinerja 100%





Foto Dokumen laporan keuangan

Kasubbag Perencanaan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 3 ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja



Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasubbag Perencanaan, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasubbag Perencanaan didukung 4 orang SDM yang terdiri dari 1 orang PNS dan 3 orang PTT. Bila dibanding tahun 2020 jumlah SDM Subbag Perencanaan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Indikator Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.	Sasaran Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Indikator Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Melakukan pemenuhan dokumen RB SKPD	Jumlah dokumen area RB yang terpenuhi	8 dokumen	8 dokumen	100%
4	Menyusun dokumen IKK	Jumlah dokumen IKK	1 Dokumen	1 dokumen	100%
5	Melakukan fasilitasi rapat penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan anggaran	6 Dokumen	6 dokumen	100%



**Tabel Perbandingan Kinerja Kasubbag Perencanaan 2021
dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Melakukan pemenuhan dokumen RB SKPD	Jumlah dokumen area RB yang terpenuhi	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
4	Menyusun dokumen IKK	Jumlah dokumen IKK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%
5	Melakukan fasilitasi rapat penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasubbag Perencanaan

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Rp 39.886.376	Rp 1.915.098	Rp 12.776.692	Rp 5.745.294	Rp 11.593.451	80.30
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Rp 112.590.692	Rp 3.830.196	Rp 34.580.284	Rp 19.006.088	Rp 29.142.282	76,88

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dilaksanakan

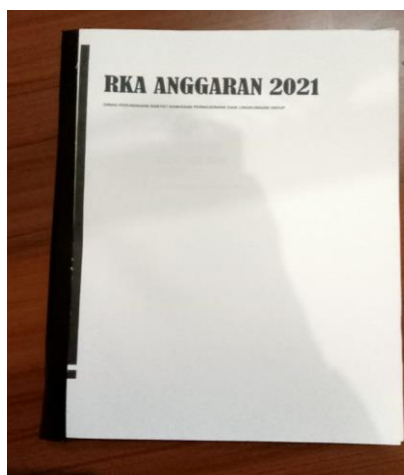
Jika dilihat perbandingan kinerja Kasubbag Perencanaan tahun 2021 dengan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT

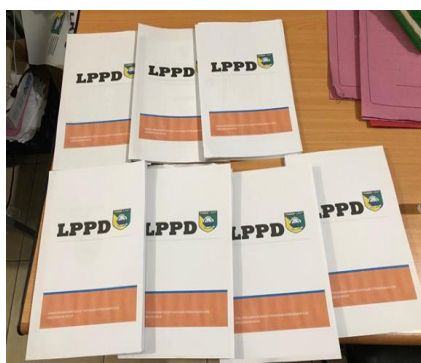


capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2020 rata-rata telah tercapai 100%, Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP) dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen perencanaan dengan (RKA, RKAP, DPA, DPAP) target 4 dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP) telah tercapai 100%.



2. Kinerja Utama Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP) dengan indikator kinerja Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP target 3 dokumen (LPPD, LKPJ, LAKIP) telah tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.



3. Kinerja Utama Melakukan pemenuhan dokumen RB SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen area RB yang terpenuhi telah terealisasi 8 dokumen area RB tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.
4. Kinerja Utama Menyusun dokumen IKK dengan indikator kinerja Jumlah dokumen IKK telah terealisasi 1 dokumen IKK tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.
5. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi rapat penyusunan anggaran SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan anggaran telah terealisasi 3 dokumen fasilitasi penyusunan anggaran tercapai 100%. Sehingga dengan demikian perjanjian kinerja Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.
6. Kinerja utama melakukan kegiatan pameran dengan indikator jumlah kegiatan pameran dan telah terealisasi 1 kegiatan pameran *Orchid show* , 1 target tidak terealisasi 100% dikarenakan covid sehingga pameran pembangunan tidak dilaksanakan.



Foto kegiatan Natural Borneo Orchid Show 2021

Analisis Pencapaian Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan



1. Pada tahun 2021 telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka penyusunan 4 dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP) sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 39.886.376 dengan realisasi sebesar Rp 32.030.535 atau capaian sebesar 80%, terdapat pada sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

2. Sisa pagu yang tidak terealisasi karena belanja cetak dokumen disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2021 telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka penyusunan 3 dokumen yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP dan penyusunan 8 dokumen area RB dan 1 dokumen IKK sehingga secara pencapaian dokumen telah terealisasi 12 dokumen dengan capaian 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 112.590.692 dengan realisasi sebesar Rp 86.558.850 atau capaian sebesar 77%, terdapat pada sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sisa pagu yang tidak terealisasi karena belanja cetak dokumen disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Kegiatan Pameran dengan 2 kegiatan pameran dengan pagu sebesar Rp 30.025.600 ,realisasi sebesar Rp 7.852.000 dengan capaian 26,15% telah dilaksanakan 1 kegiatan pameran orchid show sedangkan pameran pembangunan tidak dilaksanakan dikarenakan covid-19 jadi sub kegiatan ini hanya tercapai 50%
4. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Perencanaan telah melaksanakan



kegiatan serta dapat menyelesaikan target yang ditentukan atau dengan capaian kinerja 100%

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 4 ini dilaksanakan melalui Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor](#) dengan Pagu anggaran Rp. 795.075.710 dengan Realisasi 715.381.295
- [Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya](#) dengan Pagu 919.065.386
- [Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya](#) dengan Pagu Anggaran 59.369.691 dengan Realisasi 58.180.000
- [Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan](#) dengan Pagu Anggaran 218.194.610 dengan Realisasi 210.972.190
- [Pengadaan Mebel](#) dengan Pagu Anggaran 233.686.989 dengan realisasi 211.240.000

Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran strategis Skretaris DPRKPLH nomor 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasubbag umum dan Kepegawaian , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasubbag keuangan didukung 13 orang SDM yang terdiri dari 2 orang PNS Seketariat dari 2 orang PNS dari Bidang Tata Kota yang diperbantukan sebagai Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu DPRKLH dan 9 orang PTT yang di tugaskan untuk petugas keamanan sebanyak 1 orang, petugas kebersihan kantor sebanyak 2 orang, 4 orang yang di tugaskan untuk membantu penatausahaan aset, 2 orang di umum Bila dibanding tahun 2020 jumlah SDM Subbag Umum dan Kepegawaian tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 5 ini dilaksanakan melalui Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota deng sub kegiatan :

- [Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi](#) degan Pagu Anggaran 95.004.026 dengan realisasi 95.000.000
- [Penyediaan Peralatan Rumah Tangga](#) dengan apagu anggaran 16.229.840 dengan realisasi 9.101.800



- [Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan](#) dengan pagu anggaran 38.714.290 dengan realisasi 33.763.800
- [Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD](#) dengan pagu anggaran 392.274.674 dengan realisasi 339.344.366

Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran strategis Sekretaris DPRKPLH nomor 5 Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasubbag umum dan Kepegawaian , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasubbag umum dan Kepegawaian didukung 3 orang SDM yang terdiri dari 1 orang PNS dan 2 orang PTT , Bila dibanding tahun 2020 jumlah SDM Subbag Umpeg tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

N o	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Targe t	Realisa si	Persenta se Capaian
1	Sasaran Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Indikator Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang Dipelihara dan difungsikan	13 Jenis	13 Jenis	100%
		Indikator Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2300 surat	9.879 Surat	429%
	Sasaran	Indikator			



2.	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	3 dok	3 dok	100%
3.	Sasaran Mengadakan penyebaran informasi pembangun daerah	Indikator Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi pembangunan	2 kali pameran	1 kali pameran dan 2 akun media sosial	0
4.	Sasaran Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Indikator Jumlah data aset yang tercatat	2.515 aset yang tercatat	4.668 aset yang tercatat	185,61%
5	Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk melihat pencapaian kinerja Kasubag Umum dan kepegawaian dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :



1. Sasaran RPJMD

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel Perbandingan Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2021 dengan Capaian Tahun-
Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang Dipelihara dan difungsikan	15 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	2351 Surat	2088 Surat	3100 Surat	2300 Surat	9.879 Surat	429%%
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah data administrasi kepegawaian yang tertib	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
3	Mengadakan penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi pembangunan	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	2 kali pameran (teknologi tepat guna)	-	1 kali pameran dan 2 media sosial
4	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah data aset yang tercatat	1999 aset yang tercatat	2312 aset yang tercatat	2.515 aset yang tercatat	2.515 aset yang tercatat	4.668 aset yang tercatat	185,61 %
5	Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey	-	-	-	-	1 dokumen	100%



3.b Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp 1.084.501.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 731.974.700,00 atau 69,15 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sebanyak 12 orang.

Sedangkan Tahun 2021 Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 3 Program dan Kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.557.744.030 dengan realisasi Program Rp. 450.059.637 (80,69%) Untuk mencapai Program dan kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sebanyak 12 orang terdiri 1 orang Kabid 3 orang kasi dan 2 staf administrasi dan 6 staf teknis.

.PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN TAHUN 2021

N o	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGA	Realisa si	Persenta se
--------	---------	-----------------	---------------	---------------	----------------

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT



			RAN		Capaian
1.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota	115.021.596	96.491.668	77,18
2.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PENGAWASAN Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	162.609.786	114.249.636	70,26
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	60.561.100	33.708.308	55,66
3.	Pengelolaan Perusahaan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	219.551.548	205.610.025	93,65

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

**Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 6 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Indikator 10 Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	5 Pengaduan (100%)	6 Pengaduan (100%)	120%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT



		yang ditindak lanjuti			
2	Sasaran 7 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten	Indikator 11 Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70% (70% dari 25 = 18 taat Amdal)	24% (6/25 x 100% = 24% taat Amdal)	34%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL- UPL	20% (20% dari 75 = 15 taat UKL-UPL)	20% (6/75) x 100% = 8% taat UKL- UPL)	40%
3	Sasaran 8 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Indikator 12 Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	120% (6 bs)	120%

Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH 2021

dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	6 Pengaduan (100%)	4 Pengaduan (100%)	5 Pengaduan (100%)	8 Pengaduan (100%)	5 Pengaduan (100%)	6 Pengaduan (120%)	120%
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	62% (13 Pelaku Usaha)	67% (10 Pelaku Usaha)	92% (12 Pelaku Usaha)	71% (15 Pelaku Usaha)	70% (70% dari 25 = 18 Taata Amdal)	24% (6/25) x 100% = 24% taat Amdal)	34%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati	13% (6 Pelaku Usaha UKL- UPL)	10% (6 Pelaku Usaha UKL- UPL)	12,5% (10 Pelaku Usaha UKL- UPL)	20% (12 Pelaku Usaha UKL- UPL)	20% (20% dari 75 = 15 taat UKL- UPL)	8% (6/75) x 100% = 8% taat UKL- UPL)	40%



		dokumentasi UKL-UPL							
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	40% (2 bs)	220% (11 bs)	200% (10 bs)	100% (5 bs)	100 % (5 bs)	120% (6 bs)	120%

3.a.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 6

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran 6 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Indikator 10 Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	5 Pengaduan (100%)	6 Pengaduan (120%)	120%

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Kabid P2LH tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2020 rata-rata Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti mencapai 100% .

Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator sasaran Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kabid P2LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Pengaduan Lingkungan Hidup Pengaduan Lingkungan merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak kondisi lingkungan yang diterima masyarakat. Dampak lingkungan adalah ketidak Harmonisan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga memberikan ketidaknyamanan kehidupan baik terhadap sistem alam maupun kepada



kenyamanan hidup manusia.

Di Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas lingkungan merupakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat dibidang lingkungan. Lingkup kerjanya adalah Keterlibatan Pemerintah, swasta, dan peran masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan lingkungan untuk mengatur jalannya kegiatan usaha. Pihak swasta melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan masyarakat diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan berupa peluang kerja dll. Namun dalam perjalanan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan lingkungan maka akan terjadi dampak yang memberi respon lingkungan. Dampak lingkungan yang ada di masyarakat akan muncul pengaduan masyarakat sebagai respon gangguan lingkungan yang terjadi. Pengaduan masyarakat wajib difasilitasi dengan pengelolaan pengaduan dengan tujuan didapatkan solusi penanganan lingkungan atau penegakan hukum bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2021 terdapat 6 kasus lingkungan yang muncul dan difasilitasi untuk ditangani. Kasus terbanyak berkenaan dengan dugaan pencemaran air akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit sebanyak 3 kasus, kemudian dugaan pencemaran air limbah akibat kegiatan pertambangan batu bara sebanyak 1 kasus dan dugaan pencemaran air limbah kegiatan rumah makan sebanyak 1 kasus. Kemudian kasus lain adalah kasus sengketa lingkungan hidup berupa keberatan warga terhadap rencana dibangun kegiatan peternakan ayam yang dikhawatirkan akan berdampak pada kebauan dan pencemaran lingkungan sebanyak 1 kasus, namun sudah terselesaikan dengan musyawarah warga dan pengusaha. Kasus industri biasanya diselesaikan dengan perbaikan terhadap instalasi pengelolaan lingkungan. Dan Kasus perkebunan yang diadakan masyarakat berkenaan dengan pencemaran sungai. Penanganan kasus dilakukan langkah pembinaan terhadap kegiatan usaha dalam optimalisasi pengelolaan lingkungan serta diberi teguran atau peringatan untuk tetap meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan. Dan melaksanakan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat.

Pengaduan yang disampaikan masyarakat berkenaan dengan dampak lingkungan, seperti gangguan pencemaran udara, air, dan cemar limbah yang biasanya ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Secara SOP pengaduan yang masuk wajib dikelola ditangani dengan memberikan mediasi penyelesaian permasalahan yang muncul di masyarakat. Jumlah pengaduan yang muncul berbanding terbalik dengan peningkatan pengawasan lingkungan terhadap semua kegiatan usaha, semakin taat kegiatan usaha dalam pengelolaan



lingkungan semakin kecil potensi dampak lingkungan yang muncul.

Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang berbunyi :

“ Tahapan Pengelolaan Pengaduan terdiri atas :

- a. Penerimaan;
- b. Penelaahan;
- c. Verifikasi;
- d. Perumusan laporan hasil; dan
- e. Tindak lanjut hasil pengaduan.



a. Penerimaan Pengaduan

Langkah-langkah dalam penerimaan pengaduan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Registrasi/penomoran/kodefikasi

Setiap aduan yang masuk ke Pos Pengaduan Lingkungan Hidup akan dicatat dalam buku register pengaduan dan dibuatkan berita acara penerimaan pengaduan. pemberitahuan pengaduan diregistrasi.

2. Tanda terima

Sebagai bukti tanda terima bahwa pengaduan sudah masuk dalam registrasi pengaduan pada pos pengaduan lingkungan hidup maka dibuatkan surat pemberitahuan pengaduan diregistrasi.

b. Penelaahan

Pengaduan yang diregistrasi akan ditelaah untuk selanjutnya diklasifikasikan menjadi :

1. pengaduan lingkungan hidup

pengaduan yang diklasifikasikan sebagai pengaduan lingkungan tetapi bukan merupakan kewenangan DPRKPLH maka pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan

2. Pengaduan non lingkungan hidup.

Dalam hal pengaduan yang diklasifikasikan sebagai pengaduan non lingkungan hidup maka DPRKPLH akan meneruskan pengaduan yang diterima kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan.

c. Verifikasi

1. Pelaksana verifikasi

Verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) kabupaten Tanah Laut, apabila tidak ada PPLHD di Kabupaten Tanah Laut maka verifikasi dilaksanakan oleh PPLHD di Provinsi Kalimantan Selatan atau oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dapat berkoordinasi dengan PPLHD Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau PPLHD Kabupaten Tanah Laut. PPLHD provinsi Kalimantan Selatan dapat berkoordinasi dengan PPLHD



Kabupaten Tanah Laut.

2. Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi dapat berupa data, fakta dan temuan yang :

- a. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan izin
- b. Melakukan pelanggaran (rekomendasi)
 - Sanksi Administratif;
 - Penyelesaian Sengketa (Perdata); atau
 - Dilakukan penyidikan (pidana)

d. Perumusan Laporan Hasil

Hasil kegiatan verifikasi dituangkan dalam Berita Acara verifikasi pengaduan yang ditandatangani oleh semua pelaksana verifikasi berisi data, fakta dan temuan lapangan serta rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak teradu. Selain itu di buat laporan hasil kegiatan verifikasi lapangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

e. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak teradu akan di monitoring sejauh mana progress perkembangan upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Hasil monitoring tindak lanjut ini dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan ditandatangani oleh tim monitoring dan pihak teradu.

Pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pengaduan yang masuk berjumlah 6 (Enam) pengaduan teregistrasi dan 2 (dua) pengaduan tahun sebelumnya yang masih dilakukan monitoring tindak lanjut.
2. Pengaduan yang diregistrasi, yaitu :
 - Pengaduan keberatan warga RT.7 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati terhadap rencana pembangunan kandang ayam milik perusahaan.
 - Pengaduan warga via media sosial dugaan pencemaran Sungai Jorong dampak dari air limbah pabrik Kelapa sawit.



- Pengaduan kasus kerusakan lingkungan melalui media online terkait lubang bekas tambang batu bara di RT.2 dan RT.4 Dusun 1 Desa Bukit Mulya Kecamatan Kintap yang mengalami erupsi, sehingga semakin meluas mendekati perumahan warga, dikhawatirkan menimbulkan longsor pada bangunan rumah warga yang berada dekat sisi lubang tambang.
 - Pengaduan dari Bapak Abu Hanifah terhadap dampak air limbah kegiatan rumah makan yang mengalir ke sisi jalan akibat drainase mengalami pendangkalan/penyumbatan/kerusakan sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar.
 - Pengaduan warga melalui media sosial terhadap luapan air limbah dari Setling Pond kegiatan pertambangan batu bara ke aliran sungai RT.1 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong yang menyebabkan terjadinya banjir.
 - Pengaduan dari Bapak Alimuddin terhadap dugaan masuknya air perkebunan kelapa sawit ke saluran irigasi tambak warga Desa Muara Kintap RT. 06 menyebabkan tambak tidak produktif.
3. Pengaduan tahun sebelumnya yang masih dilakukan penanganan yaitu ;
- Tindak lanjut monitoring pengaduan warga Komplek Multi Madya terkait keluhan debu, bau dan kebisingan dari kegiatan produksi kalsiboard Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati.
 - Tindak lanjut monitoring penanganan pengaduan Bapak H. Taberi terhadap pencemaran air limbah IPA PDAM PTPN XIII Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari.
4. Status pengelolaan pengaduan yang ditangani tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- Pengaduan keberatan warga RT.7 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati terhadap rencana pembangunan kandang ayam milik perusahaan. (Status selesai)
 - Pengaduan warga via media sosial dugaan pencemaran Sungai Jorong dampak dari air limbah pabrik Kelapa sawit.(Status Selesai)



- Pengaduan kasus kerusakan lingkungan melalui media online terkait lubang bekas tambang batu bara di RT.2 dan RT.4 Dusun 1 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap yang mengalami erupsi, sehingga semakin meluas mendekati perumahan warga, dikhawatirkan menimbulkan longsor pada bangunan rumah warga yang berada dekat sisi lubang tambang.(Status Selesai)
- Pengaduan dari Bapak Abu Hanifah terhadap dampak air limbah kegiatan rumah makan yang mengalir ke sisi jalan akibat drainase mengalami pendangkalan/penyumbatan/kerusakan sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar. (Status selesai)
- Pengaduan warga melalui media sosial terhadap luapan air limbah dari Setling Pond kegiatan pertambangan batu bara ke aliran sungai RT.1 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong yang menyebabkan terjadinya banjir.
- Pengaduan dari Bapak Alimuddin terhadap dugaan masuknya air perkebunan kelapa sawit ke saluran irigasi tambak warga Desa Muara Kintap RT. 06 menyebabkan tambak tidak produktif.(Status dalam pemantauan)
- Tindak lanjut monitoring pengaduan warga Komplek Multi Madya terkait keluhan debu, bau dan kebisingan dari kegiatan produksi kalsiboard Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati. (Status dalam pemantauan)
- Tindak lanjut monitoring penanganan pengaduan Bapak H. Taberi terhadap pencemaran air limbah IPA PDAM PTPN XIII Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari. (Status Selesai).



Data pengaduan Lingkungan Hidup

No	Nama Aduan	Asal/Sumber	Status	Ket
1	Keberatan warga terhadap pembangunan kandang ayam yang akan berpotensi menimbulkan bau	PT. Sinar Mitra Jaya Kecamatan Bati-Bati	Selesai	Telah diselesaikan secara musyawarah antar warga dan pihak perusahaan
2	Pencemaran Air Sungai	PT. CPKA Desa Jorong Kecamatan Jorong	Selesai	Telah dilakukan perbaikan pengelolaan air limbah
3	Terjadinya erupsi bekas lahan tambang batu bara yang semakin meluas mendekati lokasi rumah warga dan berpotensi longsor	PT. Arutmin Site Kintap Desa Bukit Mulya Kecamatan Kintap	Selesai	Telah dilakukan negosiasi antar warga terdampak dengan pihak perusahaan terkait ganti rugi lahan
4	Pencemaran air limbah kegiatan rumah makan sisi jalan akibat aliran drainase tidak lancar	Rumah Makan Azizah Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	selesai	Telah dilakukan pemeliharaan drainase yang mengalami pendangkalan, penyumbatan sehingga aliran air pada selokan menjadi lancar dan tidak lagi melimpas ke sisi jalan
5	Buangan air limbah kegiatan pertambangan batu bara ke	PT. Arutmin Site Asam-Asam, Desa Sungai Baru Simpang 4	Selesai	Telah dilakukan verifikasi lapangan, sudah tidak



	aliran sungai berdampak terjadinya banjir	Asam-Asam Kecamatan Jorong		ada aktivitas pemompaan air limbah ke Settling Pond 13, akan dilakukan penutupan SP 13, karena sudah tidak dipergunakan dalam kegiatan. Terkait permintaan ganti rugi lahan akan diselesaikan antara warga dan pihak perusahaan.
6	Masuknya air perkebunan kelapa sawit ke saluran irigasi tambak	PT. Kintap Jaya Wattindo Desa Muara Kintap Kecamatan Muara Kintap	Selesai	Telah dilakukan verifikasi lapangan dan mediasi. Telah dilakukan tindak lanjut penutupan aliran air kebun yang terhubung ke saluran irigasi.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 6 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti antara lain :

1. Belum optimal koordinasi antar instansi-instansi maupun unit-unit yang terlibat dalam tim penanganan pengaduan lingkungan hidup kabupaten
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup
3. Keterbatasan SDM



Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang lebih optimal lagi antar instansi-instansi maupun unit-unit yang terlibat dalam tim penanganan pengaduan lingkungan hidup kabupaten, sehingga upaya penemuan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan lingkungan hidup bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
2. Optimalisasi monitoring pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pos Pengaduan dan penanganan pengaduan di bidang lingkungan hidup untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola penanganan pengaduan lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi terkait penanganan pengaduan lingkungan hidup kepada masyarakat agar meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan masyarakat.
2. Koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan lingkungan hidup.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan apabila ada kegiatan diklat teknis PPLH dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.



3.a.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 7

N o	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Targe t	Realisas i	Persenta se Capaian
2	Sasaran 7 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Indikator 11 Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal	70 % (70% dari 25 = 18 taat Amd al)	24% (6/25) x 100% = 24% taat Amdal)	34%
		Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL	20 % (20% dari 75 = 15 taat UKL- UPL)	8% (6/75) x 100% = 8% taat UKL- UPL)	40%

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya. Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaat ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur Bentang tanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan . Di dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan dan izin lingkungan / persetujuan lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan.. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan.



Pada tahun 2021 terdapat 121 perusahaan yang aktif yang terdiri dari 25 Amdal dan 96 UKL-UPL yang telah dikeluarkan izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) oleh Pemerintah Daerah. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara



(PPU) dan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pada saat pelaksanaan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan usaha bertujuan agar pelaku usaha taat terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal.

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti : luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) : persetujuan teknis pembuangan air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), dll

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2021 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan.

Pada tahun 2021 sasaran strategis Kabid P2LH meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten dengan indikator :

Apabila menggunakan regulasi lama :

- Amdal yang diawasi : 25 Amdal, UKL-UPL yang diawasi : 77 UKL-UPL
- Taat Amdal : 18 Amdal, taat UKL-UPL : 21 UKL-UPL



- Tidak taat Amdal : 7 Amdal, tidak taat UKL-UPL = 56 UKL-UPL
- prosentase target ketaatan : 70% Amdal, 20% UKL-UPL
- prosentase capaian ketaatan Amdal : $(18/25) \times 100\% = 72\%$,
UKL-UKL $(21/77) \times 100\% = 27\%$

Capaian melebihi target

Apabila menggunakan regulasi baru :

- Amdal yang diawasi : 25 Amdal, UKL-UPL yang diawasi : 77 UKL-UPL
- Taat Amdal : 6 Amdal, taat UKL-UPL : 6 UKL-UPL
- Tidak taat Amdal : 19 Amdal, tidak taat UKL-UPL : 69 UKL-UPL
- prosentase target ketaatan : 70% Amdal, 20% UKL-UPL
- prosentase capaian ketaatan Amdal : $(6/25) \times 100\% = 24\%$
UKL-UPL : $(6/75) \times 100\% = 8\%$

Capaian tidak mencapai target

Capaian tersebut belum mencapai target RPJMD dengan indikator persentase Cakupan pengawasan terhadap AMDAL yang di target % dan hanya tercapai 24%.



Uraian	2017			2018			2019			2020			2021		
	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20	21	105	15	15	100	15	13	87	20	21	105	25	25	100

Pada tabel diatas di tahun 2021, dilakukan pengawasan terhadap 25 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal , diantara 25 pelaku usaha tersebut sebanyak 6 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 24% dari pelaku usaha memiliki dokumen amdal yang dilakukan pengawasan.

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2017-2020, rata-rata persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal meningkat namun pada tahun 2021 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal mengalami penurunan Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan



memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.

2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh : Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan skala amdal yang belum taat.
2. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.
3. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi.
5. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan



materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Uraian	2017			2018			2019			2020			2021		
	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (pelaku usaha)	capaian (pelaku usaha)	%	target (Amdal atau UKL-UPL)	capaian (Amdal atau UKL-UPL)	%
Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	20	21	105	15	15	100	15	13	87	20	21	105	25	25	100

Pada tabel diatas di tahun 2021 dilakukan pengawasan terhadap 123 pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari 25 Amdal dan 77 UKL-UPL, diantara 25 Amdal tersebut sebanyak 6 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 24%, dan dari 77 UKL-UPL tersebut sebanyak 6 pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL atau sebesar 8%.

Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2017-2019, persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL mengalami penurunan di tahun 2018 namun pada sejak tahun 2019- 2020 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL mengalami kenaikan, dan di tahun 2021 ini kembali mengalami penurunan.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kabid P2LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan



penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

3.b.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 8

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Sasaran 8 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Indikator 12 Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	100 % (5 bs)	100% (6 bs)	160%

Pada tahun 2021 sasaran strategis Kabid P2LH Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan indikator Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah dengan target 100 % (5 bank Sampah) terealisasi 120% (6 bank Sampah) dengan persentase pencapaian sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembentukan Bank Sampah Multi Guna Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 35/DPRKPLH/2021 tanggal 25 Februari 2021
- b. Pembentukan Bank Sampah Gawi Sabarataan Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 38/DPRKPLH/2021 tanggal 10 Juni 2021
- c. Pembentukan Bank Sampah Kerakatan Sosial Bersama Desa Asam-asam Kec. Jorong berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 40/DPRKPLH/2021 tanggal 22 Juni 2021
- d. Pembentukan Bank Sampah Sumber Sehat Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang



berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 43/DPRKPLH/2021 tanggal 27 Juli 2021

- e. Pembentukan Bank Sampah Tarini Desa Martadah Kec. Tambang Ulang berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 46/DPRKPLH/2021 tanggal 07 September 2021
- f. Pembentukan Bank Sampah Raden Bersih Desa Raden Kec. Kurau berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 62/DPRKPLH/2021 tanggal 08 November 2022

Sampah adalah permasalahan bersama yang menjadi tanggungjawab bersama dalam mengatasinya. Didalam kewajiban lingkungan terdapat tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Sebagai wadah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan diperlukan wadah kelembagaan masyarakat berupa Bank Sampah. Bank Sampah merupakan wadah bersama agar masyarakat dapat berpartisipasi terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Semakin banyak bank sampah yang aktif memberikan indikator keterlibatan masyarakat dalam mengolah sampah. Semakin banyak sampah yang terkelola semakin kecil dampak sampah yang ditimbulkan. Selain manfaat peningkatan kebersihan secara lingkungan, pemanfaatan sampah tidak saja menanamkan kepedulian tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi dari olah sampah menjadi manfaat (nilai sampah daur ulang dan pemanfaatan kompos).

Kendala dalam pengembangan Bank Sampah adalah

1. kurangnya petugas dalam mengedukasi secara intensif (petugas khusus pendampingan) terhadap masyarakat.
2. Terbentuknya Bank Sampah diperlukan pendampingan lanjutan dalam pengelolaan kelembagaan maupun teknis pemanfaatan sampah tersebut.
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan Bank Sampah juga tidak terlepas dari terpuruknya permintaan industri daur ulang sampah akibat dampak pandemi covid 19.
4. lemahnya permintaan pasar atau nilai tukar sampah 3R (Reuse ,Reduce, Reeyek) menyebabkan tidak terbelinya bahan baku sampah sehingga menjadi menumpuk dan tak bernilai ekonomi.

Kondisi ini menyebabkan kelesuan kegiatan pengumpulan sampah dan kurangnya minat pengembangan sampah lewat kegiatan Bank Sampah di Tanah Laut. Untuk pengembangan



Bank Sampah perlu diambil Langkah langkah perbaikan rantai distribusi sampah dan peningkatan SDM pembina Bank Sampah.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Kabid P2KLH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.



Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 6 ini dilaksanakan melalui Program Program Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P2KLH DPRKPLH nomor 6 Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa didukung 1 orang PTT

**Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa**

N o	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Indikator Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan	6 Pengaduan	120 %
2	Sasaran Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Indikator Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi	6 Dokumen Verifikasi	120 %
3	Sasaran Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Indikator Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi	6 Dokumen Rekomendasi	120 %
4	Sasaran Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Indikator Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring	6 Kegiatan Monitoring	120 %



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	5 Pengaduan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	8 Pengaduan	5 Pengaduan	6 Pengaduan	120%
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	5 Dokumen Verifikasi	6 Dokumen Verifikasi	120%
3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	5 Dokumen Rekomendasi	6 Dokumen Rekomendasi	120%
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	5 Kegiatan Monitoring	6 Kegiatan Monitoring	120%



Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				(%)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Rp 115.021.596	Rp 2.025.098	Rp 24.220.294	Rp 10.168.392	Rp 52.361.201	77,18
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi							



3	Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindakan lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan							
4	Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan

Jika dilihat perbandingan kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun Sebelumnya dari tahun 2017-2019 rata-rata telah tercapai 100%, Perjanjian Kinerja Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup dengan indikator Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi dengan target 5 pengaduan terealisasi 6 pengaduan dengan capaian lebih dari 100% , dengan rincian sebagai berikut :

- Pengaduan keberatan warga RT.7 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati terhadap rencana pembangunan kandang ayam milik perusahaan.
- Pengaduan warga via media sosial dugaan pencemaran Sungai Jorong dampak dari air limbah pabrik Kelapa sawit.



- Pengaduan kasus kerusakan lingkungan melalui media online terkait lubang bekas tambang batu bara di RT.2 dan RT.4 Dusun 1 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap yang mengalami erupsi, sehingga semakin meluas mendekati perumahan warga, dikhawatirkan menimbulkan longsor pada bangunan rumah warga yang berada dekat sisi lubang tambang.
 - Pengaduan dari Bapak Abu Hanifah terhadap dampak air limbah kegiatan rumah makan yang mengalir ke sisi jalan akibat drainase mengalami penyumbatan/kerusakan sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar.
 - Pengaduan warga melalui media sosial terhadap luapan air limbah dari Setling Pond kegiatan pertambangan batu bara ke aliran sungai RT.1 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong yang menyebabkan terjadinya banjir.
 - Pengaduan dari Bapak Bapak Alimuddin terhadap dugaan masuknya air perkebunan kelapa sawit ke saluran irigasi tambak warga Desa Muara Kintap RT. 06 menyebabkan tambak tidak produktif.
2. Kinerja Utama Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup dengan indikator Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi dengan target 5 Dokumen Verifikasi terealisasi 5 Dokumen Verifikasi dengan capaian 100 % , dengan rincian sebagai berikut :
- 1 Dokumen Verifikasi pengaduan keberatan warga RT.7 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati terhadap rencana pembangunan kandang ayam milik perusahaan.
 - 1 Dokumen Verifikasi pengaduan warga via media sosial dugaan pencemaran Sungai Jorong dampak dari air limbah pabrik Kelapa sawit.



- 1 Dokumen Verifikasi Pengaduan kasus kerusakan lingkungan melalui media online terkait lubang bekas tambang batu bara di RT.2 dan RT.4 Dusun 1 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap yang mengalami erupsi, sehingga semakin meluas mendekati perumahan warga, dikhawatirkan menimbulkan longsor pada bangunan rumah warga yang berada dekat sisi lubang tambang.
- 1 Dokumen Verifikasi Pengaduan dari Bapak Abu Hanifah terhadap dampak air limbah kegiatan rumah makan yang mengalir ke sisi jalan akibat drainase mengalami penyumbatan/kerusakan sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar.
- 1 Dokumen Verifikasi pengaduan warga melalui media sosial terhadap luapan air limbah dari Setling Pond kegiatan pertambangan batu bara ke aliran sungai RT.1 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong yang menyebabkan terjadinya banjir.
- 1 Dokumen Verifikasi pengaduan dari Bapak Bapak Alimuddin terhadap dugaan masuknya air perkebunan kelapa sawit ke saluran irigasi tambak warga Desa Muara Kintap RT. 06 menyebabkan tambak tidak produktif.

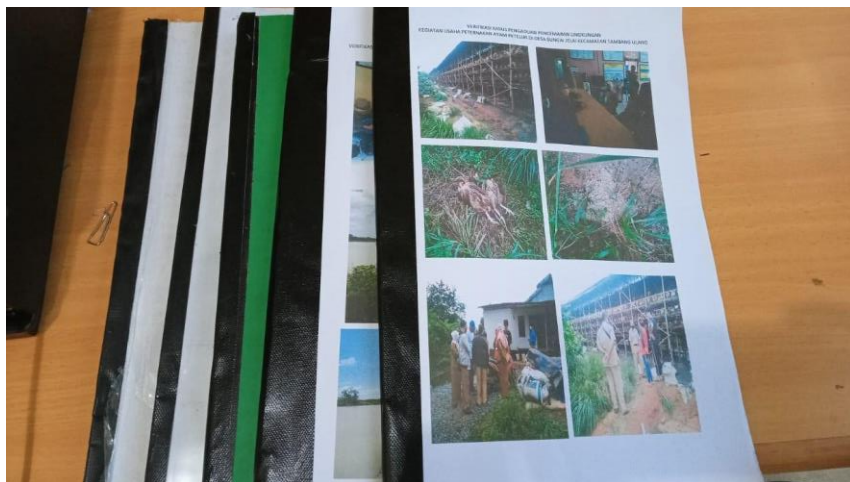


Foto Dokumen Verifikasi Pengaduan

3. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan bidang lingkungan hidup dengan indikator Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan dengan target 5 Dokumen Rekomendasi terealisasi 5 Dokumen Rekomendasi dengan capaian 100 % , dengan rincian sebagai



berikut :

- 1 Dokumen Rekomendasi pengaduan keberatan warga RT.7 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati terhadap rencana pembangunan kandang ayam milik perusahaan.
- 1 Dokumen Rekomendasi Pengaduan warga via media sosial dugaan pencemaran Sungai Jorong dampak dari air limbah pabrik Kelapa sawit.



- 1 Dokumen Rekomendasi pengaduan kasus kerusakan lingkungan melalui media online terkait lubang bekas tambang batu bara di RT.2 dan RT.4 Dusun 1 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap yang mengalami erupsi, sehingga semakin meluas mendekati perumahan warga, dikhawatirkan menimbulkan longsor pada bangunan rumah warga yang berada dekat sisi lubang tambang.
- 1 Dokumen Rekomendasi pengaduan dari Bapak Abu Hanifah terhadap dampak air limbah kegiatan rumah makan yang mengalir ke sisi jalan akibat drainase mengalami penyumbatan/kerusakan sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar.
- 1 Dokumen Rekomendasi pengaduan warga melalui media sosial terhadap luapan air limbah dari Setling Pond kegiatan pertambangan batu bara ke aliran sungai RT.1 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong yang menyebabkan terjadinya banjir.
- 1 Dokumen Rekomendasi pengaduan Bapak H. Taberi terhadap pencemaran air limbah IPA PDAM PTPN XIII Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari



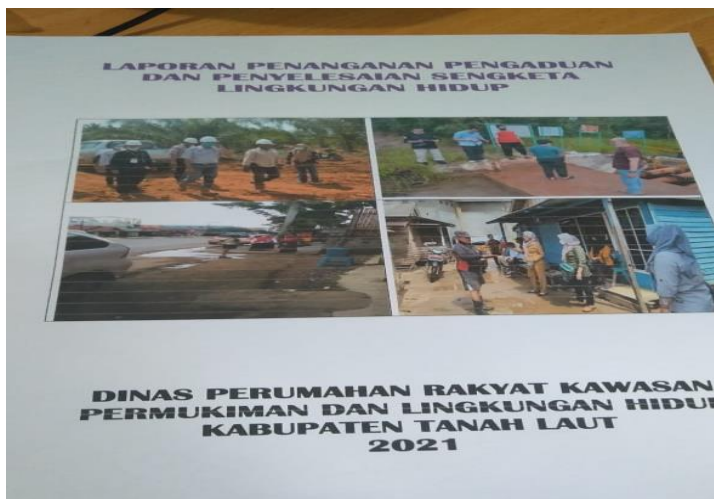


Foto Dokumen penanganan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup

4. Kinerja Utama Melaksanakan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan dengan indikator Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring dengan target 5 Kegiatan Monitoring terealisasi 5 Kegiatan Monitoring dengan capaian 100 % , dengan rincian sebagai berikut

:

- Pengaduan keberatan warga RT.7 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati terhadap rencana pembangunan kandang ayam milik perusahaan. (Status selesai)
- Pengaduan warga via media sosial dugaan pencemaran Sungai Jorong dampak dari air limbah pabrik Kelapa sawit.(Status Selesai)



- Pengaduan kasus kerusakan lingkungan melalui media online terkait lubang bekas tambang batu bara di RT.2 dan RT.4 Dusun 1 Desa Bukit Mulya Kecamatan Kintap yang mengalami erupsi, sehingga semakin meluas mendekati perumahan warga, dikhawatirkan menimbulkan longsor pada bangunan rumah warga yang berada dekat sisi lubang tambang.(Status Selesai)
 - Pengaduan dari Bapak Abu Hanifah terhadap dampak air limbah kegiatan rumah makan yang mengalir ke sisi jalan akibat drainase mengalami pendangkalan/ penyumbatan/kerusakan sehingga menimbulkan gangguan kenyamanan di lingkungan sekitar. (Status selesai)
 - Pengaduan warga melalui media sosial terhadap luapan air limbah dari Setling Pond kegiatan pertambangan batu bara ke aliran sungai RT.1 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong yang menyebabkan terjadinya banjir.(Status selesai)
 - Pengaduan dari Bapak Alimuddin terhadap dugaan masuknya air perkebunan kelapa sawit ke saluran irigasi tambak warga Desa Muara Kintap RT. 06 menyebabkan tambak tidak produktif.(Status selesai)
5. Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui Program Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp 115.021,596 dengan realisasi sebesar Rp 88.774.985 atau capaian sebesar 77,18%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 7 ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P2KLH DPRKPLH nomor 7 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mentaati Amdal dan UKL-UPL didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 1 orang PTT

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Indikator Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi	25 Amdal	25 Amdal	100%
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL- UPL yang diawasi	75 UKL-UPL	77 UKL-UPL	102,67%
2	Sasaran Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Indikator Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	5 perusahaan yang mengikuti proper	13 perusahaan yang mengikuti proper	260%
3	Sasaran Melakukan penerapan sanksi administratif	Indikator Jumlah sanksi administratif	5 sanksi administratif	6 sanksi administratif	120%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2021 dengan Capaian
Tahun- Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen AMDAL yang diawasi	21 pelaku usaha	15 pelaku usaha	13 pelaku usaha	21 pelaku usaha	25 AMDAL	25 AMDAL	100%
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi	45 perusahaan/pekerjaan	62 perusahaan/pekerjaan	80 perusahaan/pekerjaan	60 perusahaan/pekerjaan	75 UKL-UPL	77 UKL-UPL	102,67%
2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper	14 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	16 perusahaan yang mengikuti proper	5 perusahaan yang mengikuti proper	13 perusahaan yang mengikuti proper	260%
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	-	-	-	2 sanksi administratif	5 sanksi administratif	6 sanksi administratif	120%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin PPLH	<p>Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi</p>	<p>pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Rp 162.609.786,00</p>	<p>Rp 1.915.098,00</p>	<p>Rp 23.039.390,00</p>	<p>Rp 38.400.700,00</p>	<p>Rp 114.245.902,00</p>	<p>70,26</p>



2	Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti proper							
3	Melakukan penerapan sanksi administratif	Jumlah sanksi administratif	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp. 60.561.100,00	-	Rp. 4.525.000,00	Rp. 4.525.000,00	Rp. 33.708.132,00	55,66

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Pencapaian program/kegiatan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH dengan indikator :

- a. Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi dengan target 25 Amdal terealisasi 25 Amdal dengan capaian 100%.



Foto pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal

- b. Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi dengan target 75 UKL-UPL terealisasi 77 UKL-UPL dengan capaian 102,67%.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Foto pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL

Pada tahun 2021 ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut khususnya Seksi Penegakan Hukum



Lingkungan Hidup telah berhasil melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha yang memiliki Amdal dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dokumen UKL-UPL sebanyak :

- a) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Amdal : 25 Amdal
- b) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki UKL-UPL : 77 UKL-UPL

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.
2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh : Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki



dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan skala amdal yang belum taat.

2. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.
 3. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi.
 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.
2. Kinerja Utama melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan dengan indikator Jumlah perusahaan yang mengikuti proper dengan target 5 perusahaan yang mengikuti proper terealisasi 13 perusahaan yang mengikuti proper dengan capaian lebih dari 260%. dari 13 perusahaan tersebut : 11 perusahaan mengikuti Propernas dan 2 perusahaan mengikuti properda.

Kasi Penegakan Lingkungan Hidup melakukan pendampingan tim penilai proper dari DLH provinsi maupun KLHK terhadap pelaku usaha yang mengikuti program proper yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kesekretariatan Proper berada di DLH Provinsi untuk properda dan di KLHK untuk propernas. Peran Kabupaten adalah anggota tim pada saat dilakukan verifikasi proper yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi. Sedangkan penilaian dilakukan oleh DLH provinsi untuk Properda dan KLHK untuk Propernas.



Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain

1. Apabila dibandingkan dengan jumlah Perusahaan / pelaku usaha maka Perusahaan yang mengikuti proper masih terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
2. Tidak ada SDM khusus yang khusus menangani Proper, sehingga sering bersamaan dengan jadwal pengawasan.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah Perusahaan yang diawasi untuk mengikuti program proper setiap tahunnya
2. Memaksimalkan SDM yang telah ada

Rencana Aksi :

1. Memotivasi Perusahaan yang diawasi untuk mengikuti program proper.
2. Melakukan pembinaan proper terhadap perusahaan sekaligus pada saat pengawasan
3. Kinerja Utama Melakukan pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan dengan





Foto pengawasan perusahaan yang mengikuti proper

3. Kinerja Utama Melakukan penerapan sanksi administratif dengan indikator Jumlah sanksi administratif dengan target 5 sanksi administratif terealisasi 6 sanksi administratif dengan capaian lebih dari 120%, Terdapat 6 (enam) pelaku usaha yang dijatuhi sanksi administrasi berupa *teguran tertulis*. Keenam pelaku usaha tersebut masih proses perbaikan dalam memenuhi kewajiban dalam sanksi administratif tersebut. Penerapan sanksi administratif terhadap Perusahaan / pelaku usaha apabila pada saat pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan/persetujuan lingkungan, Izin PPLH, dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sanksi Administratif yang diterapkan dalam bentuk SK Bupati.

Sanksi Administratif terdiri dari :

- a. Teguran Tertulis
- b. Paksaan Pemerintah
- c. Pembekuan Izin Lingkungan
- d. Pencabutan Izin Lingkungan

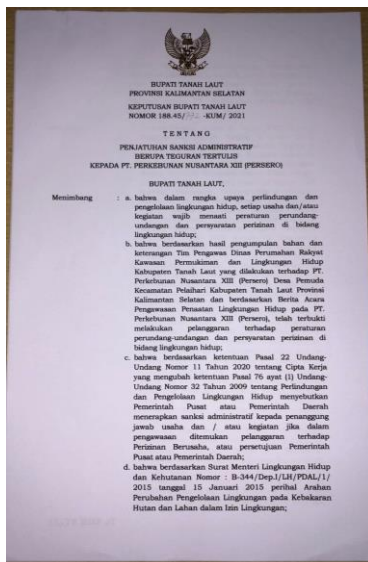
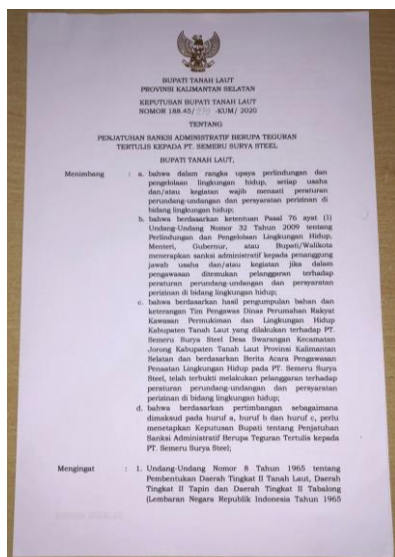
Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih banyak Perusahaan yang tidak memiliki SDM di bidang lingkungan hidup sehingga tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam bidang lingkungan hidup (terutama perusahaan baru dan perusahaan skala menengah)
2. Adanya regulasi baru yang mewajibkan memiliki pertimbangan teknis pembuangan/pemanfaatan air limbah dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) bagi pelaku yang membuang/menfaatkan air limbah dan pertimbangan teknis pembuangan emisi dan surat kelayakan operasional (SLO) bagi pelaku usaha yang membuang emisi.
3. Kurangnya SDM yang khusus membantu dalam persiapan penerapan sanksi administratif

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :



1. Mewajibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan memiliki SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
2. Memberikan pemahaman secara intensif tentang ketentuan-ketentuan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan Peraturan Perundang-di bidang lingkungan hidup kepada Pelaku usaha dan/atau kegiatan
3. Optimalisasi SDM yang ada
Rencana Aksi :
 1. Melaksanakan sosialisasi mengenai regulasi baru tersebut kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan baik secara langsung maupun melalui leaflet
 2. Meminta/mengusulkan SDM yang khusus membantu dalam persiapan penerapan sanksi administratif



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

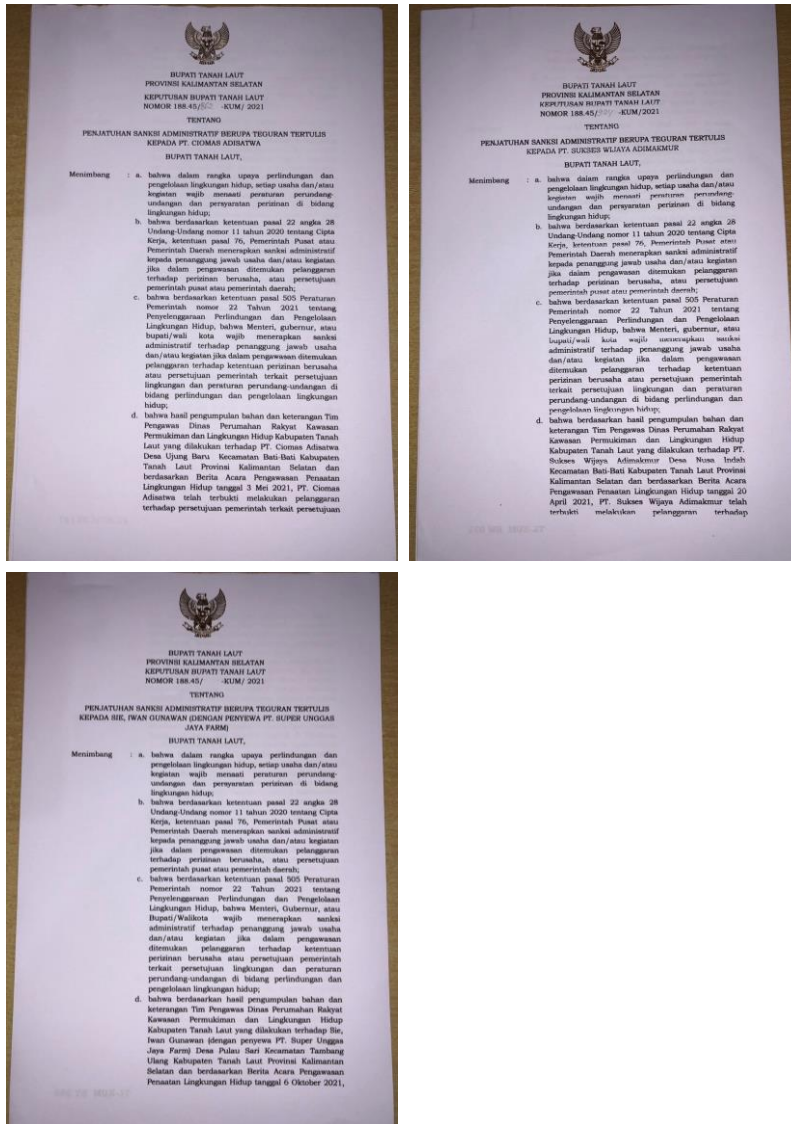


Foto SK Sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

- Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan



Hidup dengan sub kegiatan pengawasan usaha dan/atau yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 162.609.786,00 dengan realisasi sebesar Rp 114.245.902,00 atau capaian sebesar 70,26% dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dengan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.561.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.708.132,00 atau capaian sebesar 55,66%. Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P2KLH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 8 ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam



Pengelolaan Lingkungan Hidup selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P2KLH DPRKPLH nomor 7 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup didukung 6 orang SDM yaitu 1 orang PNS dan 5 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Indikator Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	20 sekolah	10 sekolah	50%
2	Sasaran Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Indikator Jumlah sekolah adiwiyata	2 sekolah	2 sekolah	100%
3	Sasaran Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Indikator Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/ sekolah	5 Bank Sampah	6 Bank Sampah	120%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 2021 dengan Capaian

Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	21 sekolah	15 sekolah	26 Sekolah	20 sekolah	20 sekolah	10 sekolah	50%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata)	13 sekolah	2 sekolah	15 sekolah	1 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	100%
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/sekolah	2 Bank Sampah	11 Bank Sampah	10 Bank Sampah	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah	6 Bank Sampah	120%



Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 219.551.548	Rp 5.745.294	Rp 68.652.476	Rp 68.016.775	Rp 63.197.753	93,65
2	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata							
3	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat/sekolah							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan dengan indikator Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dengan target 20 sekolah terealisasi 10 sekolah dengan capaian kinerja 50%, dengan rincian peserta sosialisasi sebagai berikut :

1. SDN 1 Angsau
2. SDN Ambungan
3. SDN 2 Ranggung
4. SDN 2 Gunung Makmur
5. SDN 1 Batakan
6. SD Assalam



7. SDN 1 Handil Suruk
8. SDN 2 Handil Suruk
9. SMPN 1 Kurau
10. SMPN 1 Batu Ampar



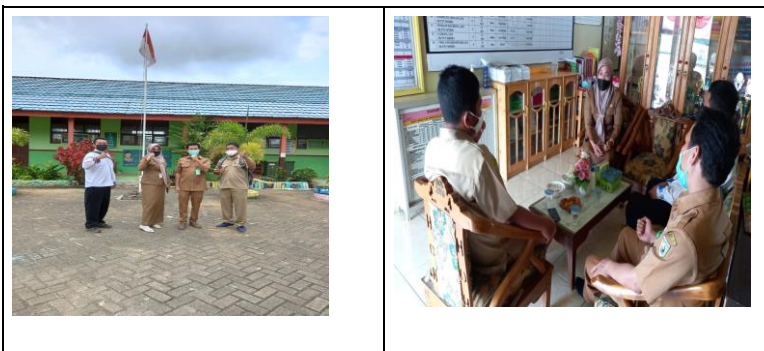


Foto sosialisasi Adiwiyata

2. Kinerja Utama Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan dengan indikator Jumlah sekolah adiwiyata dengan target 2 sekolah terealisasi 2 sekolah dengan capaian kinerja 100%

Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dikarenakan tidak berjalan secara normalnya pembinaan yang dilakukan dikarenakan pandemi Covid-19.



Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan
2. Adanya wabah covid-19 yang membatasi ruang gerak pembinaan sekolah adiwiyata
3. Perlunya kerjasama instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut serta Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut
4. Permasalahan yang sangat mendasar selain 3 permasalahan diatas adalah kasus pandemi Covid-19 yang sangat tinggi sehingga banyak sekolah-sekolah yang diliburkan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi SDM yang ada
- Pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi di kabupaten tanah laut
- Melakukan koordinasi lebih intens dengan stake holder terkait.

Rencana Aksi :

- Mengajukan permohonan penambahan SDM untuk petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan.
- Ikut berperan serta dalam percepatan vaksinasi dengan mengikuti program yang dilakukan pemerintah daerah.
- melakukan pertemuan awal dengan instansi terkait dan merencanakan kegiatan awal yang harus dilakukan di tahun 2022





Foto piagam penghargaan Adiwiyata tahun 2020

5. Kinerja Utama Melakukan pembentukan bank sampah dengan indikator Jumlah bank sampah yang dibentuk dari masyarakat/ sekolah dengan target 2 Bank Sampah terealisasi 6 Bank Sampah dengan capaian kinerja 300%, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembentukan Bank Sampah Multi Guna Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 35/DPRKPLH/2021 tanggal 25 Februari 2021
 2. Pembentukan Bank Sampah Gawi Sabarataan Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 38/DPRKPLH/2021 tanggal 10 Juni 2021
 3. Pembentukan Bank Sampah Kerakatan Sosial Bersama Desa Asam-asam Kec. Jorong berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 40/DPRKPLH/2021 tanggal 22 Juni 2021
 4. Pembentukan Bank Sampah Sumber Sehat Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang



berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 43/DPRKPLH/2021 tanggal 27 Juli 2021

5. Pembentukan Bank Sampah Tarini Desa Martadah Kec. Tambang Ulang berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 46/DPRKPLH/2021 tanggal 07 September 2021
6. Pembentukan Bank Sampah Raden Bersih Desa Raden Kec. Kurau berdasarkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 62/DPRKPLH/2021 tanggal 08 November 2021

Sampah adalah permasalahan bersama yang menjadi tanggungjawab bersama dalam mengatasinya. Didalam kewajiban lingkungan terdapat tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Sebagai wadah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan diperlukan wadah kelembagaan masyarakat berupa Bank Sampah. Bank Sampah merupakan wadah bersama agar masyarakat dapat berpartisipasi terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Semakin banyak bank sampah yang aktif memberikan indikator keterlibatan masyarakat dalam mengolah sampah. Semakin banyak sampah yang terkelola semakin kecil dampak sampah yang ditimbulkan. Selain manfaat peningkatan kebersihan secara lingkungan, pemanfaatan sampah tidak saja menanamkan kepedulian tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi dari olah sampah menjadi manfaat (nilai sampah daur ulang dan pemanfaatan kompos).

Kendala dalam pengembangan Bank Sampah adalah

1. kurangnya petugas dalam mengedukasi secara intensif (petugas khusus pendampingan) terhadap masyarakat.
2. Terbentuknya Bank Sampah diperlukan pendampingan lanjutan dalam pengelolaan kelembagaan maupun teknis pemanfaatan sampah tersebut.
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan Bank Sampah juga tidak terlepas dari terpuruknya permintaan industri daur ulang sampah akibat dampak pandemi covid 19.
4. Lemahnya permintaan pasar atau nilai tukar sampah 3R (Reeuse ,Reduse, Reeyek) menyebabkan tidak terbelinya bahan baku sampah sehingga menjadi menumpuk dan tak bernilai ekonomi.
5. Kondisi ini menyebabkan kelesuan kegiatan pengumpulan sampah dan kurangnya minat pengembangan sampah lewat kegiatan Bank Sampah di Tanah Laut. Untuk



pengembangan Bank Sampah perlu diambil Langkah langkah perbaikan rantai



distribusi sampah dan peningkatan SDM pembina Bank Sampah.

Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp 219.551.548 dengan realisasi sebesar Rp 205.612.298 atau capaian sebesar 93,65%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.



Foto Kegiatan bank sampah

3.c. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab



kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program dan kegiatan yaitu :

- Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp. 619.999.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 589.876,900,00 atau 95.14 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sebanyak 6 orang.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid P3LH DPRKPLH

Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 9	Indikator 13 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku Mutu	81,50%	81,58%	100,10%
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indikator 14 Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	92,00%	92,30%	100,33%
		Indikator 15 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis			
--	--	--	--	--	--



**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 2021 dengan
Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	80,71%	84,49%	81,25%	81,50%	81,58%	100,10 %
		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	96,45%	95,84%	91,75%	92,00%	92,30%	100,33 %
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.c.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 9

Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan indikator :

1. Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dengan target 81,50% terealisasi 81,58% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100,10 %. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dilaksanakan oleh Kasi PemantauanLingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut.
2. Indikator Kinerja Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu dengan target 92,00% terealisasi 92,30% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100,33%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan



yang memenuhi baku mutu Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu u dilaksanakan oleh Kasi Pencemaran Lingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran 9	Indikator 14	92,00%	92,30%	100,33%
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu			

Pada tahun 2021 dilaksanakan pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas industri dan pengujian kadar polusi limbah cair sebanyak 78 parameter. Dari hasil pengujian laboratorium terdapat 72 parameter yang sesuai dengan baku mutu. Sehingga persentase parameter limbah cair dan emisi/polusi udara akibat aktivitas industri adalah $(72/78) \times 100\% = 92,30 \%$.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indikator 13 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,50%	81,58%	100,10 %

Pada tahun 2021 dilaksanakan pengujian kualitas air dan udara ambient sebanyak 248 parameter. Dari hasil pengujian laboratorium terdapat 203 parameter yang memenuhi bakumutu. Sehingga persentase parameter air dan udara ambient adalah $(203/248) \times 100\% = 81,58 \%$

- Indikator Kinerja Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis dengan target 100% terealisasi 100% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis dilaksanakan oleh Kasi Kerusakan Lingkungan



dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Sasaran 9 Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indikator 15 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100%	100%	100%

Kasi Pemantauan Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P3LH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 9 dengan indikator Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P3LH DPRKLH nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Pemantauan Lingkungan , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Pemantauan Lingkungan didukung 1 orang PNS.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemantauan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan aksi bersih sungai	Indikator Jumlah aksi bersih sungai	0 kali (Kerana anggaran untuk bersih sungai termasuk dalam anggaran yang mengalami recofusing)	—	—
2.	Sasaran Melaksanakan pengujian kualitas air	Indikator Jumlah uji kualitas air	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	100%



3.	Sasaran Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Indikator Jumlah uji kualitas udara ambient	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
4.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	100%
Rata-Rata Capaian					75%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pemantauan Lingkungan 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah aksi bersih sungai	2 kali	2 kali	2 kali	0 kali	—	—
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air	2 dokumen uji	2 dokumen uji	1 dokumen uji	2 Dokumen Uji	2 dokumen uji	100%
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient	1 dokumen uji	2 dokumen uji	1 dokumen uji	1 Dokumen Uji	1 dokumen uji	100%
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/skpd yang tersosialisasi	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	11 Kecamatan 26 Skpd	100%



Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pemantauan Lingkungan

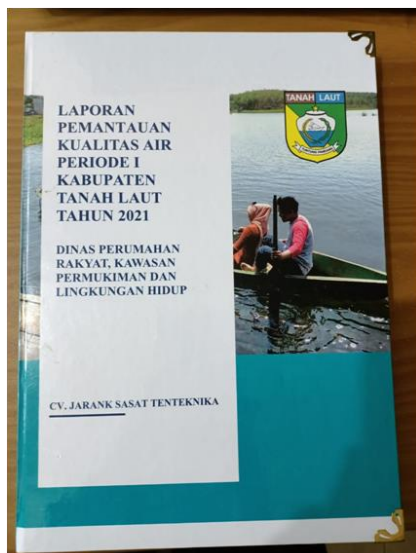
No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah sungai yang dibersihkan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Rp 243.000.000	Rp -	Rp 4.549.500	Rp 75.959.500	Rp 235.611.900	96,96
2	Melaksanakan pengujian kualitas air	Jumlah uji kualitas air							
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient	Jumlah uji kualitas udara ambient							
4	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pemantauan Lingkungan yang telah dilaksanakan

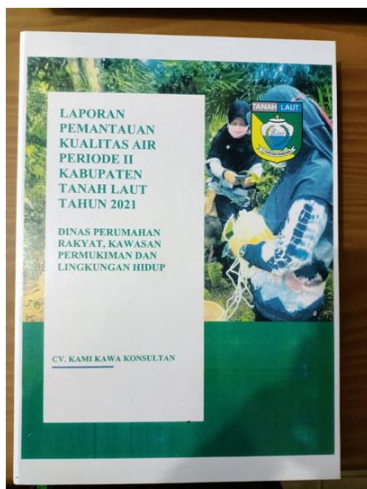
Perjanjian Kinerja Kasi PemantauanLingkungan tahun 2021 yaitu :

- Kinerja Utama Melaksanakan pengujian kualitas air dengan indikator Jumlah uji kualitasair dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%





Laporan Pemantauan Kualitas Air Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021



Laporan Pemantauan Kualitas Air Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

- a. Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah DO, BOD, TSS, Fecal Coli dan



Total Coliform.

- b. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 1.16 – 5.21 dimana terdapat 6 (enam) titik pantau dengan status cemar ringan dan 6 (enam) titik pantau dengan status cemar sedang.

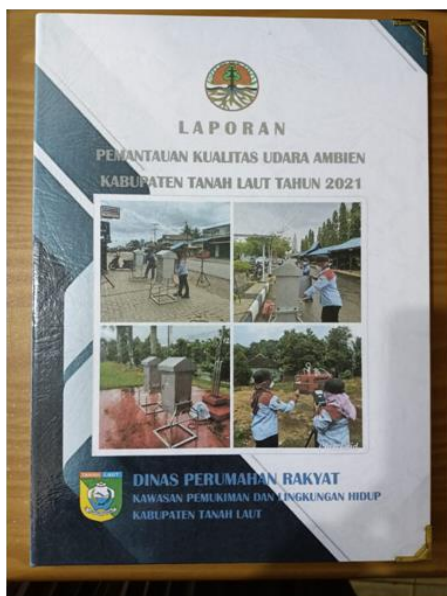


Dokumentasi Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air Tahun 2021

- c. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas I pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.71 – 5.70.



- d. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.21 – 3.13 dimana terdapat 6 (enam) titik pantau dengan status cemar ringan dan 6 (enam) titik pantau dengan status cemar sedang.
 - e. Dari hasil perhitungan Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) untuk 10 (sepuluh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Fecal Coliform, DO Total Fosfat, TSS, TDS, NH_3 , NO_3 dan pH dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai SISKANA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar 84.33 dengan kelas kategori baik.
4. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian kualitas udara ambient dengan indikator Jumlah uji kualitas udara ambient dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%



Laporan Pemantauan Kualitas Udara Ambient Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan perhitungan kualitas udara ambien dan kebisingan di 4 Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan



Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar berkategori Baik, namun terdapat juga kategori Sedang untuk parameter Sulfur dioksida (SO_2), kategori Tidak Sehat untuk parameter PM_{10} dan $\text{PM}_{2,5}$ dan kategori Sangat Tidak Sehat untuk parameter TSP di satu titik kawasan Padat Transportasi.
- c. Tingkat kebisingan di Kabupaten Tanah Laut pada 4 (Empat) titik pengukuran sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu dan hanya 1 (satu) titik pengambilan sampel yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu Kawasan Padat Transportasi.



Kawasan Perkantoran



Kawasan Pemukiman



Kawasan Industri

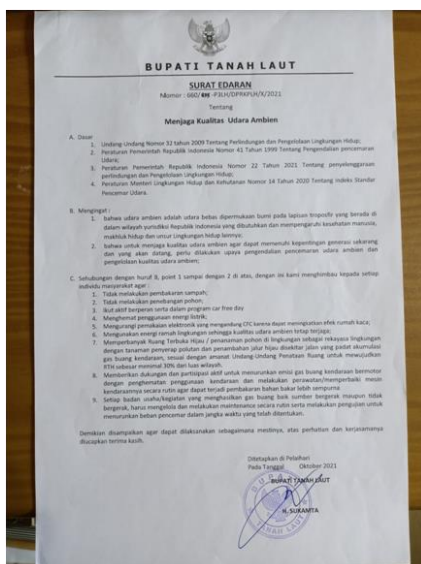


Kawasan Padat Transportasi



5. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan dengan indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi dengan target 11 Kecamatan 26 Skpd terealisasi 11Kecamatan 26 Skpd dengan capaian kinerja 100%, sosialisasi berupa surat Edaran Bupati Tanah Laut terkait kualitas lingkungan yang di kirimkan ke SKPD dan 11 Kecamatan di wilayah Tanah Laut :

a. Surat Edaran Bupati Tanah Laut perihal Menjaga dan Mengelola Kualitas Udara Ambien.



Surat Edaran Bupati tentang Menjaga Kualitas Udara Ambien Tahun 2021



Tanda Terima Surat Edaran Menjaga Kualitas Udara Ambien Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah Desa	Tgl penandatanganan
1	Padahari	22 x 1	10/01/2021
2	Batu Bati	14 x 1	10/01/2021
3	Lonrang	11 x 1	10/01/2021
4	Katu Ampar	14 x 1	10/01/2021
5	Kinab	14 x 1	10/01/2021
6	Takung	12 x 1	10/01/2021
7	Panyaman	11 x 1	10/01/2021
8	Bakun	9 x 1	10/01/2021
9	Sekeloa Uluang	9 x 1	10/01/2021
10	Pulau	11 x 1	10/01/2021
11	Bumi Mahmur	11 x 1	10/01/2021

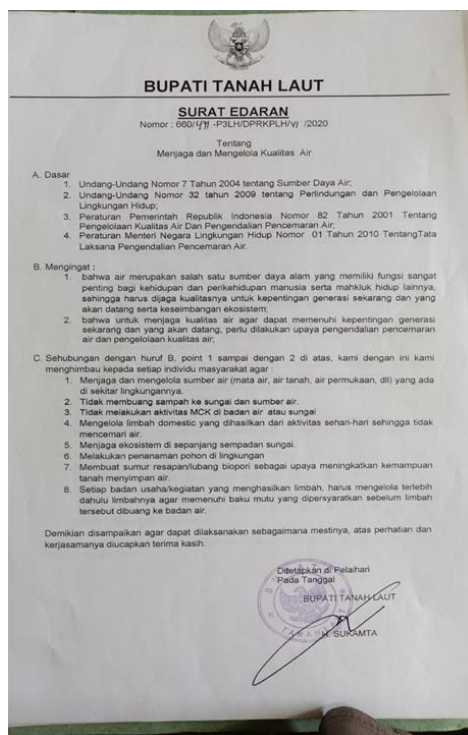
Tanda Terima Surat Edaran Menjaga Kualitas Udara Ambien Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah Desa	Tgl penandatanganan
1	Padahari	22 x 1	10/01/2021
2	Batu Bati	14 x 1	10/01/2021
3	Lonrang	11 x 1	10/01/2021
4	Katu Ampar	14 x 1	10/01/2021
5	Kinab	14 x 1	10/01/2021
6	Takung	12 x 1	10/01/2021
7	Panyaman	11 x 1	10/01/2021
8	Bakun	9 x 1	10/01/2021
9	Sekeloa Uluang	9 x 1	10/01/2021
10	Pulau	11 x 1	10/01/2021
11	Bumi Mahmur	11 x 1	10/01/2021

Tanda Terima Surat Edaran Bupati tentang Menjaga Kualitas Udara Ambien Tahun 2021

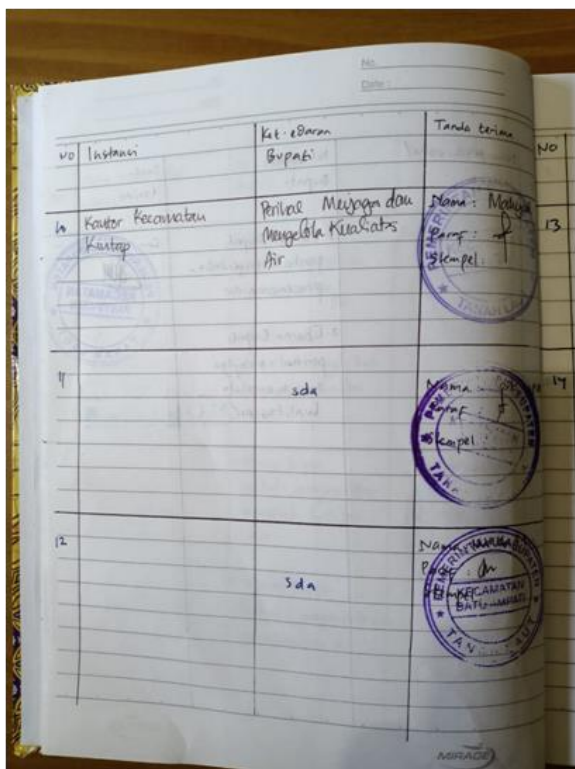
- d. Surat Edaran Bupati Tanah Laut perihal Menjaga dan Mengelola Kualitas Air.





Surat Edaran Bupati tentang Menjaga dan Mengelola Kualitas Air Tahun 2021





Tanda Terima Surat Edaran Bupati tentang Menjaga dan Mengelola Kualitas Air Tahun 2021

Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi Pemantauan Lingkungan dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 243.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 235.611.900 atau capaian sebesar 96,96%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kasi Pencemaran Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P3LH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 9 dengan indikator Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil



pengujian yang memenuhi baku mutu ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P3LH DPRKPLH nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Pencemaran Lingkungan , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Pencemaran Lingkungan didukung 0 orang PNS.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pencemaran Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Indikator Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
2.	Sasaran Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Indikator Jumlah uji kadar polusi limbah cair	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	100%
3.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Indikator Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pencemaran Lingkungan 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	100%
2	Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair	Jumlah uji kadar polusi limbah cair	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	1 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji	100%



3	Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100%
---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Pencemaran Lingkungan

Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri	Pengendalian Pencemaran Lingkungan		Rp -	Rp3.980.000	Rp69.980.000	Rp224.975.000	96,97
pengujian kadar polusi limbah cair	kadar polusi limbah cair							
Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pencemaran Lingkungan yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pencemaran Lingkungan tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri dengan indikator Jumlah uji emisi atau polusi udara akibat aktivitas industri dengan target 1 Dokumen Uji terealisasi 1 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%.
 - a. Waktu Kegiatan
Waktu kegiatan Uji Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dilaksanakan pengambilan sampel emisi dan uji emisi pada bulan Oktober 2021.
 - b. Tempat Kegiatan
Tempat kegiatan Uji Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dilaksanakan pada Pelaku Usaha/Pelaku Industri sebagai berikut:
 - 1) PT SMART di Kecamatan Kintap pada koordinat 03°47'26,65"S 115°16'59,81"E.
 - 2) PT Candi Artha di Kecamatan Batu Ampar pada koordinat 03°56'30,2"S 114°48'59,9"E.
 - 3) Koperasi Sawit Makmur di Kecamatan Batu Ampar pada koordinat 03°54'10,6"S 114°50'31,9"E.
 - c. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan pada kegiatan Uji Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dari pengukuran, sedangkan data sekunder



diperoleh dari literatur dan dokumentasi.

d. Metode Pengambilan Sampel Emisi dan Uji Emisi

Pengambilan sampel emisi mengacu SNI 19-1422-1989 dan SNI 19- 7117.2.2005. Alat uji emisi sumber tidak bergerak adalah alat monitoring gas buang pada cerobong asap industri baik uji gas (*flue gas analyzer*), debu (*stackdust sampler*) dan uji kepekatan asap (*smoke opacity meter*). Cara uji emisi mengacu SNI 19-7117.6-2005, SNI 19-7117.8-2005, SNI 19-7117.9-2005, SNI 19-7117.11-2005, SNI 19-7117.12-2005, US.EPA Method 6C dan 7E, dan KEP.205/BAPEDAL/1996. Uji emisi dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu menghidupkan alat uji emisi, menunggu hingga kondisi alat siap untuk digunakan, memasang probe uji dari alat kedalam lubang (hole) sampling, alat melakukan perisapan pengujian, dan perekaman hasil pengujian.

e. Analisis Perhitungan Beban Emisi

Data yang telah diperoleh berupa hasil pengujian sampel emisi sumber tidak bergerak dilakukan perhitungan beban emisi tahunan. Beban emisi adalah jumlah/nilai banyaknya zat pencemar yang dilepaskan ke udara ambien yang dinyatakan dalam satuan berat per waktu operasi pembangkit energi yang dapat diukur melalui cerobong. Beban emisi dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$BE = C \times Q \times 0,0036 \times \text{Op Hours} \dots (3.1)$$

$$Q = V \times A \dots (3.2)$$

Keterangan:

BE : Beban emisi pencemar (kg/waktu operasi)

C : Konsentrasi zat terukur (mg/Nm³)

Q : Laju alir emisi (gas buang) volumetrik (m³/detik)

0,0036 : Faktor konversi dari mg/detik ke kg/jam

Op Hours : waktu operasi

V : Laju alir (m/detik)

A : Luas penampang (m²)



Gambar Kegiatan Uji Emisi di PT SMART



Gambar Kegiatan Uji Emisi di Koperasi Sawit





Gambar Kegiatan Uji Emisi di PT Candi Artha

Beban Emisi Aktivitas Industri Tahun 2021

PARAMETER	BEBAN EMISI (TON/TAHUN)		
	PT. SMART	PT. Candi Artha	Koperasi Sawit Makmur
Partikulat	13,993	5,605	13,664
SO ₂	7,077	2,045	12,345
NO ₂	111,834	16,893	171,982



HCl	0,160	0,050	0,228
Cl ₂	0,008	0,003	0,011
NH ₃	0,145	0,046	0,176
HF	0,077	0,024	0,104

Saran himbauan yang dapat diberikan pada pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pada pelaku aktivitas industri sebagai berikut:
 - a) Menghilangkan atau mengurangi parameter pencemar akibat penggunaan bahan bakar fosil dengan cara mengganti bahan bakar yang ramah lingkungan.
 - b) Mengganti sistem operasi dengan potensi polutannya lebih rendah, misalnya penggunaan teknologi yang lebih efisien dan sistem bakar yang lebih baik.
 - c) Menggunakan alat pengolah atau pengendali pencemaran, maka pelepasan



emisi pencemar (polutan) minimal dapat memenuhi regulasi atau baku mutu.

d) Menanam berbagai jenis tanaman terutama yang menyerap emisi karbondioksida seperti pohon trembesi.

e) Memperhatikan tentang area atau lokasi pengambilan sampel terutama untuk tingkat keselamatan kerja pada area/lokasi pengambilan contoh uji emisi cerobong meliputi tangga, hole sampling dan lantai kerja.

2. Pada Instansi Pemerintah

a) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut memberikan tindakan persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan pada Pelaku Usaha/Pelaku Industri.

b) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut konsisten menggandeng laboratorium yang kredibel dalam pengujian emisi dengan parameter uji yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

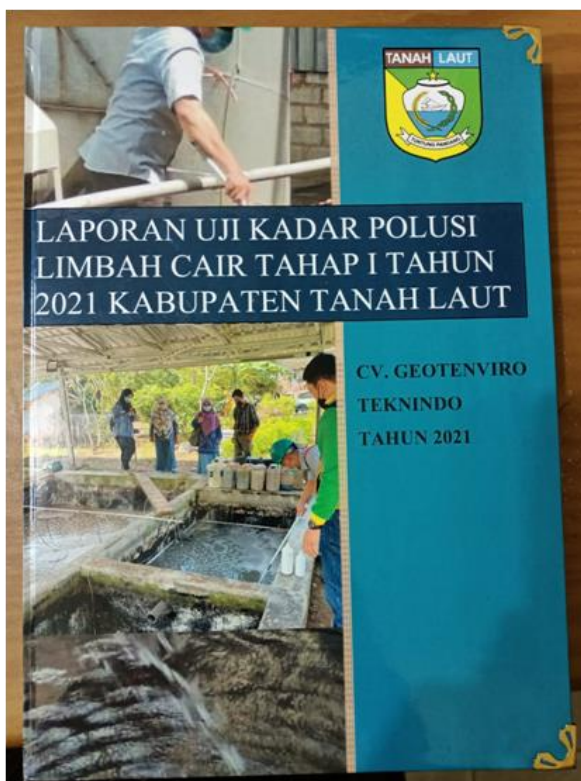
c) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut membuat database hasil uji emisi dari aktivitas industri di Kabupaten Tanah Laut, sehingga hasil analisis yang diberikan dapat lebih representatif dan komprehensif. Database merupakan kumpulan data secara periodik dari data primer berdasarkan pengukuran langsung yang diselenggarakan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dan data sekunder berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL dari seluruh Pelaku Usaha/ Pelaku Industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut.



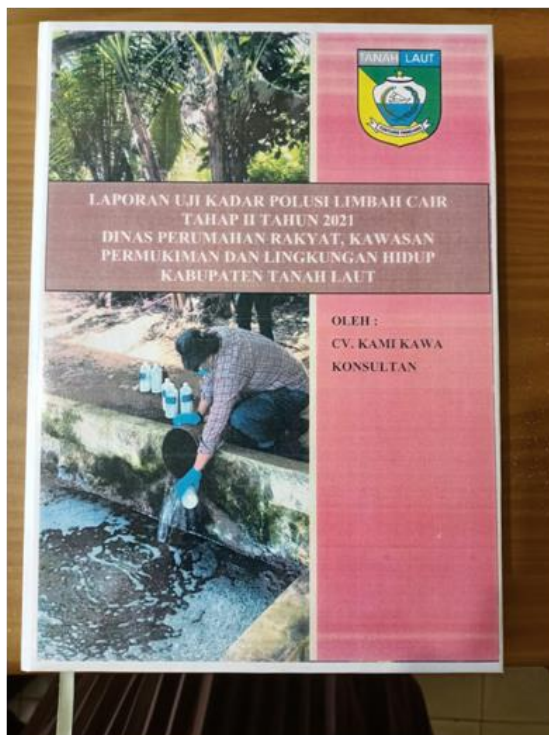
3. Rencana Aksi

- a) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan pengujian kadar emisi secara periodik/berkala untuk mengetahui hasil pengujian emisi tersebut dan membandingkannya terhadap baku mutu perundang-undangan.
- b) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menggandeng laboratorium yang kredibel dalam pengujian kadar emisi dengan mencakup parameter-parameter yang disyaratkan perundang-undangan tidak kurang dari tahun sebelumnya dan dapat ditambah sesuai situasi kondisi.

2. Kinerja Utama Melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair dengan indikator Jumlah uji kadar polusi limbah cair dengan target 2 Dokumen Uji terealisasi 2 Dokumen Uji dengan capaian kinerja 100%, dengan rincian hasil sebagai berikut :



Pengujian Kadar Polusi Limbah Cair Tahap I Tahun 2021



Pengujian Kadar Polusi Limbah Cair Tahap II Tahun 2021

1. Pengujian kadar polusi limbah cair dilaksanakan sebanyak 2 tahap.
2. Pengujian kadar polusi limbah cair tahap I dilaksanakan di :
Rumah Sakit Borneo Citra Medika, PT. Maju Perkasa Indonesia, PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk., PT. Japfa Comfeed Indonesia, PT. Bridgestone Kalimantan Plantation, PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, dan UD. Surya Baru.





Gambar Pengambilan Sampel Pada IPAL UD Surya Baru

3. Pengujian Kadar Polusi Limbah Cair Tahap II dilaksanakan di :
Rumah Sakit Borneo Citra Medika, PT. Maju Perkasa Indonesia, UD. Surya Baru, PT.
Candi Artha, dan PT. Karimata Timur.



Gambar Pengambilan Sampel Pada IPAL-PT Candi Artha

4. Pengujian Kadar Polusi Limbah Cair dengan cara pengambilan sampel pada inlet dan outlet IPAL air limbah serta melakukan pengujian sampel di laboratorium.



5. Berdasarkan LHU yang dikeluarkan oleh laboratorium, maka dapat diketahui kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah cair.
6. Kinerja Pengelolaan Limbah Cair oleh perusahaan dapat diketahui dengan melihat nilai parameter Limbah Cair sebelum dikelola (pada inlet) dan nilai parameter Limbah Cair setelah dilakukan pengelolaan (pada outlet) dengan melihat pada Baku Mutu Limbah Cair yang dipersyaratkan.
7. Metode Analisis Data

ANALISA KARAKTERISTIK AIR LIMBAH

Analisa karakteristik air limbah bertujuan untuk menganalisa kualitas air limbah sebelum dilakukan pengelolaan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) Laboratorium dengan melakukan perbandingan setiap parameter kualitas air dengan baku mutunya. Dari hasil analisa ini dapat diketahui sifat dan parameter kualitas air yang melebihi baku mutu sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan metode pengelolaan air limbah pada unit pengelolaan.

ANALISA KUALITAS AIR LIMBAH HASIL PENGELOLAAN

Analisa kualitas air limbah hasil pengelolaan bertujuan untuk menganalisa kualitas air limbah setelah dilakukan pengelolaan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) Laboratorium dengan melakukan perbandingan setiap parameter kualitas air dengan baku mutunya. Dari hasil analisa ini dapat diketahui sifat dan parameter kualitas air limbah hasil pengelolaan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi terkait kualitas air tersebut apakah telah memenuhi persyaratan untuk dialirkan ke lingkungan.

ANALISA EFISIENSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Analisa efisiensi pengelolaan air limbah bertujuan untuk menganalisa efisiensi pengelolaan air limbah dengan melakukan analisa trend parameter kualitas air dari sebelum dan setelah dilakukan pengelolaan. Dari hasil analisa ini dapat diketahui efisiensi pengelolaan setiap parameter kualitas air limbah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi terkait metode pengelolaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah.

ANALISA BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER TERTENTU

Analisa beban pencemar dari sumber tertentu bertujuan untuk menghitung besaran pencemaran air yang berasal dari unit pengolahan air limbah yang memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang mengalir ke perairan. Data yang dihasilkan adalah beban pencemaran dengan perkiraan 1 tahun/periode dari sumber tertentu dengan perhitungan sebagai berikut :



$$I_i = C_i \times V \times \text{OpHrs} / 1\,000\,000$$

Dimana ,

I_i = besar beban/ emisi pencemar i, kg/tahun

C_i = konsentrasi jenis pencemar i dalam buangan air limbah, mg/L (data pemantauan di lapangan)

V = laju alir buangan air limbah, L/jam

OpHrs = jumlah jam operasional per tahun, jam/tahun

1 000 000 = faktor konversi, mg/kg

Hasil Pengujian Limbah Cair Tahap I :

1. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL – 01 Rumah Sakit Borneo Citra Medika sebesar 80 % berdasarkan jumlah parameter yang terkelola dengan baik sebanyak 8 parameter dari total 10 parameter yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu dari sebanyak 6 parameter (TDS, TSS, BOD5, COD, Detergen dan Minyak dan Lemak) ditambah dengan parameter pH dan parameter PO4 dimana walaupun nilai pH mengalami peningkatan dan nilai PO4 yang tidak mengalami perubahan setelah dilakukan pengelolaan namun nilai dan kandungan tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
2. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL – 01 Rumah Sakit Borneo Citra Medika memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TDS sebesar 1.590.41 kg/tahun, COD sebesar 353.54 kg/tahun, NH3 (Amoniak) sebesar 184.83 kg/tahun, TSS sebesar 38.97 kg/tahun, BOD5 sebesar 36.18 kg/tahun dan Minyak dan Lemak sebesar 12.18 kg/tahun.
3. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL WWTP PT. Bridgestone Kalimantan Plantation sebesar 100 % dimana semua parameter terkelola dengan baik yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu sebanyak 5 parameter (TSS, BOD5, COD, N Total dan NH3) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.



4. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL WWTP PT. Bridgestone Kalimantan Plantation memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan COD sebesar 1828.28 kg/tahun, TSS sebesar 1180.40 kg/tahun, BOD5 sebesar 441.74 kg/tahun, N Total sebesar 340.17 kg/tahun dan NH3 (Amoniak) sebesar 0.97 kg/tahun.
5. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL PT. Charoen Pokphand Jaya Farm sebesar 57 % berdasarkan jumlah parameter yang terkelola dengan baik sebanyak 4 parameter dari total 7 parameter yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu dari sebanyak 3 parameter (BOD5, NH3 (Amoniak), Minyak dan Lemak) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan namun nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
6. Untuk perhitungan beban sumber pencemar air tertentu yang dialirkan melalui IPAL PT. Charoen Pokphand Jaya Farm masih belum dapat dihitung dikarenakan alat ukur debit sedang rusak dan masih menunggu pengadaan alat ukur debit yang baru.
7. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL WWTP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 100 % dimana semua parameter terkelola dengan baik yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu sebanyak 5 parameter (TSS, BOD5, COD, NH3 – N (Amoniak - Nitrogen), Minyak dan Lemak) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
8. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL WWTP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan COD sebesar 227.32 kg/tahun, Minyak dan Lemak sebesar 353,54 kg/tahun, BOD5 sebesar 82.96 kg/tahun, TSS sebesar 82.10 kg/tahun dan NH3 – N (Amoniak - Nitrogen) sebesar 0.34 kg/tahun.
9. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL – 01 PT. Japfa Comfeed Kalimantan Tbk sebesar 43 % berdasarkan jumlah parameter



yang terkelola dengan baik sebanyak 3 parameter dari total 7 parameter yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu dari sebanyak 2 parameter (TDS dan NH₃ – N) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan namun nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.

10. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL – 01 PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TDS sebesar 178.26 kg/tahun, COD sebesar 11.64 kg/tahun, kandungan TSS sebesar 8.26 kg/tahun, Minyak dan Lemak sebesar 1.05 kg/tahun, BOD5 sebesar 1.05 kg/tahun dan NH₃ – N (Amoniak – Nitrogen) sebesar 0.05 kg/tahun.
11. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL PT. Maju Perkasa Indonesia sebesar 83 % berdasarkan jumlah parameter yang terkelola dengan baik sebanyak 5 parameter dari total 6 parameter yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu dari sebanyak 4 parameter (TSS, Fe Total, Mn Total dan Cd Total) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan namun nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
12. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL PT. Maju Perkasa Indonesia memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TDS sebesar 563.59 kg/tahun, TSS sebesar 3.21 kg/tahun, Fe Total sebesar 0.37 kg/tahun, Mn Total sebesar 0.07 kg/tahun dan Cd Total sebesar 0.05 kg/tahun.
13. Dari hasil analisa efisiensi diketahui bahwa efisiensi pengelolaan pada IPAL – 01 UD. Surya Baru sebesar 100 % dimana semua parameter terkelola dengan baik yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu sebanyak 3 parameter (TSS, BOD5 dan COD) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
14. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi



diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL – 01 UD. Surya Baru memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan BOD5 sebesar 1.1 kg/tahun, TSS sebesar 4.99 kg/tahun dan kandungan COD sebesar 6.83 kg/tahun.

Hasil Analisa Pengujian pada Polusi Limbah Cair Tahap II :

1. Dari hasil analisa nilai efisiensi pengelolaan pada IPAL – 01 Rumah Sakit Borneo Citra Medika sebesar 56 % berdasarkan jumlah paramater yang terkelola dengan baik sebanyak 4 parameter dari total 9 parameter yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu sebanyak 3 parameter (TDS, TSS, dan Minyak dan Lemak) ditambah dengan parameter pH yang masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
2. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL – 01 Rumah Sakit Borneo Citra Medika memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TDS sebesar 2325.57 kg/tahun, COD sebesar 961.62 kg/tahun, BOD sebesar 496.27 kg/tahun, NH3 (Amoniak) sebesar 228.20 kg/tahun, TSS sebesar 41.24 kg/tahun, Minyak dan Lemak sebesar 18.56 kg/tahun dan surfaktan 0.96 mg/l.
3. Dari hasil analisa nilai efisiensi pengelolaan pada IPAL – 01 UD. Surya Baru sebesar 100 % dimana semua paramater terkelola dengan baik yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu sebanyak 3 parameter (TSS, BOD5 dan COD) ditambah dengan parameter pH walaupun mengalami peningkatan nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.
4. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL – 01 UD. Surya Baru memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TSS sebesar 2.31 kg/tahun, COD sebesar 1.66 kg/tahun dan BOD5 sebesar 1.46 kg/tahun.
5. Dari hasil analisa nilai efisiensi pengelolaan pada IPAL PT. Maju Perkasa Indonesia sebesar 100 % berdasarkan jumlah paramater yang terkelola dengan baik sebanyak 5 parameter yang terdiri dari jumlah parameter yang mengalami



penurunan konsentrasi dan memenuhi baku mutu dari sebanyak 3 parameter (TSS, Fe Total dan Mn Total) ditambah dengan kandungan Cd Total yang tidak mengalami perubahan namun masih memenuhi baku mutu dan parameter pH walaupun mengalami peningkatan namun nilai tersebut masih memenuhi baku mutu sehingga dapat diasumsikan pengelolaan masih bersifat efisien.

6. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL PT. Maju Perkasa Indonesia memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TSS sebesar 11.58 kg/tahun, Fe Total sebesar 0.08 kg/tahun, Mn Total sebesar 0.15 kg/tahun dan Cd Total sebesar 0.02 kg/tahun.
7. Dari hasil analisa nilai efisiensi pengelolaan pada IPAL - 01 PT. Candi Artha sebesar 50 % dimana walaupun semua parameter mengalami penurunan konsentrasi namun terdapat beberapa parameter yang masih melebihi baku mutu yang terdiri dari TSS, BOD5 dan COD sehingga diasumsikan pengelolaan masih belum efisien.
8. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun IPAL – 01 PT. Candi Artha memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan TSS sebesar 60811.24 kg/tahun, COD sebesar 43646.17 kg/tahun, BOD5 sebesar 4799.07 kg/tahun, N Total sebesar 310.33 kg/tahun, Minyak dan Lemak sebesar 222.56 kg/tahun.
9. Dari hasil analisa nilai efisiensi pengelolaan pada SP - 01 PT. Karimata Timur sebesar 50 % dimana parameter TSS mengalami penurunan konsentrasi ditambah dengan kondisi pH yang masih berada pada range normal dan memenuhi baku mutu namun terdapat beberapa parameter yang mengalami peningkatan konsentrasi mengakibatkan parameter melebihi baku mutu yang terdiri dari parameter BOD5 dan COD sehingga diasumsikan pengelolaan masih belum efisien.
10. Dari hasil perhitungan beban pencemar air tertentu dengan metode estimasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun SP – 01 PT. Karimata Timur memberikan kontribusi beban pencemar ke perairan untuk kandungan COD sebesar 4822.42 kg/tahun, BOD5 sebesar 3233.38 kg/tahun dan TSS sebesar 662.4 kg/tahun.



Rencana Aksi

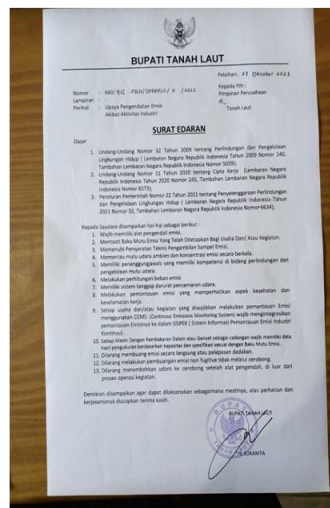
1. Melakukan inventarisasi aliran dari sumber pencemar hingga ke perairan



2. Membuat batasan besaran sumber pencemar dari pelaku usaha berdasarkan daya tampung beban pencemar sungai
3. Melakukan kajian lebih lanjut terkait dampak pada sungai akibat beban sumber pencemar air tertentu dari pelaku usaha

Bagi Pelaku Usaha agar :

1. Melakukan metode pengelolaan berdasarkan karakteristik air limbah
 1. Menjaga kualitas hasil pengelolaan air limbah untuk selalu memenuhi baku mutu
 2. Mengoptimalkan pengelolaan untuk menurunkan beban pencemar sumber air tertentu dari setiap unit pengelolaan
 3. Melakukan pengelolaan lanjutan terkait dampak pada sungai akibat beban sumber pencemar air tertentu dari pelaku usaha
 4. Menerapkan metode *Jar Test* untuk menentukan dosis bahan kimia yang digunakan
3. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang tersosialisasi dengan target 25 Pelaku Usaha terealisasi 25 Pelaku Usaha dengan capaian kinerja 100% dengan mensosialisasikan Edaran Bupati Tanah Laut perihal upaya pengendalian pencemaran air dan upaya pengendalian emisi akibat aktivitas industri.



Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Upaya Pengendalian Pencemaran Air dan Upaya Pengendalian Emisi Akibat Aktivitas Industri Tahun 2021



Tanda Terima Surat Edaran Bupati tentang Upaya Pengendalian Pencemaran Air dan Upaya Pengendalian Emisi Akibat Aktivitas Industri Tahun 2021



Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada **Kasi Pencemaran Lingkungan** dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan.atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar

Rp232.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 224.975.000 atau capaian sebesar 96,97%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kasi Kerusakan Lingkungan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid P3LH DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 9 dengan indikator Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid P3LH DPRKPLH nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Kerusakan Lingkungan , dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Kerusakan didukung 1 orang PNS.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kerusakan Lingkungan

N o	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Indikator Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Sasaran Melaksanakan sosialisasi pendampingan kerusakan lingkungan	Indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi	100%
3	Sasaran Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Indikator Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik	20 Titik	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Kerusakan Lingkungan 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

[illegible]

BAB III AKUNTABILITAS

3	Melaksana kan uji laboratori um sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji	20 Titik	20 Titik	20 Titik	20 Titik	20 Titik	100%
---	--	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 144.999.900	Rp -	Rp4.483.200	Rp8.906.400	Rp129.290.000	89,17
2	Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan	Jumlah kecamatan/skpd yang tersosialisasi							
3	Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan	Jumlah Sampel Yang di Uji							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Kerusakan Lingkungan yang telah dilaksanakan

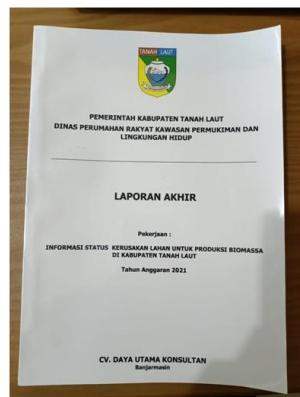
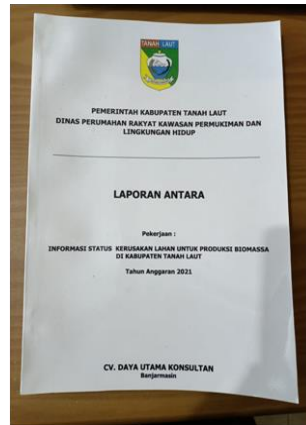
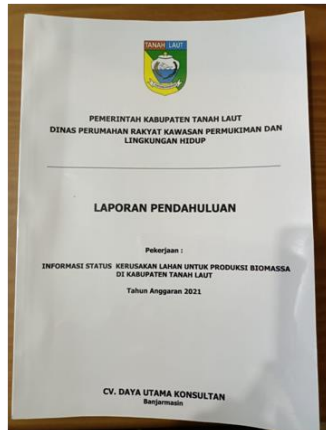
Perjanjian Kinerja Kasi Kerusakan Lingkungan 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan kajian informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa dengan indikator Jumlah dokumen informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di seluruh kecamatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan status kerusakan tanah terbagi atas dua kelompok lahan, yaitu lahan basah dan lahan kering.
2. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut adalah Rusak Ringan (*R.I*).
3. Faktor pembatas utama pada lahan basah memiliki faktor pembatas berupa berat isi (*d*), sedangkan pada lahan basah memiliki faktor pembatas Redoks Tanah Berpirit (*Rp*).
4. Rekomendasi untuk mencegah kerusakan tanah antara lain mempertahankan luasan areal pertanian yang telah ada sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut dengan tetap mempertahankan sumberdaya lahan basah dan penerapan konservasi tanah dan air dalam budidaya tanaman pertanian pada lahan kering.

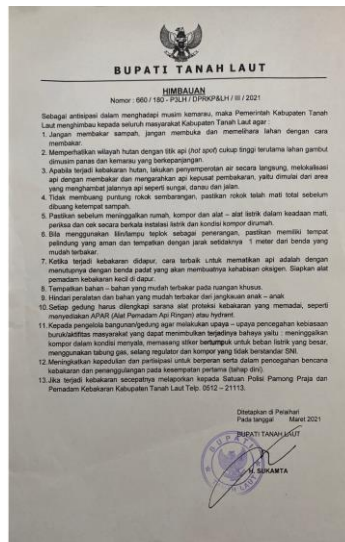
BAB III AKUNTABILITAS



Laporan Informasi Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

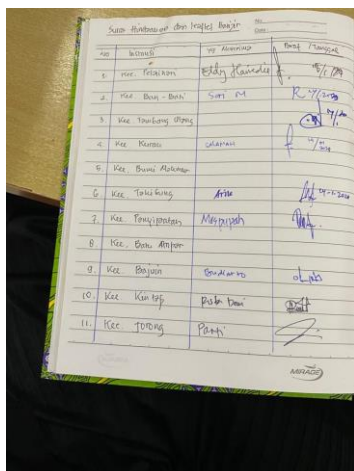
2. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan dengan indikator Jumlah kecamatan/ skpd yang tersosialisasi dengan target 26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi terealisasi 26 skpd dan kecamatan yang tersosialisasi dengan capaian kinerja 100%, sosialisasi berupa surat edaran Bupati Tanah Laut tentang pencegahan kerusakan lingkungan.

BAB III AKUNTABILITAS



Dipindai dengan CamScanner

Surat Himbauan Bupati Tanah Laut tentang Antisipasi Kebakaran Hutan di Musim Kemarau di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021



Tanda Terima Surat Himbauan Bupati Tanah Laut tentang Antisipasi Kebakaran Hutan di Musim Kemarau di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

3. Kinerja Utama Melaksanakan uji laboratorium sampel kerusakan lingkungan dengan

indikator Jumlah Sampel Yang di Uji dengan target 20 Titik terealisasi 20 Titik dengan capaian kinerja 100%.



Seluruh Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Kasi **Kasi Kerusakan Lingkungan** dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

dengan kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 144.999.900 dengan realisasi sebesar Rp 129.290.000 atau capaian sebesar 89,17%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

3.d. Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program dan kegiatan yaitu :

1. Program Kawasan Permukiman dengan 1 (satu) kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan 1 (satu) sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Program sebesar Rp. 2.793.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.793.665.000 atau 100%
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan 1 (satu) kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan 2 (dua) sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan anggaran program sebesar Rp. 24.111.576.687,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.480.247.476,00 atau 97,38 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 11 orang.

Sedangkan Tahun 2020 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp **2.679.195.350,00** dan terealisasi sebesar Rp 2.442.025.650,00 atau 91.15% .Untuk mencapai kegiatan ini didukung



dengan jumlah SDM sebanyak 10 orang dengan anggaran pada APBD murni 2021 sebesar Rp. **5.964.194.939,00** namun karena adanya wabah covid-19 terjadi refocusing anggaran menjadi Rp 2.442.025.650,00 , sehingga terjadi penurunan anggaran sebesar 55 % dari APBD murni, dan dengan adanya penurunan anggaran/refocusing tersebut terdapat pencapaian 1 (satu) indikator dibawah 100 % yaitu indikator Presentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang capaiannya hanya sebesar 43,60% dengan capaian rata-rata indikator pada Bidang Perkim sebesar 86,3% .

Bila dibanding tahun 2020 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 416,19 % sedangkan jumlah SDM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat penambahan sebanyak 1 orang.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 10 Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Indikator 16 Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%
2.	Sasaran 11 Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Indikator 17 Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	142,85% (10 KP)	142,85%
3.	Sasaran 12 Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Indikator 18 Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	-	-



Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	-	63,6% (318 Unit)	124,2% (621 Unit)	43,60% (218 Unit)	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%
2	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	42,85% (3 KP)	200% (14 KP)	129% (9 KP)	100% (7 KP)	142,85% (10 KP)	142,85%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	100%	-	-

3.d.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 10

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 10 Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Indikator 16 Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100% (500 Unit)	64,80% (324 Unit)	64,80%

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang



layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan indikator sasaran Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)) capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% (500 Unit) namun hanya terealisasi sebesar 64,80% (324 Unit). Dimana untuk mencapai target ini bersumber dari dana APBD Murni dan DAK Penugasan dari Kementrian PUPR dengan rincian sebagai berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

N o	Program/Kegiat an	Lok asi	Tar get SK (U nit)	Realisa si (Unit)	Tahun Pelaksana an	Sum ber Da na	Dana
1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Desa Atu-Atu	15	15	20 21	D A K	300.000.000
		Kel. Angsau	19	19			380.000.000
		Kel. Pelaihari	15	15			300.000.000
		Kel. Karang Taruna	18	18			360.000.000
		TUNGKARAN	18	18			0 360.000.00
		PANGGUNG	18	18			0 360.000.00
		AMBUNGAN	15	15			0 300.000.00
		UJUNG BATU	15	15			0 300.000.00
2	BANTUAN SOSIAL BEDAH RUMAH	TOT AL	13 3	133	20 21	APBD KABUPATE N	
		AMBUNGAN	12	11			240.000.000
		BUMI JAYA	10	10			200.000.000
		ATU-ATU	3	3			60.000.000
		SARANG HALANG	1	1			20.000.000
		PELAIHARI	7	7			140.000.000
		ANGSAU	1	1			20.000.000
		KARANG TARUNA	1	1			20.000.000
		UJUNG BATU	8	8			160.000.000
		KETAPANG	2	2			40.000.000
		BAJUIN	1	0			-
		KUNYIT	9	6			0 180.000.00
		PEMALONGAN	1	1			20.000.000
		TIRTA JAYA	3	3			60.000.000
		GUNUNG MAS	5	4			0 100.000.00
		GUNUNG MELATI	8	6			0 160.000.00

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	KURAU	33	33			0	660.000.00
	SARIKANDI	8	8			0	160.000.00
	HANDIL BIRAYANG ATAS	8	8			0	160.000.00
	HANDIL BABIRIK	11	11			0	220.000.00
	HANDIL MALUKA	2	2				40.000.000
	BENUA RAYA	11	11			0	220.000.00
	KAIT-KAIT	2	2				40.000.000
	SUNGAJ JELAI	1	1				20.000.000
	MARTADAH BARU	10	10			0	200.000.00
	KANDANGAN LAMA	8	8			0	160.000.00
	KURINGKIT	4	4				80.000.000
	SWARANGAN	6	6			0	120.000.00
	ALUR	8	8			0	160.000.00
	PASIR PUTIH	6	6			0	120.000.00
	TAKISUNG	1	1				20.000.000
	RANGGANG	1	1				20.000.000
	TELAGA LANGSAT	8	8			0	160.000.00
	TOTAL	200	191				3.820.000.000
	TOTAL KESELURUHAN	333	324				6.480.000.000

Dari total kesuruhan rencana perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 333 unit rumah terealisasi sebanyak 324 unit rumah, tidak terserap sepenuhnya dikarenakan untuk dana bansos ada 9 penerima bantuan yg tidak dapat disalurkan dengan alasan penerima bantuan yang tertuang dalam SK karena sdh mendapatkan bantuan yang serupa dari instansi lain ataupun swasta dan sudah berpindah tempat tinggal.



3.d.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 11

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 11 Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Indikator 17 Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100% (7 KP)	142,85% (10 KP)	142,85%

Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatkan kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator sasaran Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 142,85% (10 KP) melalui program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Hal ini dikarenakan para pengembang sudah menyerahkan sertifikat fasum pada kompleks perumahan yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah daerah khusus nya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat melakukan pemeliharaan/peningkatan PSU yang ada pada perumahan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen PSU	Realisasi (Meter/Unit)	Target (Meter/Unit)	Ket.
1	Pemasangan Paving Block Jalan Lingkungan Komplek Roemah Legenda dan Gang Aman Kelurahan Karang Taruna	563.2	519.5	m2
2	Pengaspalan Jalan Lingkungan Graha Banua Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari	333	270.3	Meter
3	Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Griya Permata Dua Kecamatan Bati-Bati	284	238.1	Meter
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Griya Pesona Bintang	333	270.3	Meter
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Bakunci Kelurahan Karang Taruna	328	270.3	Meter
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Ratu Graha Asri Kel. Angsau Kec. Pelaihari	262	270.3	Meter



7	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Sarang HalangResidence RT.7 RW.1 Ambawang Kelurahan Sarang Halang	468	270.3	Meter
8	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Cahaya BanyuBanua, Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati	439	403.6	Meter
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan ManggaPermai Residence Kelurahan Sarang Halang	263	270.3	Meter
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah2 Pelaihari	294	270.3	Meter

3.d.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 12

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.	Sasaran 12 Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Indikator 18 Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	-	-

Di Kabupaten Tanah Laut pada awal tahun 2021 terjadi bencana alam banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Tim Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pendataan cepat terhadap rumah yang terdampak bencana tersebut. Dari hasil pendataan tersebut Tim Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah rusak ringan, rusak sedang sampai rusak berat dan terakomodir sebanyak 512 rumah korban bencana melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mata anggarannya ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Terhadap pencapaian sasaran strategis nomor 12 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021, memang tidak memiliki anggaran dan Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten dan baru akan melakukan penganggaran pada Tahun 2022 melalui Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10,11,12 Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Data dan



Perencanaan Perkim dan Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kasi Data dan Perencanaan Perkim

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 10,11,12 dilaksanakan melalui Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman idup dengan kegiatan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH nomor 10,11,12 didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kasi Data dan Perencanaan Perkim, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Data dan Perencanaan Perkim didukung 1 orang PNS dan 1 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Data dan Perencanaan Perkim

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran	Indikator	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman			
2.	Sasaran Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Indikator Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	500 Unit	333 Unit	66,6%
3.	Sasaran Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Indikator Jumlah data rumah tidak layak huni	500 Unit	4.292 Unit	751%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Data dan Perencanaan Perkim 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	-	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi	318 Unit	621 Unit	218 Unit		500 Unit	333 Unit	66,6%
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah data rumah tidak layak huni	-	1.921 Unit	4.754 Unit		500 Unit	4.292	751%

Tabel Pencapaian Program Kegiatan Kasi Data dan Perencanaan Perkim

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2021				Triwulan IV	(%)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 1.311.648.224,00	Rp 7.200.000	Rp 48.827.260	Rp 86.158.336	Rp 1.120.991.940		84,46
2	Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni	Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi								
3	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data	Jumlah data rumah tidak layak huni								

bidang perumahan dan kawasan permukiman									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Data dan Perencanaan Perkumuh yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Data dan Perencanaan tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100% Untuk tahun 2021 dokumen yang diterbitkan yaitu RP2KPKPK yang mencakup keseluruhan tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh

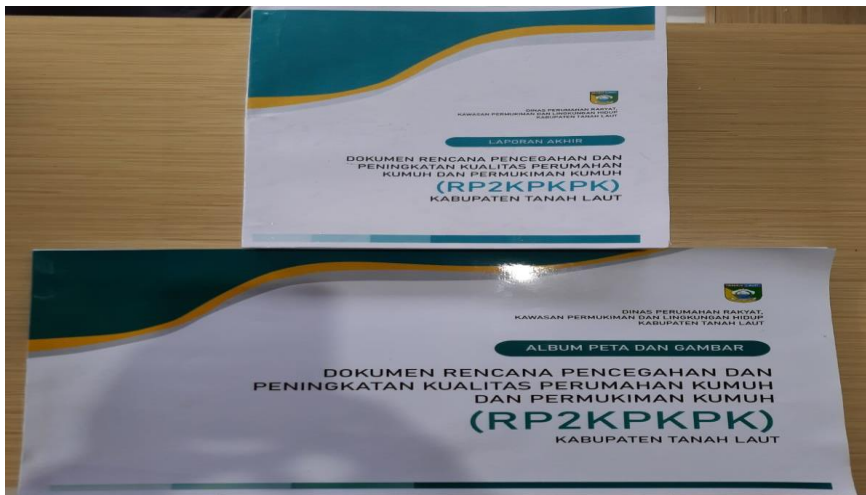


Foto Dokumen RP2KPKPK

2. Kinerja Utama Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni dengan indikator

Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi dengan target 500 KK terealisasi 333 KK dengan capaian kinerja 66,6%

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Peserta Sosialisasi (KK)
1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Desa Atu-Atu	15
		Kel. Angsau	19
		Kel. Pelaihari	15
		Kel. Karang Taruna	18
		TUNGKARAN	18
		PANGGUNG	18
		AMBUNGAN	15
		UJUNG BATU	15
2		TOTAL	133
	BANTUAN SOSIAL BEDAH RUMAH	AMBUNGAN	12
		BUMI JAYA	10
		ATU-ATU	3
		SARANG HALANG	1
		PELAIHARI	7
		ANGSAU	1
		KARANG TARUNA	1
		UJUNG BATU	8
		KETAPANG	2
		BAJUIN	1
		KUNYIT	9
		PEMALONGAN	1
		TIRTA JAYA	3
		GUNUNG MAS	5
		GUNUNG MELATI	8
		KURAU	33
		SARIKANDI	8
		HANDIL BIRAYANG ATAS	8
		HANDIL BABIRIK	11

BAB III AKUNTABILITAS

	HANDIL MALUKA	2
	BENUA RAYA	11
	KAIT-KAIT	2
	SUNGAI JELAI	1
	MARTADAH BARU	10
	KANDANGAN LAMA	8
	KURINGKIT	4
	SWARANGAN	6
	ALUR	8
	PASIR PUTIH	6
	TAKISUNG	1
	RANGGANG	1
	TELAGA LANGSAT	8
	TOTAL	200
	TOTAL KESELURUHAN	333



Foto sosialisasi perumahan tidak layak huni

3. Kinerja Utama Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan Kawasan permukiman dengan indikator Jumlah data rumah tidak layak huni dengan target 500 unit terealisasi 4.292 Unit dengan capaian kinerja sebesar 858,4% dengan rincian sebagai berikut:

PENDATAAN RTLH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JUMLAH RUMAH	
			KESELURUHAN	RTLH

BAB III AKUNTABILITAS

1	BAJUIN	1	Bajuin	77
		2	Galam	26
		3	Ketapang	16
		4	Kunyt	3
		5	Pemalongan	41
		6	Sungai bakar	108
		7	Tanjung	33
		8	Tebing Siring	12
		9	Tirta jaya	25
			Total	341
2	BATI-BATI	1	Benua Raya	30
		2	Banyu Irang	53
		3	Bati-bati	48
		4	Bentok Darat	18
		5	Bentok Kampung	16
		6	Kait-Kait	92
		7	Kait-Kait Baru	36
		8	Liang Anggang	12
		9	Nusa Indah	17
		10	Padang	65
		11	Pandahan	28
		12	Sambangan	42
		13	Ujung	40
		14	Ujung Baru	12
			Total	509
3	BATU AMPAR	1	Batu Ampar	80
		2	Ambawang	4
		3	Bluru	5
		4	Damar Lima	8
		5	Damit	7
		6	Damit Hulu	9
		7	Durian Bungkok	37
		8	Gunung Mas	10
		9	Gunung Melati	16
		10	Jilatan	36
		11	Jilatan Alur	40
		12	Pantai Linuh	12
		13	Tajau Mulya	26
		14	Tajau Pecah	0
			Total	290
4	BUMI MAKMUR	1	Bumi Harapan	9
		2	Handil Babirik	0
		3	Handil Birayang Atas	0

BAB III AKUNTABILITAS

		4	Handil Birang Bawah	10
		5	Handil Gayam	24
		6	Handil Labuan (Amas)	43
		7	Handil Maluka	11
		8	Handil Suruk	13
		9	Kurau Utara	51
		10	Pantai Harapan	40
		11	Sungai Rasau	51
			Total	252
5	JORONG	1	Jorong	4
		2	Alur	38
		3	Asam-Asam	50
		4	Asam Jaya	16
		5	Asri Mulya	17
		6	Batalang	31
		7	Karang Rejo	5
		8	Muara Asam-Asam	13
		9	Sabuhur	32
		10	Simpang Empat (sungaibaru)	4
		11	Swarangan	9
			Total	219
6	KINTAP	1	Kintap	30
		2	Bukit Mulya	6
		3	Kebun Raya	5
		4	Kintap Kecil	13
		5	Kintap Pura	20
		6	Mekar Sari	23
		7	Muara Kintap	5
		8	Pandan Sari	9
		9	Pasir Putih	7
		10	Riam Adungan	13
		11	Salaman	29
		12	Sebamban Baru	18
		13	Sungai Cuka	
		14	Sumber Jaya	10
			Total	188
7	KURAU	1	Kurau	21
		2	Bawah Layung	41
		3	Handil Negara	20
		4	Kali Besar	30
		5	Maluka Baulin	41
		6	Padang Luas	32
		7	Raden	33

BAB III AKUNTABILITAS

		8	Sarikandi		30
		9	Sungai Bakau		40
		10	Tambak Karya		31
		11	Tambak Sarinah		31
			Total		350
8	PANYIPATAN	1	Panyipatan		147
		2	Batakan		286
		3	Batu Mulya		52
		4	Batu Tungku		75
		5	Bumi Asih		32
		6	Kandangan Baru		109
		7	Kandangan Lama		93
		8	Kuringkit		52
		9	Suka Ramah		86
		10	Tanjung Dewa		48
			Total		980
9	PELAIHARI	1	Pelaihari		31
		2	Karang Taruna		29
		3	Angsau		12
		4	Pabahanan		18
		5	Sarang Halang		20
		6	Ambungan		40
		7	Atu-Atu		13
		8	Bumi Jaya		10
		9	Guntung Besar		15
		10	Kampung Baru		25
		11	Panggung		15
		12	Panggung Baru		15
		13	Panjaratan		15
		14	Pemuda		16
		15	Sungai Riam		25
		16	Sumber Mulia		66
		17	Tampang		20
		18	Telaga		15
		19	Tungkaran		51
		20	Ujung Batu		2
			Total		453
10	TAKISUNG	1	Takisung		35
		2	Benua Lawas		44
		3	Benua Tengah		62
		4	Batilai		17
		5	Gunung Makmur		35
		6	Kuala Tambangan		30

BAB III AKUNTABILITAS

		7	Pagatan Besar		74
		8	Ranggang		24
		9	Ranggang Dalam		22
		10	Sumber Makmur		24
		11	Tabanio		27
		12	Telaga Langsung		15
				Total	409
11	TAMBANG ULANG	1	Tambang Ulang		41
		2	Bingkulu		32
		3	Gunung Raja		15
		4	Kayu Abang		36
		5	Martadah		13
		6	Martadah Baru		12
		7	Pulau Sari		19
		8	Sungai Jelai		55
		9	Sungai Pinang		83
				Total	306
	TOTAL	135	TOTAL KESELURUHAN		4292



Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 10,11,12 dilaksanakan melalui Program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan sub

kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH nomor 10,11,12 didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim, dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim didukung 1 orang PNS dan 3 orang PTT , dan 8 tenaga fasilitator lapangan dari dana APBD dan 4 orang dari dana DAK

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemanfaatan Perkim

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Indikator Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	500 KK	324 Unit	64,80 %
2.	Sasaran Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun	7 KP	10 KP	142.85 %
3.	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	7 Komplek Perumahan	10 Komplek Perumahan	142.85 %
4.	Sasaran Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Indikator Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Sasaran Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Indikator Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	6 Rekomendasi izin mendirikan rumah	85,71 %

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pemanfaatan Perkim 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah	318 KK	621 KK	218 KK	500 KK	324 Unit	64,80 %
2	Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	3 Komplek Perumahan	11 Komplek Perumahan	9 Komplek Perumahan	7 KP	10 KP	142.85 %
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara	3 Komplek Perumahan	11 Komplek Perumahan	9 Komplek Perumahan	7 Komplek Perumahan	10 Komplek Perumahan	142.85 %
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan dilaksanakan	Jumlah data rumah yang telah divalidasi dan verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RT/RW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RT/RW	5 Rekomendasi izin mendirikan rumah	9 Rekomendasi izin mendirikan rumah	12 Rekomendasi izin mendirikan rumah	7 Rekomendasi izin mendirikan rumah	6 Rekomendasi izin mendirikan rumah	85,71 %

No	Kinerja Utama	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2020				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	(%)
1	Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah	Jumlah keluaran yang mendapat bantuan bedah rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 2.793.665.000,00	Rp. 12.444.000,00	Rp. 37.332.000,00	Rp. 697.332.000,00	Rp2.046.557.000	100
2	Melaksanakan kinerja kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman berprasarana dasar melalui penyediaan / pembuatan sarana PSU	Jumlah sarana PSU yang dibangun	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 22.799.928.463,00	-	Rp. 186.009.290,00	Rp. 4.365.479.946,00	Rp. 17.993.775.590,00	98,07
3	Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun	Jumlah sarana PSU yang dipelihara							
4	Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan	Jumlah rumah yang telah di validasi dan verifikasi							
5	Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW	Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW							

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pemanfaatan Perkim yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pemanfaatan Perkim 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah dengan indikator Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah dengan target 500 KK terealisasi 324KK dengan capaian kinerja 64,80 %,

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Target SK (Unit)	Realisasi (Unit)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Dana	Dana
1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	ATU-ATU	15	15	2021	D A K	300.000.000
		ANGSAU	19	19			380.000.000
		PELAIHARI	15	15			300.000.000
		KARANG TARUNA	18	18			360.000.000
		TUNGKARAN	18	18			360.000.000
		PANGGUNG	18	18			360.000.000
		AMBUNGAN	15	15			300.000.000
		UJUNG BATU	15	15			300.000.000
		ATU-ATU	15	15			300.000.000
		TOTAL	133	133			
		AMBUNGAN	12	11			240.000.000
		BUMI JAYA	10	10			200.000.000
		ATU-ATU	3	3			60.000.000
2	BANTUAN SOSIAL BEDAH RUMAH	SARANG HALANG	1	1	2021	APBD KABUPATEN	20.000.000
		PELAIHARI	7	7			140.000.000
		ANGSAU	1	1			20.000.000

BAB III AKUNTABILITAS

		KARANG TARUNA	1	1			20.000.000
		UJUNG BATU	8	8			160.000.000
		KETAPANG	2	2			40.000.000
		BAJUIN	1	0			-
		KUNYIT	9	6			180.000.000
		PEMALONGAN	1	1			20.000.000
		TIRTA JAYA	3	3			60.000.000
		GUNUNG MAS	5	4			100.000.000
		GUNUNG MELATI	8	6			160.000.000
		KURAU	33	33			660.000.000
		SARIKANDI	8	8			160.000.000
		HANDIL BIRAYANG ATAS	8	8			160.000.000
		HANDIL BABIRIK	11	11			220.000.000
		HANDIL MALUKA	2	2			40.000.000
		BENUA RAYA	11	11			220.000.000
		KAIT-KAIT	2	2			40.000.000
		SUNGAI JELAI	1	1			20.000.000
		MARTADAH BARU	10	10			200.000.000
		KANDANGAN LAMA	8	8			160.000.000
		KURINGKIT	4	4			80.000.000
		SWARANGAN	6	6			120.000.000
		ALUR	8	8			160.000.000

BAB III AKUNTABILITAS

		PASIR PUTIH	6	6			120.000.000
		TAKISUNG	1	1			20.000.000
		RANGGANG	1	1			20.000.000
		TELAGA LANGSAT	8	8			160.000.000
		TOTAL	100	82			
		TOTAL KESELURUHAN	333	324			

2. Kinerja Utama Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU dengan indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun dengan target 7 Komplek Perumahan dan kawasan permukiman terealisasi 10 Komplek Perumahan dan Kawasan permukiman dengan capaian kinerja 142,85%, sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen PSU	Realisasi (Meter/Unit)	Target (Meter/Unit)	Ket.
A.	Jalan			
-	Paving Block			
1	Pemasangan Paving Block Jalan Atilam KelurahanPabahanan	561.95	519.480520	m2
2	Pemasangan Paving Block Jalan Lingkungan KomplekRoemah Legenda dan Gang Aman Kelurahan Karang Taruna	563.2	519.480520	m2
3	Pemasangan Paving Block Loka Bina Praja (BKPSDM)	825.1	519.480520	m2
4	Pemasangan Paving Block Puskesmas Pelaihari	439.645	519.480520	m2
5	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Halaman AsramaPondok Pesantren Daarul Qur'an Istiqomah KelurahanAngsau Kec. Pelaihari	550	488.311690	m2

BAB III AKUNTABILITAS

TOTAL		2939.895	2,566.233770	m2
-	Aspal			
1	Pengaspalan Halaman dan Jalan Ligkungan DinasP2KBP3A Kab. Tala	300	254.054055	Meter
2	Pengaspalan halaman kantor DPRD Kabupaten TanahLaut	300	270.27027	Meter
3	Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang Berlian RT.3 RW.1Kecamatan Pelaihari	285.5	270.27027	Meter
4	Pengaspalan Jalan Lingkungan Graha Banua MatahKelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari	333	270.27027	Meter
5	Pengaspalan Jalan Lingkungan Jalan Nurahman RT.10Pabahanan	228	270.27027	Meter
6	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 08 RW.03 Gang Empatlima, Gang Telaga Dua dan Gang Telaga Empat	299	270.27027	Meter
7	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 09, 10 Desa SungaiRiam Kecamatan Pelaihari	322.7	270.27027	Meter
8	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.5 Desa PemudaKecamatan Pelaihari	331.1	270.27027	Meter
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Balai Latihan Kerja (BLK)Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari	300	254.054055	Meter
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Madani dan GangMaryah Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	258	179.324326	Meter
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Mekar Rt 13 Rw 05Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	285	254.054055	Meter
12	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sumur Halau +Gang Mulia Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari	385.50	270.27027	Meter
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Nabela Matah Kel.Karang Taruna	494	520.357093	Meter
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan An-Noor RT.4Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	124	130	Meter
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Griya PesonaBintang	333	270.27027	Meter
16	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Mutiara RT.7Kelurahan Karang Taruna	364	270.27027	Meter
17	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pusaka KelurahanPelaihari	337	270.27027	Meter
18	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rancah PabahananKelurahan Pabahanan	361	270.27027	Meter
19	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek BakunciKelurahan Karang Taruna	328	270.27027	Meter
20	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Ratu Graha AsriKel. Angsau Kec. Pelaihari	262	270.27027	Meter
21	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Sarang HalangResidence RT.7 RW.1 Ambawang Kelurahan Sarang Halang	468	270.27027	Meter

BAB III AKUNTABILITAS

22	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan ManggaPermai Residence Kelurahan Sarang Halang	263	270.27027	Meter
23	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah2 Pelaihari	294	270.27027	Meter
24	Peningkatan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren NurulMuhibbin Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari	254	254.054055	Meter
25	Peningkatan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Amin Kelurahan Sarang Halang KecamatanPelaihari	285	254.054055	Meter
26	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kelurahan KarangTaruna	284.5	270.27027	Meter
27	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07A RW.03Gg.MAKMUR dan RT.08 RW,03 Gg.BAHAGIA KelurahanAngsau Kecamatan Pelaihari	303	270.27027	Meter
28	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.10 Jalan Candra AsriDesa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari	419	270.27027	Meter
29	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.16 RW.03 Alkah Al-Fatah Kelurahan Karang Taruna	400	270.27027	Meter
30	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.26 RW.7 KelurahanAngsau Kecamatan Pelaihari	330	270.27027	Meter
31	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.4 Desa TelagaKecamatan Pelaihari	312	270.27027	Meter
32	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.6 Kelurahan KarangTaruna	284	270.27027	Meter
33	Peningkatan Jalan Lingkungan Ruas A RT.13 KelurahanSarang Halang	386	270.27027	Meter
34	Peningkatan Jalan Lingkungan Trans Desa Ujung BatuRT.9 dan RT.11	259.3	270.27027	Meter
TOTAL		10772.6	9,126.978714	Meter
- Tanah Urug				
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor DPRKPLH	4.950	1,027.221367	m3
TOTAL		4.950	1,027.221367	m3
- Perkerasan				
1	Perkerasan Jalan Lingkungan Rumah Sakit H. Boejasin		1,408	Meter
TOTAL		0	1,408	Meter
B. Drainase				
- Drainase				
1	Pembuatan Drainase/ Saluran Jalan Lingkungan JalanRaya Takisung (Bukit Sabat) Kelurahan Karang Taruna	389.8	181.818182	Meter
2	Pembuatan Drainase/Saluran Jalan Lingkungan RT.16RW.03 Kelurahan Karang Taruna	265	181.818182	Meter
3	Pembuatan Drainase/ Saluran Jalan Swadaya RT.6 RW.3Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari	521.6	181.818182	Meter

BAB III AKUNTABILITAS

4	Pembuatan Drainase/ Saluran Perkotaan Rumah Sakit H.Boejasin		2,500	Meter
TOTAL		1176.4	3,045.454546	Meter



Foto sarana PSU yang dibangun

- Kinerja Utama Melaksanakan pemeliharaan sarana PSU dengan indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun dengan target 7 Komplek Perumahan dan kawasan permukiman terealisasi 10 Komplek Perumahan dan Kawasan permukiman dengan capaian kinerja 142,85%, sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen PSU	Realisasi (Meter/Unit)	Target (Meter/Unit)	Ket.
1	Pemasangan Paving Block Jalan Lingkungan KomplekRoemah Legenda dan Gang Aman Kelurahan Karang Taruna	563.2	519.5	m2
2	Pengaspalan Jalan Lingkungan Graha Banua MatahKelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari	333	270.3	Meter
3	Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Griya PermataDua Kecamatan Bati-Bati	284	238.1	Meter
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Griya PesonaBintang	333	270.3	Meter
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek BakunciKelurahan Karang Taruna	328	270.3	Meter
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Ratu Graha AsriKel. Angsau Kec. Pelaihari	262	270.3	Meter
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Sarang HalangResidence RT.7 RW.1 Ambawang Kelurahan Sarang Halang	468	270.3	Meter
8	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Cahaya BanyuBanua, Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati	439	403.6	Meter
9	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan ManggaPermai Residence Kelurahan Sarang Halang	263	270.3	Meter
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah2 Pelaihari	294	270.3	Meter

DOKUMENTASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK
MENUNJANG FUNGSI HUNIAN

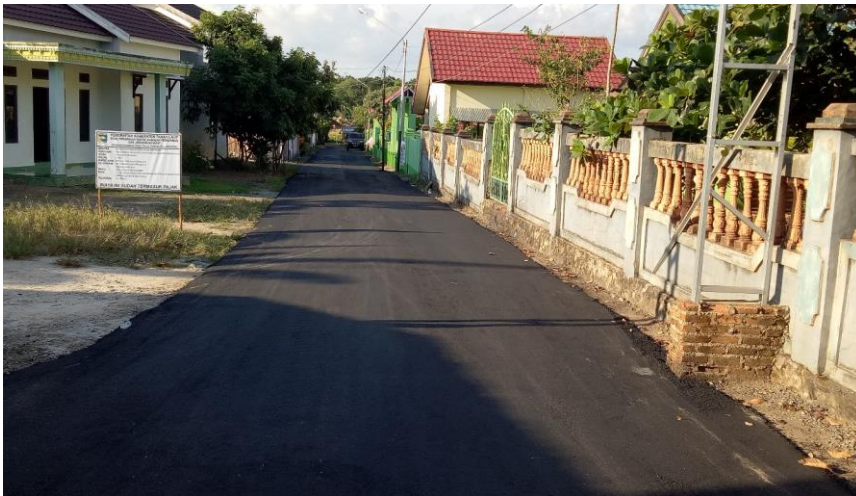


Pemasangan Paving Block



Pembuatan Drainase/ Saluran Jalan Lingkungan

100%





Pengaspalan Jalan Lingkungan

4. Kinerja Utama Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan dilaksanakan dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 %, jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi untuk pengusulan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Rekapitulasi verifikasi dan validasi Rumah (APBD)

NO	KECAMATAN	KEL / DESA	PENERIMA BANTUAN (UNIT)
1	PELAIHARI	TELAGA	7
		PABAHANAN	3
		AMBUNGAN	1
		PANGGUNG	1
		PELAIHARI	10
		SUNGAI RIAM	9
		PEMUDA	9

BAB III AKUNTABILITAS

		SUMBER MULYA	9
		BUMI JAYA	9
TOTAL			58
2	BATI-BATI	PANDAHAN	9
		PADANG	9
TOTAL			18
3	BAJUIN	TIRTA JAYA	4
		SUNGAI BAKAR	4
			8
4	BATU AMPAR	AMBAWANG	4
		DAMIT HULU	9
		GUNUNG MAS	6
TOTAL			19
5	KURAU	MALUKA BAULIN	6
		SARIKANDI	3
		KURAU	9
		RADEN	2
TOTAL			20
6	PANYIPATAN	BUMI ASIH	10
		PANYIPATAN	12

BAB III AKUNTABILITAS

		KANDANGAN LAMA	2
TOTAL			24
7	TAKISUNG	RANGGANG	5
		TAKISUNG	5
		SUMBER MAKMUR	5
TOTAL			15
8	JORONG	ASAM JAYA	3
		JORONG	3
	TOTAL		6
9	KINTAP	MEKAR SARI	10
TOTAL			10
TOTAL KESELURUHAN			178

Rekapitulasi verifikasi dan validasi Rumah (DAK)

N O	KEL / DESA	PENERIMA BANTUAN (UNIT)
1	Sarang Halang	15
	Karang Taruna	15
	Pelaihari	15
	Angsau	15
	Bawah Layung	15
	Pantai Harapan	15
	Sungai Rasau	15
	Handil Labuan Amas	15
	Handil Gayam	15
	Pemalongan	15
	Sungai Bakar	15
	Tanjung Dewa	15
	Kuringkit	15
	Benua Tengah	15
	Pagatan Besar	15
	Bati-Bati	15
	Padang	15
	Tambang Ulang	15
	Sungai Pinang	15
T O T A L		285



5. Kinerja Utama Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW dengan indikator Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW dengan target 7 Rekomendasi izin mendirikan rumah terealisasi 6 Rekomendasi izin mendirikan rumah dengan capaian kinerja 85,71%

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI PERUMAHAN
1	3A RATU RESIDENCE	CV. TRISAKTI PUTRA BORNEO	JL. A. YANI RT 001 RW 001 DESA KINTAPURA KEC. KINTAP KAB.TANAH LAUT
2	KAMPOENG SHAFWAH ASRI PELAIHARI	PT. SHAFWAH ROYAL PROPERTY	JL. RAYA TAKISUNG, KEL. KARANG TARUNA, KEC. PELAIHARI, KAB.TANAH LAUT
3	MEGAROSADELA KINTAP RESIDENCE (MKR)	PT. MEGA ROSADELA PROPERTINDO	JL. A. YANI RT 07 RW 003, DESA MUARA KINTAP, KECAMATAN KINTAP, KAB. TANAH LAUT
4	PESONA ALFA SINERGIA 2	PT. ALFA SINERGIA SEJAHTERA	JL. MANGGA BESAR RT 009 RW 006 KEL. SARANG HALANG, KEC. PELAIHARI, KAB. TANAH LAUT
5	POJOK ISTANA	PT. ALAM MERATUS PERSADA	JL. KH. A. NAWAWI RT 002 RW 001 KEL. KARANG TARUNA KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT
6	SINAR ALAM JORONG PERMAI	PT. SINAR ALAM ANGKASA MANDIRI	JL. A. YANI KM 101 RT. 012 RW. 004 DESA JORONG KEC. JORONG





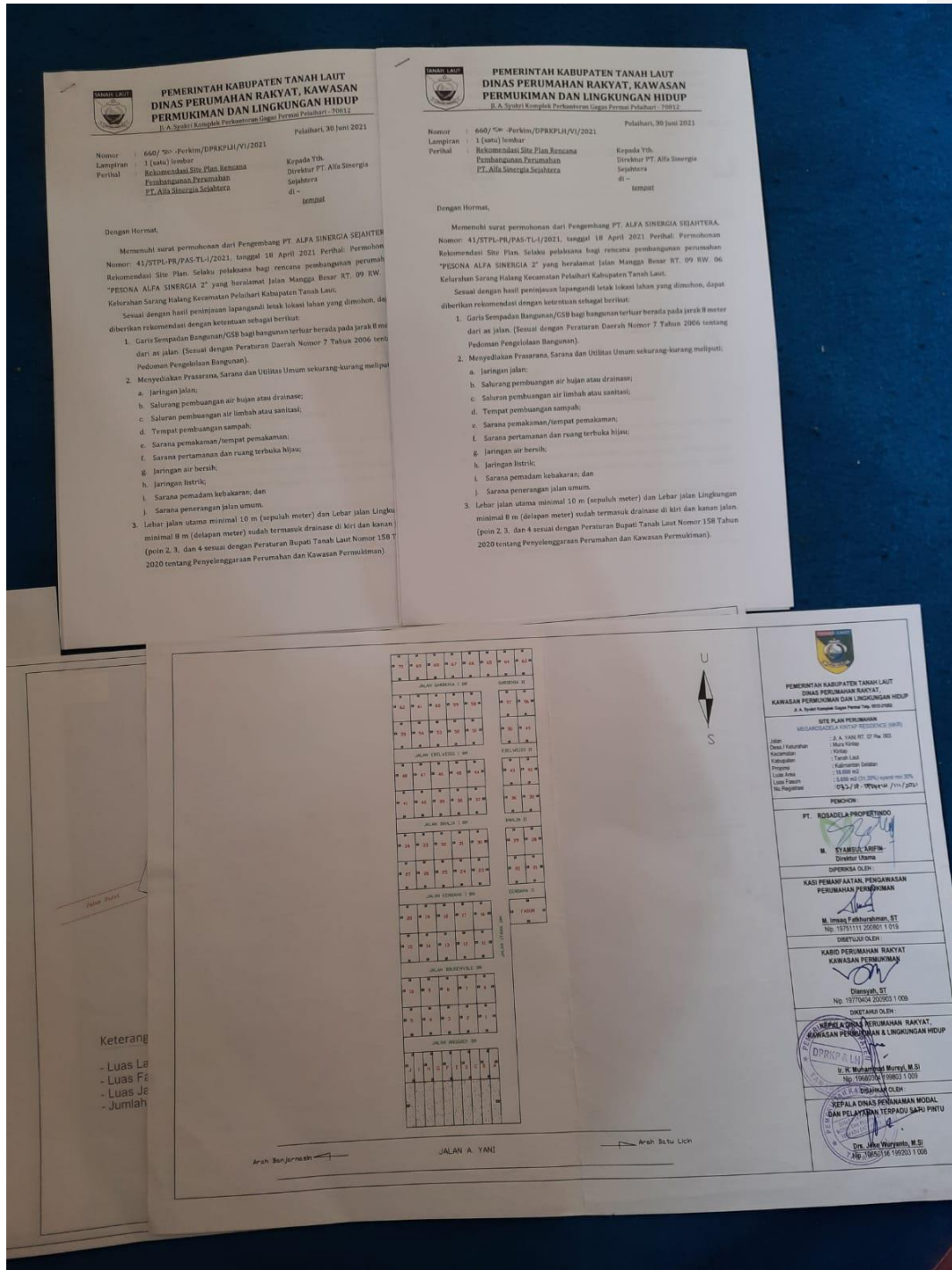


Foto rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW



3.e. Kabid Tata Kota Dan Kebersihan

Bidang Tata Kota Dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Tata Kota Dan Kebersihan .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Tata Kota Dan Kebersihan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.

Tahun 2020 untuk mencapai sasara ini telah dilaksanakan Program tata Kota dan Kebersihan dengan 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 20.322.983.973,00** dan terealisasi sebesar **Rp 18.308.972.497,00** atau 90,09%. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 288 orang dengan anggaran pada APBD murni 2020 sebesar **Rp 25.084.389.460,00** namun karena adanya **wabah covid-19 terjadi recofusing anggaran** menjadi Rp 20.322.983.973, Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Tata Kota Dan Kebersihan sebanyak 228 orang.

Sedangkan Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Tata Kota dan Kebersihan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 47.312.219.626,00** dan terealisasi sebesar **Rp 42.607.333.992,00** atau **92,20%** .Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 228 orang dengan anggaran pada APBD perubahan 2021 sebesar **Rp 47.312.219.626,00** dengan capaian indikator pada bidang Tata Kota dan Kebersihan sebesar **92,20%** sedangkan jumlah SDM Bidang Tata Kota Dan Kebersihan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Adapun beberapa pencapaian yang dilakukan oleh bidang Tata Kota dan Kebersihan yaitu melakukan pemenuhan sarana dan prasarana seksi kebersihan dan limbah melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 Kementrian Lingkungan Hidup (penanganan limbah B3 Medis Covid 19), dan melakukan penyusunan draf rancangan peraturan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan pemasangan penerangan fasilitas umum pada seksi penerangan jalan umum dengan 6 dokumen perencanaan, 6 dokumen pengawasan penerangan jalan umum dan 1 dokumen masterplan penerangan jalan umum. Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Ex Pasar Lama Pelaihari pada Seksi Pertamanan dan RTH



Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Kota Dan Kebersihan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Tata Kota dan Kebersihan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 13 Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Indikator 19 Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	100%	100%	100%
2.	Sasaran 14	Indikator 20 Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (27 Armada Roda 6 dan 13 Armada Roda 3)	55,00%
	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Indikator 21 Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90,09%	90,09%
		Indikator 22 Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Kota dan Kebersihan 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	50% (20 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	50% (21 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	50% (24 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	100%	55% (27 Armada Roda 6 dan 13 Armada Roda 3)	55,00%
		Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	60%	70%	80%	90,09%	100%	90,09%	90,09%
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	-	90,40	100%	100%	100%	100%	100%

3.e.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 13

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 13	Indikator 19	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat			

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 13 dengan Indikator Kinerja Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat dilaksanakan Kasi Penerangan Jalan Umum dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :



Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) indicator utama Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100%

Seiring meningkatnya perkembangan pemukiman, semakin meningkat pula keinginan untuk pemasangan penerangan/ lampu jalan umum, sesuai dengan permintaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Salah satu dampak yang ditimbulkan jika tidak terpasangnya penerangan jalan umum adalah meningkatnya terjadinya kecelakaan di jalan dan tindak kriminal. Untuk itu perlu adanya penerangan jalan umum untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum ini memiliki sasaran pada aspek :

- Meningkatnya penerangan jalan umum untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut
- Dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum maka perlunya pemeliharaan yang telah terpasang oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih ada beberapa permukiman yang belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN dan masih merupakan jaringan swadaya masyarakat setempat, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemasangan jaringan PJU
- 2) Antara permukiman satu dengan lainnya berjauhan sehingga membutuhkan material dan kebutuhan biaya yang banyak untuk menyambungkan jaringan PJU yang ada.
- 3) Masih terbatasnya anggaran sehingga banyak permintaan pemasangan jaringan PJU dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi.
- 4) Masih terbatasnya petugas dan sarana pendukung operasional pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, mengakibatkan sering terlambatnya perbaikan dan pelayanan bagi masyarakat (jumlah sarana prasana dan petugas operasional tidak sebanding dengan jumlah titik lampu yang dipelihara).
- 5) Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian khusus kelistrikan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala



yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jaringan listrik yaitu PLN dalam hal penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat secara merata.
- 2) Perencanaan ulang mengenai pemasangan jaringan PJU, sehingga penyebaran PJU bisa merata dinikmati oleh masyarakat, salah satunya dengan pembagian jaringan dengan meterisasi.
- 3) Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya pemenuhan anggaran untuk pemerataan pemasangan jaringan PJU berdasarkan usulan masyarakat yang masuk.
- 4) Perlunya penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional PJU.

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Penyusunan Database/kajian dalam pemasangan Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak PLN dalam hal pemasangan, pemeliharaan dan pemerataan jaringan listrik bagi masyarakat.
3. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
4. Mengajukan usulan penambahan petugas pemeliharaan perkecamatan dan kota pelaihari, serta penambahan armada operasional

Kasi Penerangan Jalan Umum

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Kota DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 13 Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) dilaksanakan melalui Program Tata Kota dan Kebersihan dengan kegiatan Penerangan Jalan Umum selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH nomor 13 Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Penerangan Jalan Umum dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Penerangan Jalan Umum didukung 32 orang SDM yaitu 2 orang PNS dan 30 orang PTT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Penerangan Jalan Umum

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Indikator Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	6 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 dan 13 lokasi rencana pemasangan PJU)	6 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 15 dan 13 Lokasi)	100%
2.	Sasaran Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Indikator Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	10 dokumen	6 dokumen	60%
3.	Sasaran Melakukan pemeliharaan PJU	Indikator Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	100%
4.	Sasaran Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Indikator Jumlah SarPras PJU yang memenuhi sesuai standar	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Penerangan Jalan Umum 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum	-	-	8 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 8 lokasi rencana pemasangan PJU)	1 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 15 Lokasi)	6 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 dan 13 lokasi rencana pemasangan PJU)	6 dokumen perencanaan PJU (2 dokumen perencanaan yang menghasilkan rencana pemasangan PJU di 15 dan 13 lokasi pemasangan PJU)	100%
2	Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu	Jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi	1 dokumen	-	16 dokumen	20 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	60%
3	Melakukan pemeliharaan PJU	Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan	- 57 KWH - 1110 Armatur - 7 Sorot	- 74 KWH - 1719 Armatur - 11 Sorot	- 168 KWH - 4700 Armatur - 11 Sorot	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	- 247 KWH - 5485 Armatur - 2046 Caping - 18 Sorot - 62 LED	100%
4	Melakukan pemenuhan SaPras PJU	Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar	- 57 KWH - 1110 Armatur - 7 Sorot	- 17 KWH - 609 Armatur - 4 Sorot	- 94 KWH - 2981 Armatur	- 79 KWH - 785 Armatur - 2046 Caping - 7 Sorot	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot	- 38 KWH - 12 Armatur - 2913 Caping - 18 Sorot	100%



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Penerangan Jalan Umum yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Penerangan Jalan Umum 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemasangan penerangan fasilitas umum dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan pemasangan penerangan jalan umum dengan target 2 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 dan 13 lokas rencana pemasangan PJU) terealisasi 2 dokumen perencanaan PJU (tersebar di 15 dan 13 lokasi rencana pemasangan PJU) dengan capaian kinerja 100%, yaitu dokumen perencanaan dan pemasangan jaringan PJU lengkap Desa Asam-Asam, Desa Batakan, Desa Gunung Raja, Desa Kandangan Baru Rt 3 dan Rt 4, Desa Kayu Abang, KNPI Rt 3, Rt 4, Rt 6, Rt 7, Sei Baru, Area Pusaran Bumi Jaya sampai Rt 18, Batu Ampar, Belakang Kuburan Muslimin Sarang Halang, Jalan Bangun Banua Pelaihari, Jl A Syairani Depan Alfamart Rt 26 Angsau, Jl Keluarga Desa Padang, Kelurahan Sarang Halang, Sidomukti Jorong, Desa Atu-Atu, Desa Bingkulu Rt 6 dan Rt 9, Desa Bumi Asih, Desa Gunung Makmur Sungai Kambang Rt 18 Rt 19 Rt 20, Desa Gunung Mas , Desa Jorong, Desa Martadah Baru Dusun 1 dan Dusun 2, Desa Padang Rt 1 Rt 10 Rt 9 Teluk Pulantan, Desa Pungkar Ulin Rt 6 Rt 7 Kuringkit, Desa Sukaramah, Desa Tabanio, Desa Tajau Mulia, Desa Tanjung Kampung Rt 02.
2. Kinerja Utama Melakukan validasi permohonan pemasangan titik lampu dengan indikator jumlah dokumen permohonan pemasangan titik lampu yang divalidasi dengan target 10 dokumen terealisasi 6 dokumen dengan capaian kinerja 60%,
3. Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan PJU dengan indikator Jumlah SarPras PJU yang dipelihara dan difungsikan dengan target 38 KWH , 12 Armatur. 2913 Caping, 18 Sorot, capaian dengan capaian kinerja 100%,



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kec	2017				2018				2019				2020					2021						
	KW H	Arma tur	Ca mpi ng	So rot	KW H	Arm atur	Ca mp ing	Sor ot	KW H	Ar mat ur	Ca mpi ng	Sor ot	KW H	Arm atur	Cam ping	So rot		KW H	Ar mat ur	Cam ping	So rot	le d	Tamba h daya	Tian g Baru
Pelai hari	9	174			4	172		3	15	448			12	8	461	3	62	6		390	1	1	1	123
Bajui n									12	328			5	16	90			1		53	6	4		5
Takis ung	9	180			3	58		1	13	371			11	69	386	1		3		209	4	5	3	36
Kinta p	9	180							19	488			2		83	1		7	7	266	1	25		1
Panyi patan	9	192		7									10	75	340			3		316		1		44
Kurau	5	100											6		212									
Tamb ang Ulang	4	44				11							8	99	162			4		345		4	4	107
Batu Ampa r	6	120			10	281			10	390			12	198	215	1		6		529	1	23	3	161
Bumi Mak mur	6	120							8	446			1		16			2		230		4	1	
Bati- Bati						87			12	380			8	297		1		4		275	4	5		100
Joron g									5	150			4	23	81			2	5	300	1	1	3	85
TOT/ TAHU N	57	1110	0	7	17	609	0	4	94	298 1	0	0	79	785	2046	7	62	38	12	2913	18	73	15	662

4. Kinerja Utama Melaksanakan Melakukan pemenuhan SarPras PJU dengan indikator Jumlah SarPras PJU yang di penuhi sesuai standar dengan target 79 KWH,785 armatur, 2046 caping terealisasi 79 KWH,785 armatur, 2046 caping dengan capaian kinerja 100%,

Tabel : pemenuhan Sarpras PJU th 2021

K E C	2021						
	KWH	Armatur	Caping	Sor ot	le d	Tambah Daya	Tiang Baru
Pelaihari	6		390	1	1	1	123
Bajuin	1		53	6	4		5
Takisung	3		209	4	5	3	36
Kintap	7	7	266	1	25		1
Panyipatan	3		316		1		44
Kurau	-	-	-				
Tambang Ulang	4		345		4	4	107
Batu Ampar	6		529	1	23	3	161
Bumi Makmur	2		230		4	1	
Bati-Bati	4		275	4	5		100
Jorong	2	5	300	1	1	3	85
TOT/TAHUN	38	12	2.913	18	73	15	662



2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 14

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Sasaran 14	Indikator 20 Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar	100%	55% (25 Armada Roda 6 dan 15 Armada Roda 3)	55,00%
	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	Indikator 21 Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	100%	90,09%	90,09%
		Indikator 22 Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatkan Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator :

1. Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% terealisasi sebesar 55% ,untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Kebersihan dan Limbah dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2020 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.
2. Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% terealisasi sebesar 90,09% ,untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Kebersihan dan Limbah dengan pencapaian

sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kasi Kebersihan dan Limbah

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Kota DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator Persentase sarana prasana kebersihan sesuai standar dan Persentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas dilaksanakan melalui Program Tata Kota dan Kebersihan dengan kegiatan Kebersihan dan Limbah selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKLH nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Kebersihan dan Limbah dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2020 Kasi Kebersihan dan Limbah didukung 159 orang SDM yaitu 11 orang PNS dan 148 orang PTT

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kebersihan dan Limbah

N o	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisa si	Persenta se Capaian
1	Sasaran Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	38.337.30	38.337.30	100,0 %
2	Sasaran Melakukan pengolahan sampah di TPA	Indikator Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	114.000 Ton	113.128 Ton	99,2%
3	Sasaran Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	3 Pelaku usaha	3 Pelaku usaha	100%
4	Sasaran Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat	Indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
5	Sasaran Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 kecamatan	11 kecamatan	1100%
6	Sasaran Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi	1 Unit (1 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		sesuai standar			
7	Sasaran Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Indikator Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan	45 buah sarpras (100 %)	45 buah sarpras (100 %)	100%



Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Kebersihan dan Limbah 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga	Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola	35.114,00	37.231,83	36.726,76	38.281,15	38.293,00	100,03 %
2	Melakukan pengolahan sampah di TPA	Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA	76.302 Ton	148.994 Ton	200.267 Ton	114.000 Ton	113.128 Ton	99,2%
3	Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik	Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 Pelaku usaha	100%
4	Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat	Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota	Jumlah kawasan kota yang dibersihkan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	11 Kecamatan	1100%
6	Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan	Jumlah Sarpras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar	12 Unit (12 Armada Roda 3)	4 Unit (2 Armada Roda 3 dan 2 Armada Roda 6)	4 Unit (4 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	1 Unit (1 Armada Roda 6)	100%
7	Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan	Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan	40 buah sarpras (100%)	41 buah sarpras (100%)	44 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	45 buah sarpras (100%)	100%



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Kebersihan dan Limbah yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Kebersihan dan Limbah 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 38.281,15 ton terealisasi 38.293,00 dengan capaian kinerja 100,03%,
2. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampahmasyarakat yang dikelola di TPA dengan target 114.000 Ton terealisasi 113.128 Ton dengan capaian kinerja 99,2%,



Foto sampah yang dikelola

3. Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha dengan target 3 pelaku usaha kali terealisasi 3 Pelaku Usaha dengan capaian kinerja 100%,
4. Kinerja Utama Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat dengan indicatorJumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah dengan capaian kinerja 100%,
5. Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlahkawasan kota yang dibersihkan dengan target 1 kecamatan terealisasi 11 kecamatandengan capaian kinerja 1100%,



6. Kinerja Utama Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 1 Unit (1 Armada Roda 6 terealisasi 1 Unit(1 Armada Roda 6) dengan capaian kinerja 100%,
7. Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 45 buah sarpras Terealisasi 45 buah sarpras dengan capaian kinerja 100%

Permasalahan

1. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun maka akan terjadi peningkatan jumlah sampah yang dilayani dan dikelola



2. Keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya dapat melayani masyarakat se kabupaten tanah laut, secara maksimal
3. Keterbatasan jumlah armada kebersihan (truk angkut sampah, container sampah) dan petugas kebersihan untuk melayani dan mengelola jumlah sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya untuk melayani kebersihan di kota pelaihari dan seluruh kecamatan
4. Keterbatasan TPS (tempat penyimpanan sementara) dan luasan lahan TPA (tempat pengolahan akhir)
5. Belum adanya kenaikan retribusi dari pelayanan kebersihan dan limbah untuk masyarakat yang terlayani, maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

Upaya yang dilakukan

1. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait permohonan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kebersihan
2. Optimalisasi armada kebersihan dan petugas kebersihan yang ada

Rencana Aksi

1. Mengajukan permohonan penambahan sarana prasarana kebersihan
2. Mengajukan permohonan penambahan petugas kebersihan
3. Menyusun rencana kajian pengelolaan persampahan se kabupaten tanah laut
4. Mengkaji luasan lahan TPA dan pembebasan lahan TPST setiap perkecamatan



3. Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat capaian kinerjanya telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% terealisasi sebesar 100%, untuk mendukung sasaran strategis nomor 14 Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Pertamanan dan RTH dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.



Kasi Pertamanan dan RTH

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Kota DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat dilaksanakan melalui Program Tata Kota dan Kebersihan dengan kegiatan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH nomor 14 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Pertamanan dan RTH dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Pertamanan dan RTH didukung 37 orang SDM yaitu 10 orang PNS dan 27 orang PTT



Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pertamanan dan RTH

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Indikator Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	7 dokumen	7 dokumen	100%
2.	Sasaran Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Indikator Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH	72 RTH	100%
3.	Sasaran Melakukan monitoring	Indikator Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pertamanan dan RTH 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019		Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	-	3 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman	Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara	72 RTH	72 RTH	72 RTH	72 RTH	72 RTH	72 RTH	100%
3	Melakukan monitoring	Jumlah data hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pertamanan dan RTH yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pertamanan dan RTH Kebersihan dan Limbah 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Jumlah dokumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen dengan capaian kinerja 100% ,yaitu
 - a. Dokumen Perencanaan pembangunan pedestrian/jalur pejalan kaki pada ruas jalan KH. Mansyur Kota Pelaihari
 - b. Dokumen Pengawasan pembangunan pedestrian/jalur pejalan kaki pada ruas jalan KH. Mansyur Kota Pelaihari
 - c. Pembangunan ruang publik ex pasar lama Pelaihari
 - d. Dokumen penyusunan grand design penataan kota Pelaihari
 - e. Pembangunan gerbang taman pintu masuk Jl. Almanar
 - f. Dokumen Perencanaan Pertamanan dan RTH
 - g. Pembangunan Median Jalan A.Yani – Pom Bensin Angsau Pelaihari
2. Kinerja Utama Melaksanakan pemeliharaan Sarana Prasarana Taman dengan indikator Jumlah ruang terbuka hijau yang dipelihara dengan target 72 RTH terealisasi 72 RTH dengan capaian kinerja 100%

Ruang Terbuka Hijau yang Dipelihara

No	Nama RTH	Lokasi
(a)	(b)	(c)
1	RTH Kijang Mas Permai	Jl. Kolonel Soepirman
2	Taman Kota Tanah Laut Membangun	Jl. A. Syairani
3	Pulau Jalan (Tugu PKK)	Jl. A. Yani KM 59
4	Taman Kota Belakang PU	Jl. H. Boejasin
5	RTH Kota Orchid	Jl. H. Boejasin
6	Mina Tirta	Jl. H. Boejasin
7	RTH Masjid Al-Manar	Jl. Al-Manar
8	Taman Kijang Kencana	Jl. A. Yani



9	Tugu Adipura dan Selamat Datang	Jl. A. Yani
10	RTH Wihara	Jl. Wihara
11	Median Jalan Majakeling	Jl. Majakeling
12	Kolam Renang Tirta Kenanga	Jl. Sum-Sum
13	Stadion Prestasi Kencana	Jl. A. Syairani



14	RTH Lapangan Hasan Basri	Jl. Gembira
15	Taman Al Manar 2	Jl. Al Manar
16	AlkahKuburanHabaib	Jl. Dharma
17	Lapangan Basket Tuntung Pandang Berseri	Jl. A. Yani
18	LapanganBramban	Gang Said
19	Lapangan Tenis Pemuda	Jl. Sapta Marga
20	Pasar Lawas	Jl. Veteran
21	Balairung Tuntung Pandang	Jl. A. Yani dan Jl. Pancasila
22	Kebun PKK	Jl. DatuInsad
23	Pemakaman Umum Muslimin	Jl A. Yani KM 59
24	Pemakaman "Bumi Tuntung Pandang"	Jl. A. Yani
25	Hutan Jati (di Belakang kantor Bupati)	Jl. A. Syairani
26	Hutan Kota (depanrumahdinassekda)	Jl. Hutan Kota
27	Gunung Kayangan	Jl. A. Yani
28	Hutan Kota TPA bakunci	Jl. Raya Takisung
29	Taman Kantor Bupati	Jl. A. Syairani
30	Taman Depan Stadion PerstasiKencana	Jl. A. Syairani
31	Lapangan Bola	Jl. P. Antasari
32	Kuburan Muslimin Sarang Halang	Jl. Sarang Halang
33	PemakamanMusliminMatah	Jl. Matah II
34	Kawasan Khusus Militer	Jl. A. Yani
35	SDN 5 Angsau	Jl. A. Yani
36	Kawasan Sekolah SMPN 3 Pelaihari	Jl. Simpang Desa Pemuda
37	SMK N 2 Pelaihari	Jl. Simpang Desa Pemuda
38	SPP Pelaihari	Jl. A. Yani
39	Pengadilan Negeri Pelaihari	Jl. H. Boejasin
40	RSUD H. Boejasin	Jl. H. Boejasin
41	SDN 6 Angsau	Jl. Purnawirawan
42	SDN Sarang Halang	Jl. Sarang Halang
43	SDN Pelaihari 5	Jl. Bramban Jaya
44	SMP Negeri 5 Pelaihari	Jl. Matah II
45	Puskesmas Pelaihari	Jl. Raya Pelaihari - Tangkisung
46	MAN Pelaihari	Jl. Matah II
47	Masjid DaarulIstiqomah	Jl. P. Antasari



48	SDN Bumi Jaya I	Jl. Padjajaran dan Jl. P. Antasari
49	SMPN 1 Pelaihari	Jl. Gembira
50	SDN 2 Pelaihari	Jl. Pembangunan
51	SDN 1 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
52	SDN 4 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
53	SDN 3 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
54	SDN 7 Pelaihari	Jl. Datu Daim II
55	SDN 6 Pelaihari	Jl. Pembangunan
56	Bajuin Plaza	Jl. Kemakmuran
57	Gereja Paroki Santa Theresia	Jl. Parit Baru
58	SDN 1 Angsau	Jl. Parit Baru
59	SDN 3 Angsau	Jl. Jend Ahmad Yani
60	Taman BAPPEDA Kab. Tanah Laut	Jl. A Syairani
61	Taman BKPSDM Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
62	Taman DINKES Kab. Tanah Laut	Jl. H. Boejasin
63	Taman BPBD Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
64	Taman DISHUB Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
65	Taman DPRD Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
66	Taman DISNAK & KESWAN Kab. Tanah Laut	Jl. Datulnsyad
67	Taman DISTANPANHOLKEB Kab. Tanah Laut	Jl. Datulnsyad
68	Taman DPRKPLH Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syukri
69	Taman DISNAKERIND Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
70	Taman KESBANGPOL Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
71	Taman DISPUSIP Kab. Tanah Laut	Jl. A. Syairani
72	Taman DISKOPDAG	Jl. A. Syairani



3. Kinerja Utama Melakukan monitoring dengan indikator Jumlah data hasil monitoring dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%

Upaya mengatasi permasalahan

Penyusunan kembali Rencana kerja, metode pelaksanaan



3.f. Kabid Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Tata Lingkungan. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Untuk mencapai sasaran strategis ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp.142.733.606,00 dan terealisasi sebesar Rp. 108.969.906,00 atau 76,3%.
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp.16.554.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.318.808,00 atau 92,5%.
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 213.858.016 dan terealisasi sebesar Rp 204.074.435,00 atau 95,4%.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp. 215.085.356,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.171.685,00 atau 93%.

Untuk mencapai sasaran ini, Bidang Tata Lingkungan didukung dengan SDM sebanyak 7 orang dan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut murni Tahun 2021 sebesar Rp 704.507.828,00 kemudian dilakukan perubahan pada APBD Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp 614.286.378,00 dan anggaran yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 528.534.834,00 atau 86% dengan capaian rata-rata indikator pada Bidang Tata Lingkungan sebesar 140,17%. Pada anggaran APBD tahun 2020 bidang Tata Lingkungan memiliki anggaran sebesar Rp 330.586.828,00. Bila dilihat dari dua tahun penganggaran ini terjadi kenaikan sebesar RP 373.921.000,00 atau 185,8%.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH



Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut;

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Tata Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 15	Indikator 23 Persentase peningkatan kampung iklim	100% (6 Desa)	83% (5 Desa)	83%
	Meningkatnya wilayah bebas	Indikator 24 Persentase kajian Lingkungan hidup	100%	100% (3 Dokumen, 1 Laporan)	100%



	pencemaran lingkungan	yang bisa dimanfaatkan			
		Indikator 25 Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	100%	109% 138 = 5 SKKL, 24 UKL-UPL, 104 SPPL, 5 BA Verifikasi Teknis)	109%

Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Lingkungan 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	-	4% (1 Desa/Kel)	12% (3 Desa/Kel)	100% (6 Desa)	83% (5 Desa)	83%
		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan	100% (1 Kajian LH)	100% (1 Kajian LH)	100% (2 Kajian LH)	100%	100% (3 Dokumen, 1 Laporan)	100%
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	281,05 % (4 SKKL, 22 UKL-UPL, 115 SPPL)	281,05 % (4 SKKL, 27 UKL-UPL, 69 SPPL)	281,05 % (1 SKKL, 25 UKL-UPL, 158 SPPL)	100%	109% 138 = 5 SKKL, 24 UKL-UPL, 104 SPPL, 5 BA Verifikasi Teknis)	109%

3.c.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 15

Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatkan wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan indikator:

1. Persentase peningkatan kampung iklim capaian kinerjanya sebesar 83% artinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh

Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Program Kampung Iklim merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai ikut serta secara aktif Program Kampung Iklim pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, dengan jumlah Desa/Kelurahan yang terdaftar yaitu 11 Desa dan 1 Kelurahan. Sedangkan penghargaan Program Kampung Iklim yang telah di raih yaitu Penghargaan ProKlim Katergori Utama untuk Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari pada tahun 2019, 3 (tiga) Desa pada tahun 2020 untuk Proklm Kategori Utama yaitu Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin, Asri Mulya Kecamatan Jorong, dan Sumber Jaya Kecamatan Kintap, sedangkan pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) Desa Proklm Kategori Lestari yaitu Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari, 1 (satu) Kelurahan mendapatkan penghargaan Proklm Kategori Utama Trophy yaitu Kelurahan Karang Taruna, 2 (dua) Desa mendapatkan penghargaan Proklm Kategori Utama Sertifikat yaitu Desa Damit Kecamatan Batu Ampar dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Sedangkan 5 (lima) Desa yaitu Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang, Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, Desa Sungai Riam Kecamatan Panyipatan, dan Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari mendapatkan penghargaan Proklm Kategori Madya.

Tidak tercapainya terget ini karena masih kurangnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Program Kampung Iklim sehingga perlu lebih digiatkan sosialisasi Program Kampung Iklim kepada masyarakat dan mendorong dukungan dari pihak-pihak swasta selaku Mitra Pendamping Program Kampung Iklim guna mendukung dan mensukseskan Misi Bupati terpilih yaitu “Desa Di Bina Kota Di Tata”. Analisa program atau kegiatan yang menunjang Program Kampung Iklim adalah semakin banyaknya program atau kegiatan dari SKPD teknis sesuai dengan bidangnya masing- masing yang dapat dikolaborasikan dengan Program Kampung Iklim pada Desa/Kelurahan binaan sehingga dapat meningkatkan penilaian dari Desa/Kelurahan tersebut.



Foto Menerima Penghargaan Proklam Kategori Lestari
Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari oleh Kementerian KLHK RI

2. Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan capaian kinerjanya yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini:

Kajian Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tercapai 100 % dalam arti Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini sangat dimanfaatkan atau digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut seperti Dokumen IKLH, Dokumen IKPLHD, Dokuem Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Laporan Program Kampung Iklim. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dasar dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Hal ini karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen wajib dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten/kota sehingga sangat di upayakan untuk dipenuhi. Analisa program atau kegiatan yang dapat menunjang Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini adalah adanya program atau kegiatan pada SKPD teknis sesuai dengan bidangnya

masing-masing yang dapat memenuhi kebutuhan data dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.

3. Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 145 dengan realisasi 133%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Kajian Dampak Lingkungan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini

Rekomendasi Lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) merupakan dasar dalam memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pencapaian target tersebut dikarenakan :

- a. Adanya pemenuhan kewajiban dari peraturan dan perundang-undangan terkait perijinan berusaha dan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- b. Semakin sadarnya pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- c. Semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.
- d. Semakin tertibnya proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut.
- e. Semakin giatnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Analisa program atau kegiatan yang dapat menunjang dari capaian ini adalah semakin banyaknya program atau kegiatan yang dapat meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan pentertiban terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut serta adanya program atau kegiatan untuk meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.

Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kabid Tata Lingkungan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Persentase peningkatan kampung iklim dilaksanakan

melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Selain di dukung Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan, didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 tersebut Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 (satu) orang PTT.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indikator Jumlah dokumen Inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Sasaran Melaksanakan Penyusunan Dokumen Proklamasi	Indikator Jumlah Dokumen Proklamasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Sasaran Mendaftarkan Desa Program Kampung Iklim	Indikator Jumlah Desa Teraftar Proklamasi	6 Desa	5 Desa	83 %

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penyusunan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen Inventarisasi GRK yang disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Proklamasi	Jumlah Dokumen Proklamasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Mendaftar Desa Program Kampung Iklim	Jumlah Desa Terdaftar Proklamasi	-	-	1 Desa	6Desa	6 Desa	5 Desa	83%

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca dengan Indikator Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK yang disusun dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini disebabkan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) ini merupakan bentuk gambaran Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Gas Rumah Kaca di Kabupaten Tanah Laut untuk bisa di lakukan evaluasi dan antisipasi dan mengatasi terjadinya Gas Rumah Kaca, selain itu Dokumen Inventarisasi GRK ini merupakan dokumen penunjang dalam pengisian penilaian Program Kampung Iklim. Petunjuk teknis penyusunan Dokumen Inventarisasi GRK mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.73/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Maka berdasarkan hal tersebut segera dilakukan penyusunan anggaran Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2017 dalam pelaksanaannya di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- Berdasarkan inventarisasi sumber emisi, data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan beban emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Tanah Laut dapat disimpulkan sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Sumber emisi gas rumah kaca yang ada di Kabupaten Tanah Laut berasal dari sektor energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian/peternakan, dan pengelolaan limbah padat khususnya di TPA.
- Gas rumah kaca yang terbentuk dari keempat sektor tersebut berupa CO₂, CH₄, dan NO₂ secara rinci besarnya telah diuraikan dalam dokumen.
- Secara keseluruhan, keempat sektor tersebut di atas, beban emisi gas rumah kaca terbesar dihasilkan dari sektor energi yang terdiri dari 3 subsektor.
- Ketiga subsektor tersebut adalah berasal dari aktivitas pembakaran bahan bakar, emisi fugitive, dan transportasi.

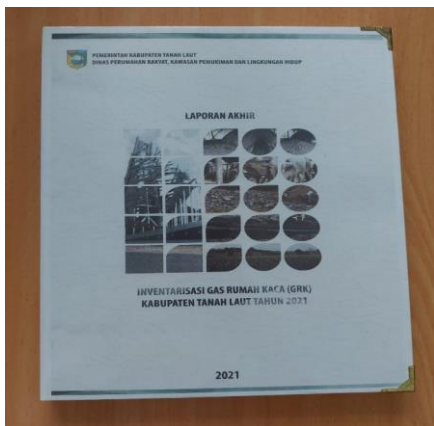


Foto Dokumen Inventarisasi GRK

- Kinerja Utama Melaksanakan Penyusunan Dokumen Proklam dengan Indikator Jumlah Dokumen Proklam dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini karena kegiatan Program Kampung Iklim sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini selalu diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga Dokumen ini menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di tahun selanjutnya



Foto Dokumen Proklam

- Kinerja Utama Mendaftarkan Desa Program Kampung Iklim dengan Indikator Jumlah

Desa Terdaftar Proklam dengan target 6 Desa terealisasi 5 Desa dengan capaian kinerja 83%. Tidak tercapainya terget ini karena masih kurangnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Program Kampung Iklim sehingga perlu lebih digiatkan pendekatan dan sosialisasi Program Kampung Iklim kepada masyarakat.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KEMENLHK RI Nomor 206 P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 maka berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2017 dan 2018 dilakukan sosialisasi Program Kampung Iklim ke Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut. Untuk Kinerja Utama ini dilakukan penyusunan anggaran kegiatan pada tahun 2018 sedangkan pelaksanaan kegiatan dimulai pada tahun 2019 dan berlanjut sampai dengan saat ini.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan Sosialisasi kepada Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sekaligus melakukan pendekatan kepada pejabat Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta tokoh masyarakat dan mendorong pihak swatsa untuk berperan serta dalam Proklam. Selain itu juga menjaring Desa dan Kelurahan yang akan didaftarkan pada Program Kampung Iklim. Adapun Desa dan Kelurahan yang terdaftar pada tahun 2021 adalah :

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Kampung Baru	Pelaihari
2	Nusa Indah	Bati-Bati
3	Liang Anggang	Bati-Bati
4	Martadah Baru	Tambang Ulang
5	Sungai Riam	Pelaihari

Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kabid Tata Lingkungan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan dilaksanakan melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kabupaten/Kota) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota

dengan Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota. Selain di dukung program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan, didukung juga oleh Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 didukung 1 (satu) orang PTT.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melaksanakan Penyusunan Dokumen KajianPerlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup	Indikator Jumlah Dokumen RPPLH	1 dokumen (karena dokumen ini telah di targetkan dan tidak dilaksanakan di tahun sebelumnya dan pelaksanaannya hanya sekali dalam 5 tahun)	-	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Indikator Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Sasaran Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Indikator Jumlah dokumen IKLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Sasaran Melaksanakan uji laboratorium	Indikator Jumlah LHU	12 LHU	11 LHU	92%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS 2021 dengan Capaian

Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RPPLH	-	-	1 Dokumen	-	1 dokumen	-	-
2	Melaksanakan penyusunan dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Melaksanakan penyusunan dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	-	-	-	-(Recafusing)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Melaksanakan uji laboratorium	Jumlah LHU	-	-	-	10 LHU	12 LHU	11 LHU	92%

Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Inventarisasi RPPLH dan KLHS tahun 2021 yaitu :

1. Kinerja Utama Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Jumlah Dokumen RPPLH tidak dilaksanakan pada tahun 2021 karena dokumen ini telah di targetkan dan

dilaksanakan di tahun 2019 dan pelaksanaannya hanya 1 (satu) kali dalam 5 tahun. Petunjuk teknis penyusunan RPPLH berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, tanggal 16 November 2016. Berdasarkan hal tersebut penganggaran baru disusun pada tahun 2017 untuk dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu penyusunan inventarisasi lingkungan hidup sebagai tahap awal penyusunan RPPLH dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 untuk tahap penetapan ekoregion dan penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Laut.

2. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan Dokumen IKPLHD dengan Indikator Jumlah dokumen IKPLHD dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini disebabkan Dokumen IKPLHD dilaksanakan secara rutin setiap tahun karena merupakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

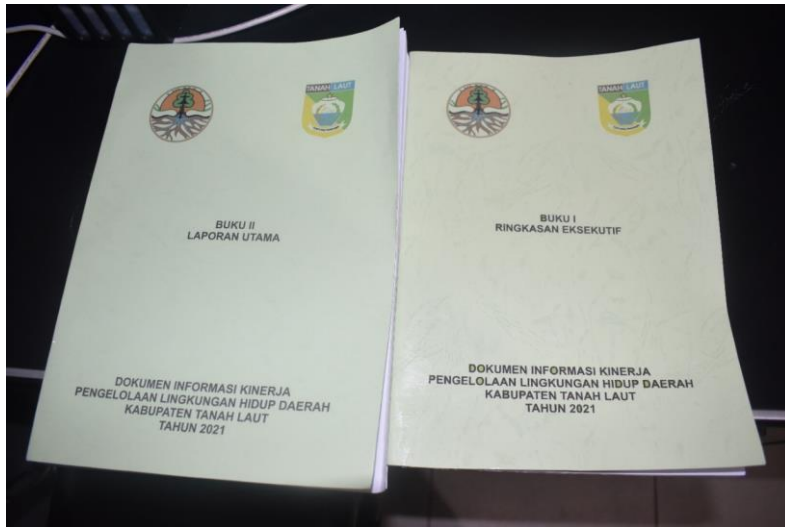


Foto Dokumen IKPLHD Tahun 2021

3. Kinerja Utama Melaksanakan penyusunan Dokumen IKLH dengan Indikator Jumlah Dokumen IKLH dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dan memenuhi capaian kinerja yang di targetkan yaitu 100%. Capaian kinerja ini karena Dokumen IKPH merupakan salah satu Dokumen penentu keberhasilan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah kerjanya dalam bentuk angka IKLH Kabupaten yang harus ditetapkan setiap tahun. Penyusunan Dokumen IKLH dilaksanakan pada tahun 2021. IKLH mulai dikerjakan setelah Dokumen RPPLH selesai disusun karena angka IKLH yang dihitung setiap tahun merupakan evaluasi dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang didalam Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021, angka IKLH adalah 68.70 dalam kategori sedang, sedangkan target sebesar 68,27 selisih capaian sebesar 0,43 sehingga realisasi capaian terhadap target sebesar 100,6%.

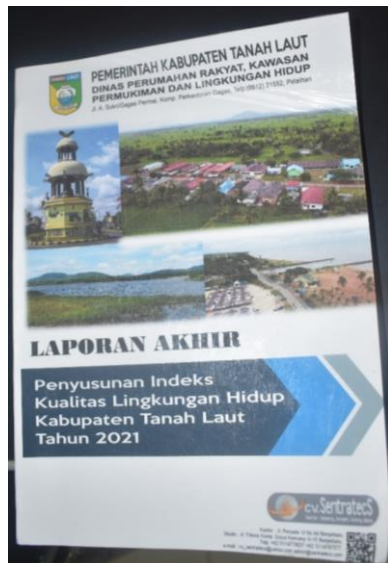


Foto Dokumen IKLH Tahun 2021

4. Kinerja Utama Melaksanakan uji laboratorium dengan Indikator Jumlah LHU yaitu 12 LHU terealisasi 11 LHU dengan capaian kinerja 92%. Pengujian kualitas air hujan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai solusi dari tidak adanya data kualitas air hujan yang dibutuhkan untuk pemenuhan data pada penyusunan Dokumen IKPLHD. Target 100% LHU tidak tercapai karena ada 1 bulan tidak dilakukan pengujian sampel yang disebabkan karena laboratorium penguji sudah tidak menerima sampel yang disebabkan menumpuknya sampel uji yang harus diperiksa dan limit tanggal transaksi keuangan. Sehingga Target 12 LHU tidak tercapai dan capaian kinerja hanya 92%.

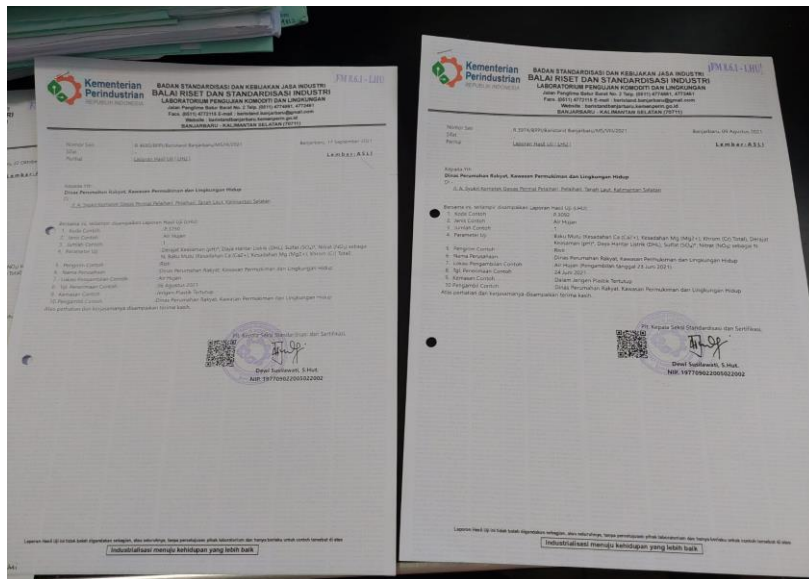


Foto Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Kualitas Air Hujan

Kasi Kajian Dampak Lingkungan

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kabid Tata Lingkungan DPRKLH Kabupaten Tanah Laut nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Persentase Rekomendasi Lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dilaksanakan melalui Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dan Berita Acara Verifikasi Teknis Limbah B3 dilaksanakan melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 selain di

dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH nomor 15 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasi Kajian Dampak Lingkungan. Dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasi Kajian Dampak Lingkungan didukung 1 (satu) orang PTT.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kajian Dampak Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran Melakukan Penerbitan SKKL	Indikator Jumlah SKKL	1 SKKL	5 SKKL	500%
2.	Sasaran Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL	Indikator Jumlah Rekomendasi UKL- UPL	18 Rekomendasi UKL-UPL	24 Rekomendasi UKL-UPL	133%
3.	Sasaran Melakukan Penerbitan SPPL	Indikator Jumlah penerbitan izin SPPL	90 SPPL	104 SPPL	116%
4.	Sasaran Melaksanakan Verifikasi Teknis PPLH	Indikator Jumlah permohonan yang diverifikasi	18 BA VerifikasTeknis	5 BA VerifikaTeknis	28%

Tabel Perbandingan Kinerja Kasi Kajian Dampak Lingkungan 2021 dengan Capaian

Tahun-Tahun Sebelumnya

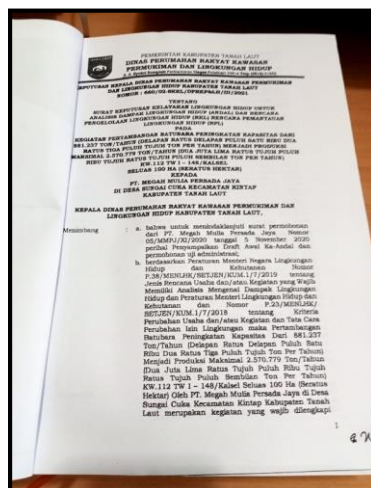
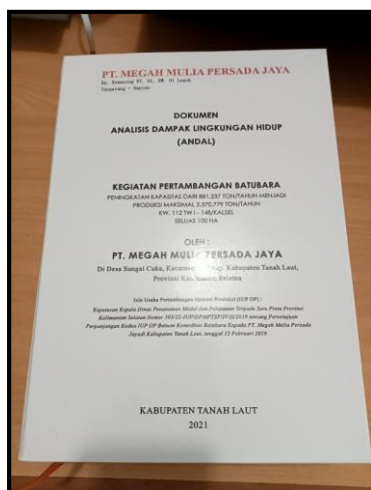
No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi				Tahun 2021		
			2017	2018	2019		Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan Penerbitan SKKL	Jumlah SKKL	4 SKKL	4 SKKL	1 SKKL	4 SKKL	1 SKKL	5 SKKL	400%
2	Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL	Jumlah Rekomendasi UKL-UPL	22 Rekomen dasi UKL-UPL	27 Rekomen dasi UKL-UPL	25 Rekome ndasi UKL- UPL	34 Rekom endasi UKL- UPL	18 Rekom endasi UKL- UPL	24 Rekomend asi UKL-UPL	133%

3	Melakukan Penerbitan SPPL	Jumlah penerbitan izin SPPL	115 SPPL	69 SPPL	158 SPPL	229 SPPL	90 SPPL	104 SPPL	166%
4.	Melaksana kan Verifikasi Teknis PPLH	Jumlah permohonan yang diverifikasi	-	18	22	18	18 BA Verifikasi Teknis	5 BA Verifikasi Teknis	28%

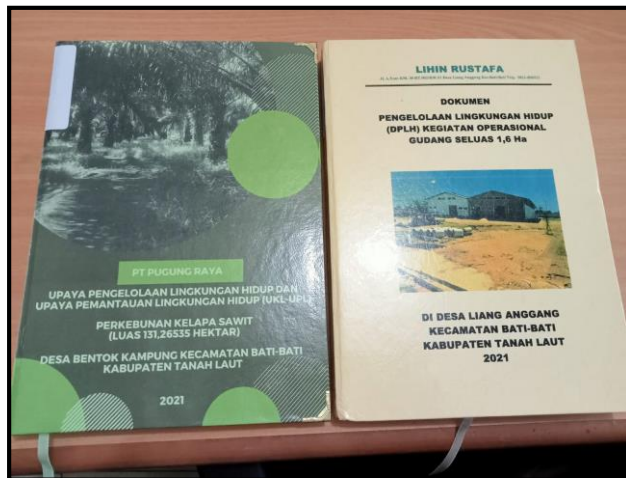
Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja dan capaian program/kegiatan Kasi Kajian Dampak Lingkungan yang telah dilaksanakan

Perjanjian Kinerja Kasi Kajian Dampak Lingkungan tahun 2021 yaitu :

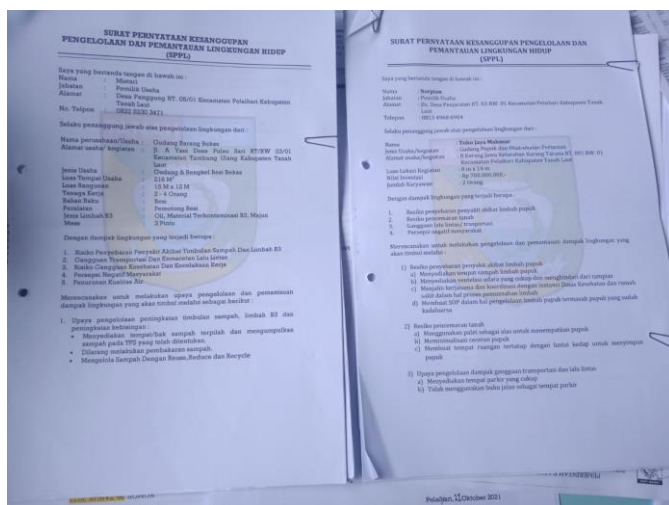
1. Sasaran strategis pertama yaitu melakukan Penerbitan SKKL dengan Indikator Jumlah SKKL dengan target 1 SKKL dan terealisasi 5 SKKL dengan capaian kinerja 500%.



2. Sasaran strategis kedua yaitu Melakukan Penerbitan Rekomendasi UKL- UPL dengan Indikator Jumlah Rekomendasi UKL-UPL dengan target 18 Rekomendasi UKL-UPL dan terealisasi 24 Rekomendasi UKL-UPL dengan capaian kinerja 133%.



3. Sasaran strategis ketiga melakukan Penerbitan SPPL dengan Indikator Jumlah Penerbitan SPPL dengan target 90 SPPL dan terealisasi 104 SPPL dengan capaian kinerja 116%.



**Rekap SPPL Tahun 2021 Per Kecamatan
Tahun 2021**

No	kecamatan	jumlah SPPL
1	Pelaihari	40
2	Bajuin	8
3	Takisung	2
4	Tambang Ulang	5
5	Bati- Bati	8
6	Kurau	6
7	Bumi makmur	3
8	Panyipatan	4
9	Jorong	8
10	Kintap	11
11	Batu Ampar	9
	TOTAL	104

Peningkatan Capaian Sasaran strategis untuk penerbitan SKKL, Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL disebabkan oleh :

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk Dokumen Lingkungan Hidup yaitu melalui AMDAL, Folmulir UKL-UPL dan SPPL.
 - Semakin tertibnya proses penerbitan Perijinan Berusaha di Kabupaten Tanah Laut.
 - Kemudahan dalam pelayanan perijinan berusaha melalui Sistem OSS RBA
4. Sasaran strategis keempat melakukan Verifikasi teknis limbah B3 dengan Indikator Jumlah verifikasi teknis dengan target 18 Berita acara verifikasi teknis dan terealisasi 5 Berita Acara verifikasi teknis dengan capaian kinerja 28% penurunan capaian kinerja ini terjadi karena terbitnya peraturan baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan turunan lainnya, yang mana aturan tersebut merubah aturan-aturan teknis tentang perizinan dan masih dalam masa transisi penerapannya. Selain itu, aturan ini juga merubah kewenangan kerja terkait perizinan Kabupaten/Kota sehingga sejak Februari 2021 tidak ada lagi izin PPLH yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota hanya mengeluarkan Persetujuan Teknis yang mana ketentuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 menjadi rincian teknis limbah B3 yang langsung masuk dalam dokumen lingkungan sehingga tidak ada lagi verifikasi permohonan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

3.g. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Pada UPT Laboratorium Lingkungan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelaboratoriuman Lingkungan .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 3.971.416.616,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.666.331.906,00 atau 92,32 % .

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada UPT Laboratorium Lingkungan sebanyak 12 orang.

Pada Tahun Anggaran 2021, UPT Laboratorium Lingkungan sistem keuangannya kembali bergabung dengan DPRKPLH dengan satu sub kegiatan yaitu Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan

Jumlah sampel yang dilayani laboratorium sesuai SOP sebanyak 896 sampel , atau mencapai 814,54 % dari target 110 sampel. Pelayanan dan pengujian di laboratorium lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 151 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan.

2. Melakukan pengadaan peralatan dan bahan laboratorium

Pengadaan peralatan dan bahan laboratorium pada tahun 2021 , dilakukan pembangunan gedung baru laboratorium yang akan digunakan untuk ruang uji merkuri dan parameter udara, ambien. Kemudian diadakan alat AAS baru

melalui tender, pembangunan IPAL, dan pembelian alat timbangan analitik, pembelian

3. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium

Pemeliharaan peralatan laboratorium ini berupa belanja kalibrasi yang dilakukan rutin karena merupakan kewajiban sebuah laboratorium. Pada tahun 2021, dilakukan kalibrasi terhadap 23 jenis alat yang terdiri dari 80 item yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021 oleh petugas dari BPSMB Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia laboratorium

Personel laboratorium berjumlah 12 orang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang diperlukan di laboratorium. Sehubungan dengan adanya pandemic, pelatihan selama tahun 2020 dilakukan melalui webinar dan zoom meeting.

5. Melakukan penarikan retribusi jasa uji laboratorium

Pada awal tahun anggaran target pendapatan retribusi jasa laboratorium adalah Rp. 300.000.000,00 kemudian pada anggaran perubahan dinaikkan menjadi Rp. 340.000.000,00.

Retribusi uji laboratorium lingkungan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 354.790.000,00 dari target Rp. 340.000.000,00 atau mencapai 104,35 %.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kinerja laboratorium yang mengutamakan pelayanan maksimal kepada seluruh calon pelanggan yang menggunakan jasa laboratorium lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPT Laboratorium

N o	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Sasaran Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Indikator Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	110 sampel	896 sampel	814,54 %
2	Sasaran Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Indikator Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	11 jenis	11 jenis	100%
3	Sasaran Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Indikator Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan.	22 jenis	22 jenis	100%
4	Sasaran Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Indikator Jumlah SDM Lab yang berkualitas	12 orang	12 orang	100%
5	Sasaran Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Indikator Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp.340.000.000	Rp. 354.790.000	104,35 %



Tabel Perbandingan Kinerja Kepala UPT Laboratorium 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP	97 sampel	180 sampel	350 sampel	110 sampel	896 sampel	814,54 %
2	Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar	3 Jenis	16 Jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%
3	Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.	Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan	25 jenis	27 jenis	20 jenis	22 jenis	23 jenis	104,54 %
4	Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.	Jumlah SDM Lab yang berkualitas	11 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	100%
5	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp. 73.861.500	Rp. 81.280.000	Rp. 155.750.000	Rp.340.000.000	Rp. 354.790.000	104,35%

Pada tahun 2021 sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium yaitu :

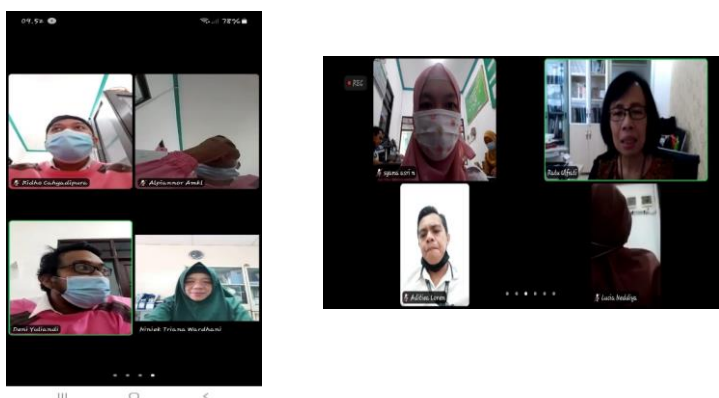
1. Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan dengan indikator Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 814,54% . Jumlah sampel yang diuji adalah 896 sampel.

BAB III AKUNTABILITAS



Foto – foto sampel dan bahan kimia di laboratorium

Pada tanggal 6-7 April 2021, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH memasuki jadwal surveilance pertama yaitu 15-18 bulan sejak akreditasi. Surveilance dilakukan melalui zoom meeting sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dengan UPT Laboratorium sebagai host. Assesor dari KAN dalam hal ini Ibu Niniek Triana Wardhani dan Ibu Ratu Ulfiati, melakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan sampel, hasil uji, pengujian, pengelolaan K3 dan limbah ,dan dokumen –dokumen laboratorium. Hasil surveilance adalah KAN mempertahankan status akreditasi terhadap UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH. Berikut adalah foto kegiatan surveilance tersebut :



UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH juga melakukan uji profisiensi yang pada tahun 2020 tidak dilakukan sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran, Uji Profisiensi merupakan kewajiban tahunan bagi laboratorium pengujian. Uji profisiensi di UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH dilakukan dengan membeli sampel dari ERA kemudian mengirim hasil ujinya kembali agar dievaluasi oleh ERA. Sampel untuk uji profisiensi ini untuk 2 produk yaitu air bersih dan air limbah.

Di bawah ini adalah foto sampel uji profisiensi dari ERA :



2. Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB dengan indikator Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 100%



Foto Analisis Menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)



Foto Timbangan Analitik



Foto Weather Station, Sound Level Meter, CO Meter dan HVAS Debu Partikulat





Foto Instalasi Pengolahan Air Limbah

REKAPITULASI PENGADAAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM, SARANA DAN PRASARANA PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DPRKPLH						
No	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN	VOLUME	PAGU	Keterangan
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.00 02	Belanja Bahan – Bahan Kimia	1 Tahun	Rp.391.600.000	Bahan kimia untuk pengujian air dan udara
		5.1.02.01.01.00 09	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5 Tabung APAR dan 1 Tabung CO	Rp.4.895.000	Gas untuk tabung APAR dan untuk pengujian AAS
		5.1.02.01.01.00 24	Belanja alat Tulis Kantor	1 Tahun	Rp.6.980.940	
		5.1.02.01.01.00 25	Belanja Kertas dan Cover	1 Tahun	Rp. 3.557.700	
		5.1.02.01.01.00 27	Belanja Benda Pos	1 Tahun	Rp. 500.000	
		5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat Kantor Sarana Teknologi	1 Tahun	Rp. 8.035.610	

BAB III AKUNTABILITAS

		5.1.02.01.01.00 30	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	Rp. 3.943.800	
		5.1.02.01.01.00 31	Belanja alat Listrik	1 Tahun	Rp. 2.440.300	
		5.1.02.01.01.00 32	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Tahun	Rp. 18.797.900	
		5.1.02.01.01.00 036	Belanja Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1 Tahun	Rp.56.012.000	Masker, handscoon dan alat-alat gelas
		5.1.02.01.01.00 71	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1 Tahun	Rp. 4.620.000	
		5.1.02.01.01.00 071	Belanja Pakaian Sasirangan	1 Tahun	Rp. 5.905.900	
		5.1.02.02.01.00 30	Belanja Biaya Pengangkutan limbah	1 Tahun	Rp. 10.000.000	
		5.1.02.02.01.00 50	Belanja Jasa kalibrasi	1 Tahun	Rp. 28.809.547	
		5.1.02.02.09.00 12	Belanja Biaya surveillance, assesmen dan iuran tahunan	1 Tahun	Rp. 35.500.000	
		5.1.02.02.09.00 14	Uji profisiensi	1 Tahun	Rp. 45.995.000	
		5.2.02.03.03.00 01	Belanja Modal Alat timbangan	1 unit	Rp. 44.550.000	
		5.2.02.03.03.00 17	Belanja Modal Weather Station	1 unit	Rp. 16.390.000	Anggaran Perubahan
		5.2.02.05.02.00 04	Belanja Modal Alat Pendingin-AC split	1 buah	Rp.20.000.000	
		5.2.02.08.07.00 01	Belanja Modal Atomic Absorption Spectrophotometer	1 unit	Rp. 1.499.960.000	
		5.2.02.08.07.00 02	Belanja Modal alat HVAS debu partikulat	1 buah	Rp. 124.999.985	Anggaran Perubahan

BAB III AKUNTABILITAS

		5.2.02.08.07.00 02	Belanja Modal CO meter	1 buah	Rp. 29.999.200	Anggaran Perubahan
		5.2.02.08.09.00 03	Belanja Modal sound level meter	1 Buah	Rp. 76.499.500	Anggaran Perubahan
		5.2.03.01.01.00 05	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1 Paket	Rp. 689.700.000	Pembanguna gedung 2 lantai dan jasa konsultan pengawas
		5.2.04.03.02.00 04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Air Limbah	1 Unit	Rp. 199.980.000	Anggaran Perubahan





Foto-foto kegiatan pengujian sampel di laboratorium dan pengambilan sampel di lapangan

BAB III AKUNTABILITAS

1. Melakukan pemeliharaan peralatan LAB dengan indikator Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 100%.

REKAP PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM TAHUN 2021						
No.	Nama Alat	Merk Fabrik	Type/Nomor Seri	Kapasitas	Nomor Sertifikat Kalibrasi	Tanggal Sertifikat
1	Termometer Gelas	lokal		100C	899/K/BPSMB/VII/2021	15-Apr-21
2	Oven	Ecocell	LSIS-B2V/EC111/D16082	-	1100/K/BPSMB/VIII/2021	05 Juli 2021
3	Oven	Thermo Scientific		-	1101/K/BPSMB/VIII/2021	05 Juli 2021
4	Analytical Balance	Kern	ABJ220-4NM/WB13AL0184	-	1102/K/BPSMB/VIII/2021	05 Juli 2021
5	Anak Timbangan	sonic		-	1103/K/BPSMB/VIII/2021	05 Juli 2021
6	pH Meter	Mettler Toledo		-	1104/K/BPSMB/VIII/2021	05 Juli 2021
7	pH Meter	Amstast		-	1105/K/BPSMB/VIII/2021	05 Juli 2021
8	Pipet Volume	Iwaki Pyrex		100ml	1106/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		50ml	1107/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		25ml	1108/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		10ml	1109/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		10ml	1110/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		5ml	1111/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		5ml	1112/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		1ml	1113/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
9	Pipet Ukur	Iwaki Pyrex		20ml	1114/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		20ml	1115/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		10ml	1116/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		10ml	1117/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		5ml	1118/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		5ml	1119/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		5ml	1120/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		2ml	1121/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		1ml	1122/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		1ml	1123/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
10	Labu Ukur	Iwaki Pyrex		10ml	1124/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		25ml	1125/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		250ml	1126/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		100ml	1127/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		200ml	1128/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		250ml	1129/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		500ml	1130/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		1000ml	1131/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
11	Gelas Ukur	Iwaki Pyrex		25ml	1132/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		50ml	1133/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		100ml	1134/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex			1135/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
12	Beaker Glass	Iwaki Pyrex		100ml	1136/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		200ml	1137/K/BPSMB/VIII/2021	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		500ml	1138/K/BPSMB/VIII/2022	06 Juli 2021
13	Erlenmayer	Iwaki Pyrex		50ml	1139/K/BPSMB/VIII/2023	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		100ml	1140/K/BPSMB/VIII/2024	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		250ml	1141/K/BPSMB/VIII/2025	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		500ml	1142/K/BPSMB/VIII/2026	06 Juli 2021
14	Botol Winkler 100 ml	Iwaki Pyrex		100ml	1143/K/BPSMB/VIII/2027	06 Juli 2021
		Iwaki Pyrex		300ml	1144/K/BPSMB/VIII/2028	06 Juli 2021
15	Mikropipet 100 - 1000 µl	Endo Pro Micropipette		1000 µl	1146/K/BPSMB/VIII/2030	06 Juli 2021
16	Mikropipet 100 - 1000 µl	Endo Pro Micropipette		1000 µl	1147/K/BPSMB/VIII/2030	06 Juli 2021
17	Inkubator 20°C	Lovibond		-	1148/K/BPSMB/VIII/2032	05 Juli 2021
18	Buret 50 ml	Iwaki Pyrex		50ml	1149/K/BPSMB/VIII/2033	05 Juli 2021
	Buret 50 ml	Iwaki Pyrex		50ml	1150/K/BPSMB/VIII/2034	05 Juli 2021
	Buret 10 ml	Duran		10ml	1145/K/BPSMB/VIII/2029	06 Juli 2021
19	Spektrofotometer	Shimadzu		-	1151/K/BPSMB/VIII/2035	05 Juli 2021
20	Spektrofotometer	Merck Pharo		-	1152/K/BPSMB/VIII/2035	05 Juli 2021
21	Termometer Gelas	Lokal		-	1153/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		Lokal		-	1155/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		Lokal		-	1156/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		Lokal		-	1157/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		Lokal		-	1158/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		Lokal		-	1154/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
22	Tabung Reaksi Merkuri	NIC		10ml	1159/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1160/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1161/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1162/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1163/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1164/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1165/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1166/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1167/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
		NIC		10ml	1168/K/BPSMB/VIII/2037	05 Juli 2021
23	COD Reaktor	Wiggins	WD/325/17920022E	-	1169/K/BPSMB/VIII/2038	05 Juli 2021
24	Conductivity Meter	WTW		-	1170/K/BPSMB/VIII/2038	05 Juli 2021
25	Turbidimeter	Hach	2100Q/18110C0716	-	1171/K/BPSMB/VIII/2038	05 Juli 2021
26	Termohygrometer	lokal		-	1172/K/BPSMB/VIII/2038	06 Juli 2021
	Termohygrometer	lokal		-	1173/K/BPSMB/VIII/2038	06 Juli 2021
	Termohygrometer	lokal		-	1174/K/BPSMB/VIII/2038	06 Juli 2021
	Termohygrometer	lokal		-	1175/K/BPSMB/VIII/2038	06 Juli 2021
	Termohygrometer	lokal		-	1176/K/BPSMB/VIII/2038	06 Juli 2021
27	DO Oxygen Meter	Lutron		-	1177/K/BPSMB/VIII/2038	06 Juli 2021

BAB III AKUNTABILITAS

2. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Laboratorium

Pada tahun 2021 telah dilakukan dua kali pelatihan berbentuk In House Training terhadap personel laboratorium sebagai berikut :

No.	Nama Pelatihan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Nama Narasumber	Keterangan
1.	Manajemen Resiko	UPT Laboratorium Lingkungan, 22-23 Juni 2021	Drs. Adnan Rahman, M.Pd	Pelatihan dilakukan melalui zoom meeting dengan UPT Laboratorium Lingkungan sebagai host
2.	Pemantauan Udara Ambien	UPT Laboratorium Lingkungan, 28-30 Juni 2021	KA Syukron Lillah dan Ahmad Nefriansyah	Pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi di Aula DPRKPLH dan praktik di halaman UPT Laboratorium Lingkungan untuk alat impinger dan TSP

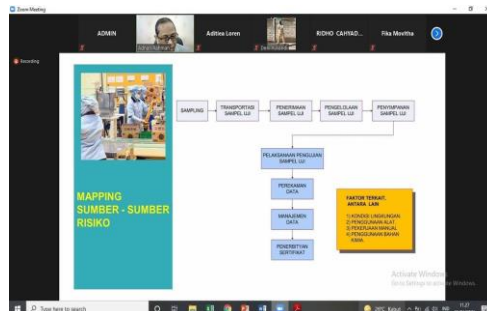


Foto – foto pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Lab

3. Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab dengan indikator Jumlah retribusi jasa uji Lab capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 101,08%, dengan target Rp 340.000.000 dan realisasi Rp. 354.790.000.

Untuk mendukung sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini didukung oleh Kepala TU Laboratorium dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.

Kepala TU Laboratorium

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan melalui Program Tata Lingkungan dengan kegiatan Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan selain di dukung program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kasubbag TU Laboratorium dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2021 Kasubbag TU Laboratorium didukung 1 orang PNS.

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala TU Laboratorium

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
----	-------------------	---------------	--------	-----------	--------------------

BAB III AKUNTABILITAS

1	Sasaran Melakukan pelayanan penatausahaan LAB	Indikator Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP	2 jenis	2 jenis	100%
2	Sasaran Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Indikator Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi sesuai standar	-	-	-
3	Sasaran Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Indikator Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis	5 jenis	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kepala TU Laboratorium 2020 dengan Capaian Tahun-Tahun

Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Tahun 2021		
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Melakukan pelayanan penatausahaan LAB	Jumlah pelayanan penatausahaan LAB yang di layani sesuai SOP	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%
2	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di penuhi	10 jenis	15 jenis	19 jenis	-	-	-
3	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan	5 jenis	5 jenis	6 jenis	5 jenis	5 jenis	100%



Foto – foto prasarana laboratorium

Pada Tahun 2021, UPT Laboratorium Lingkungan mengadakan pembangunan gedung laboratorium yang konsepnya bergabung dengan gedung lama guna meningkatkan kapasitas ruang uji sesuai standardisasi bahwa untuk uji parameter merkuri harus memiliki ruang tersendiri. Gedung ini dibangun selama 180 hari kalender yaitu sejak tanggal 29 april hingga 25 Oktober 2021 oleh CV. Tata Laksana Konstruksi sebagai pemenang tender. Pengawasan dilakukan oleh konsultan dari CV. Tala Muda Cipta Konsultan. Berikut ini adalah foto-foto pembangunan gedung laboratorium.



Pemasangan bow plank



Proses Pembangunan



Gedung baru laboratorium tampak dalam dan tampak luar

SESUAIKAN YANG DIBAWAH INI DATA ITWIL

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja Tidak langsung tahun 2021:

Tabel Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Belanja Gaji dan tunjangan	5.454.905.472,00	3.307.306.868,00	60,63
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.480.000.000,00	3.524.246.030,00	78,67
Total		9.934.905.472,00	6.831.552.898,00	68,76

Total belanja tidak langsung setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. **9.934.905.472,00**, semuanya untuk belanja pegawai, yaitu berupa Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan atas beban kerja. Adapun Realisasi Belanja Tidak Langsung ini adalah sebesar Rp. **6.831.552.898,00** Atau **68,76%** dari Anggaran.

b. Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2021 APBD Murni ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan DPRKPLH, yang terdiri atas 12 (Dua belas) program yang terdiri atas 21 (Dua puluh satu) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan.

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2021 ini dipergunakan untuk membiayai Program-Program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan DPRKPLH, yang terdiri atas 12 (Dua belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan, dan 48 sub kegiatan.

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2021



Anggaran dan Realisasi APBD 2021 pada DPRKLH Kabupaten Tanah Laut

KODE	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.311.648.224,00	1.222.632.940,00	93,21	89.015.284,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	22.799.928.463,00	22.164.605.536,00	97,21	635.322.927,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.630.003.602,00			
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.502.668,00			
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.899.700,00	26.247.500,00	59,79	17.652.200,00
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.351.276,00	25.754.735,00	90,84	2.596.541,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.178.400,00	797.800,00	25,10	2.380.600,00
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.678.300,00	4.313.000,00	92,19	365.300,00
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.678.400,00	1.165.000,00	31,67	2.513.400,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.690.992,00	60.311.350,00	87,80	8.379.642,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.025.600,00	7.852.000,00	26,15	22.173.600,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.934.905.472,00	6.831.552.898,00	68,76	3.103.352.574,00
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.720.578,00	78.331.625,00	98,26	1.388.953,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.670.430,00	23.856.006,00	70,85	9.814.424,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	13.049.210,00	8.124.428,00	62,26	4.924.782,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.004.026,00	95.000.000,00	100	4.026,00

Commented [A1]: eningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	795.075.710,00	715.381.295,00	89,98	79.694.415,00
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.229.840,00	9.101.800,00	56,08	7.128.040,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.726.162,00	113.990.330,00	99,36	735.862,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.714.290,00	33.763.800,00	87,21	4.950.490,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.738.240,00	1.184.000,00	31,67	2.554.240,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.274.674,00	339.344.366,00	86,51	52.930.308,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	233.686.989,00	211.240.000,00	90,39	22.446.989,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	283.216.356,00	274.597.175,00	96,96	8.619.181,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.419.200,00	90.194.553,00	51,13	86.224.647,00
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.749.690,00	15.100.000,00	56,45	11.649.690,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.690.380,00	13.362.600,00	97,61	327.780,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.194.610,00	210.972.190,00	96,69	7.222.420,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.369.691,00	58.180.000,00	98,00	1.189.691,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	919.065.386,00	800.130.824,00	87,06	118.934.562,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	213.858.016,00	204.074.435,00	95,43	9.783.581,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	243.000.000,00	235.611.900,00	96,96	7.388.100,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	215.085.356,00	200.171.685,00	93,07	14.913.671,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.971.146.616,00	3.666.331.906	92,32	304.814.710,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	232.000.000,00	224.975.000,00	96,97	7.025.000,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	144.999.900,00	129.290.000,00	89,17	15.709.900,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.933.521.872	9.633.843.443,00	96,98	299.678.429,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	16.554.400,00	15.318.808,00	92,94	1.235.592,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1458908000	1.357.310.000	93,04	101.598.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	142.733.606	108.969.906	76,34	33.763.700
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	162.609.786	116.387.966	71,58	46.221.820
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	60.561.100	40.583.684	67,01	19.977.416
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	63.028.066	45.495.652	72,18	17.532.414
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	115.021.596	89.482.985	77,80	25.538.611



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.367.883.776	10.880.418.867	95,71	487.464.909
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	219.551.548	210.162.298	95,72	9.389.250
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	72.577.273	40.995.000	56,48	31.582.273
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.542.198.040	1.355.878.778	87,92	186.319.262
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.701.024.717	19.113.406.798	84,20	3.587.617.919
JUMLAH		93.411.508.957			

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

SASARAN STRATEGIS	KODE	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN)	ANGGARAN	REALISASI	%
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99,05
Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.004.026,00	95.000.000,00	93,19
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			93,51
	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	795.075.710,00	715.381.295,00	99,40 89,98



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.229.840,00	9.101.800,00	56,08	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.726.162,00	113.990.330,00	99,36	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.714.290,00	33.763.800,00	87,21	
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.738.240,00	1.184.000,00	31,67	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.274.674,00	339.344.366,00	86,51	
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	233.686.989,00	211.240.000,00	90,39	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	283.216.356,00	274.597.175,00	96,96	
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.419.200,00	90.194.553,00	51,13	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.749.690,00	15.100.000,00	56,45	
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.690.380,00	13.362.600,00	97,61	
Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.194.610,00	210.972.190,00	96,69	
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.369.691,00	58.180.000,00	98,00	
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	919.065.386,00	800.130.824,00	87,0	
		Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas PSU	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.311.648.224,00	1.222.632.940,00	93,21	89.015.284,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	22.799.928.463,00	22.164.605.536,00	97,21	635.322.927,00
Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100	
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100	
Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana		-	-	-	-	
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	243.000.000,00	235.611.900,00	96,96	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	232.000.000,00	224.975.000,00	96,97	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
	2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	144.999.900,00	129.290.000,00	89,17	
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				
Meningkatnya pembinaan	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

hidup (PPLH)	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	162.609.786,00	116.387.966,00	71,58
	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	60.561.100,00	40.583.684,00	67,01
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	2.11.10.2.01.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	115.021.596,00	89.482.985,00	77,80
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	219.551.548	210.162.298	95,72
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Program Tata Lingkungan	63.028.066	45.495.652	72,18
Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	213.858.016,00	204.074.435,00	95,43
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	215.085.356,00	200.171.685,00	93,07
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH			
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	16.554.400,00	15.318.808,00	92,54

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	2.11.05.2.01.02	Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	142.733.606,00	108.969.906,00	76,34
		Program Tata Kota dan Kebersihan			
Meningkatnya penyebaran jaringan PJU	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

(Penerangan Jalan Umum)	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.701.024.717,00	19.113.406.798,00	84,20
Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.933.521.872,00	9.633.843.443,00	96,98
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	11.367.883.776,00	10.880.418.867,00	95,71
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	72.577.273,00	40.995.000	56,48
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.542.198.040,00	1.355.878.778	87,92
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.458.908.000,00	1.357.310.000,00	93,04
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/kerusakan Lingkungan Hidup Kabupae/Kota			
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan hidup Kabupaten/ Kota	3.971.146.616,00	3.666.331.906	92,32
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	2.11.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.502.003.602,00	126.441.385,00	62,28
	2.11.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	43.899.700,00	26.247.500,00	59,79
	2.11.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.351.276,00	25.754.735,00	90,84
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.178.400,00	797.800,00	25,10
	2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.678.300,00	4.313.000,00	92,15
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.678.400,00	1.165.000,00	31,67
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.690.992,00	60.311.350,00	87,80

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.025.600,00	7.852.000	26,15
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.061.345.690,00	6.941.864.957,00	69,00
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.934.905.472,00	6.831.552.898,00	68,76
	2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.720.578,00	78.331.625,00	98,26
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.670.430,00	23.856.006,00	70,85
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.049.210,00	8.124.428,00	62,26
	JUMLAH		93.411.508.957,00	83.899.461.832,00	89,82

No	SASARAN STRATEGIS	IK SARGIS	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN /Sub KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun -n	Kepala Dinas				
		Indeks kualitas air	Kepala Dinas				
		Indeks kualitas udara ambient	Kepala Dinas				
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman	Kepala Dinas				



		Persentase RTH yang terbangun	Kepala Dinas				
2	Meningkatkan kualitas perumahan layak huni	Persentase rumah layak huni	Kepala Dinas				
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Pengelolaan Sampah -Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	219.551.548,00		
4	Meningkatkan Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas PSU	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.311.648.224,00 22.799.928.463,00		
5	Meningkatkan penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota -Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	22.701.024.717,00		



6	Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan	1. Presentase sarana prasarana kebersihan sesuai standar 2. Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<p>4- Pengelolaan Sampah</p> <p>4- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p>	11.367.883.776,00		
		Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<p>4- Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <p>4- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	9.933.521.872,00		
7	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Persentase peningkatan kampung iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>4- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>4- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	215.085.365,00		



		Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota 2- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	213.858.016,00		
		Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2- Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	142.733.606,00		



			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	⁴ - Penyimpanan Sementara Limbah B3 ⁴ -Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	16.554.400,00		
8	Meningkatkan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	⁴ - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota ⁴ -Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	115.021.596,00		
9	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	⁴ -Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ⁴ -Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ⁴ -Koordinasi dan	162.609.786,00		



				Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	60.561.100,00		
10	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>'Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>'-Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>	243.000.000,00		



11		Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	PROGRAM PENGENDALIAN AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>4- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>4- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</p>	232.000.000,00		
		Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	PROGRAM PENGENDALIAN AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>4- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>4- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</p>	144.999.900,00		
	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<p>4- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <p>4- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p>	2.793.665.000,00		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

12	Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	-	-	-		
----	---	--	---	---	---	--	--



13	Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.899.700,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.351.276,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.78.400,00		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.678.300,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.678.400,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.690.992,00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.025.600,00		



14	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase saranan dan prasarana yang dikelola sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795.075.710,00 16.229.840,00 114.726.162,00 38.714.290,00 3.738.240,00 392.274.674,00		
		Persentase saranan dan prasarana yang dikelola sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan	283.216.356,00 176.419.200,00 26.749.690,00		



		Perlengkapan Kantor			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.690.380,00		
Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel	233.686.989,00		
Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.194.610,00 59.369.691,00 919.065.386,00		



15	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.004.026,00		
		Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarna Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		
		Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	Program penyebaran informasi pembangunan dan pelayanan SKPD	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	-		
		Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.004.026,00		
		JUMLAH					



Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2020

No	2020				2021			
	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Nama Program	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program	Penyed			ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
	Pelayanan	iaan rapat-				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00
	Administ rasi Perkantoran	rapat, konsultasi, dan koordinasi	303.951.946	283.253.848	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.311.648.224,00	1.222.632.940,00
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	22.799.928.463,00	22.164.605.536,00
		Penyed				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		22.164.605.536,00
		iaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	31.972.400	29.898.650			22.799.928.463,00	
		Penyed			ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		iaan jasa penun- jang kinerja SKPD	5.554.232.82 3	5.521.162.2 28			43.899.700,00	26.247.500,00
2	Program	Pengad				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.351.276,00	25.754.735,00
	Pemenu- han, Peningka- tan Sarana/P- rasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	aan Sarana dan Prasara- na Perkant- oran	247.547.300, 00	238.387.00 0,00				
		Pemeli- haraan Sarana dan Prasara- na	438.625.007, 00	295.969.56 5,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.178.400,00	797.800,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		Perkantoran			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.678.300,00	4.313.000,00
		Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	0,00	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.678.400,00	1.165.000,00
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.690.992,00	60.311.350,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.025.600,00	7.852.000,00
3	Program	Penyediaan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan	luas			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.934.905.472,00	6.831.552.898,00
	luas Informasi	Informasi	19.995.600,00	0,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.720.578,00	78.331.625,00
4	Program	Perencanaan					
	Penanganan	Perumahan dan Kawasan	853.000.000,00	632.491.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.670.430,00	23.856.006,00
	Rakyat						



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	dan Kawasa	Permu kiman						
--	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	N Permukiman	Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.700.000.000,00	1.683.359.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.049.210,00	8.124.428,00
		Peningkatan Rumah Sederhana (DAK PENUNJANG)	126.195.350,00	126.175.050,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.004.026,00	95.000.000,00
5	Program Penguendalian Pencemaran Lingkungan Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	130.932.800,00	126.818.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	795.075.710,00	715.381.295,00
		Pengendalian Kerusakan Lingkungan	61.107.750,00	59.327.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.229.840,00	9.101.800,00
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	138.899.825,00	138.180.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.726.162,00	113.990.330,00
		Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan	72.429.700,00	72.379.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.714.290,00	33.763.800,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	Lingkungan Hidup	kan Hukum				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.738.240,00	1.184.000,00
--	------------------	-----------	--	--	--	--	--------------	--------------



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		Lingku gan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.274.674,00	339.344.366,00
		Pengel olaan Pengad uan dan Penyel esaian Sengke ta Lingku gan Hidup	49.495.000,0 0	41.345.591, 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Pengadaan Mebel	233.686.98 9,00	211.240.00 0,00
		Pening katan Peran Serta Masyar akat Dalam Pengen dalian Lingku gan Hidup			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			104.150.000, 00	97.794.850, 00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	283.216.356,00	274.597.175,00
7	Program	Verifika			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.419.200,00	90.194.553,00
	Tata Lingkung An	si Izin Perlind ungan dan Pengel olaan Lingku gan Hidup untuk Kegiata n dan/	52.319.200,0 0	51.889.100, 00			



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		atau usaha				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.749.690,0 0	15.100.000,0 0
		Inventarisasi data dan Inform	87.425.000,0 0	81.187.700, 00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.690.380,0 0	13.362.600,0 0



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		asi Lingku ngan Hidup					
		Pence					
		gahan Dampa k Lingku ngan Usaha dan Kegiat an	55.558.250,0 0	51.407.474, 00			
		Pengen dalian Dampa k Peruba han Iklim	88.397.100,0 0	88.397.000, 00			
8	Progra m Tata	Penera ngan	12.041.655.8 00,00	11.740.701. 077,00			
	Kota Dan Kebersi Han	Jalan Umum					
		Perta					
		manan					
		dan Ruang Terbuk a Hijau	1.217.480.00 0,00	1.113.487.8 70,00			
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	213.858.016,00	204.074.435,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.194.610,00	210.972.190,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.369.691,00	58.180.000,00
					Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	919.065.386,00	800.130.824,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		Kebersihan dan Limbah	7.063.848.17	5.454.783.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
			3,00	50,00		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	243.000.000,00	235.611.900,00
9	Progra	Penge				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	215.085.356,00	200.171.685,00
	M Peneliti an dan Pengem bangan Kualitas Lingku ngan dan Pengelo laan Laborat orium Lingkun gan (K3)	mbang an Labora torium Lingku ngan	769.334.400,00	734.399.941,00		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.971.146.616,00	3.666.331.906
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
						Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	232.000.000,00	224.975.000,00



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		ndalia n,			TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	142.733.606	108.969.906
		evalua si dan pelapo ran kinerja	22.497.100,0 0	20.960.200, 00		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	162.609.786	116.387.966
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	60.561.100	40.583.684
					ROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.028.0 66,00	45.495.652
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	115.021.596	89.482.985
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

						Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.367.883.776	10.880.418.867
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	219.551.548	210.162.298
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	72.577.273	40.995.000
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.542.198.040	1.355.878.778
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

					PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	22.701.024.7 17	19.113.406.7 98
	JUMLAH		31.802.248. 724	29.234.495. 894	JUMLAH		93.411.508. 957, 00	83.899.461. 832, 00



No.	2020			2021		
	Belanja Langsung	ANGGARAN	REALISASI	Belanja Langsung	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	9.844.221.291	6.580.290.582	Belanja Pegawai	9.934.905.472	6.831.552.898
2.	Belanja Barang dan Jasa	21.936.533.874	19.839.327.913	Belanja Barang dan Jasa	29.846.077.705	24.971.882.690
	JUMLAH	31.780.755.165	26.419.618.495	JUMLAH	39.780.983.177	31.803.435.588



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan laporan pertanggung jawaban pertama terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **15 Sasaran Strategis 25 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 115,28% dengan rincian 9 (sembilan) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **lebih dari 100%**, 11 (sebelas) indikator dengan tingkat capaian kinerja **100%**, 5 (lima) indikator dengan tingkat capaian kinerja **kurang dari 100%**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan DPRKPLH dan seluruh pejabat struktural DPRKPLH dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing lingkup Sekretariat/Bidang /UPT DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.
2. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi DPRKPLH dan Kabupaten.
3. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari individu pegawai ,level Eselon IV, level Eselon III sampai dengan indikator kinerja level eselon II.



Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2021 disampaikan untuk menjadi bahan
Lebih lanjut

Pelaihari Januari 2021

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,



ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
NIP. 19731128 199803 1 008